



PEMERINTAH KAB. SOPPENG

# LPPD 2021

## LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



## **BAB. II** **CAPAIAN KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH**

**C**apaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan gambaran umum penyelenggaraan pemerintahan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Indek Pembangunan Manusia, pendapatan per kapita, menekan angka kemiskinan dan pengangguran, dan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Evaluasi Dan Penyelenggaraan Pemerintahan, capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah diuraikan sebagai berikut :

### **CAPAIAN KINERJA MAKRO**

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum dengan pengukuran perbandingan dari IPM, angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita dan ketimpangan pendapatan sebagai perbandingan perkembangan ekonomi nasional. Dengan menggunakan capaian kinerja makro, Pemerintah Daerah diharapkan mampu mengukur kinerja pembangunan Daerah dibidang pengembangan peningkatan SDM di Kabupaten Soppeng yang menggambarkan capaian capaian kinerja makro Kabupaten Soppeng 2020-2021 pada tabel berikut :

**Tabel 2.1**  
**Capaian Makro Kabupaten Soppeng**

NO	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Makro Tahun 2020	Capaian Kinerja Makro Tahun 2021	Perubahan (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia	68,67	68,99	0,005
2	Angka Kemiskinan	7,59	7,53	-0,008
3	Angka Pengangguran	4,42	3,92	-0,113
4	Pertumbuhan Ekonomi	2,19	6,15	1,808 **
5	Pendapatan Perkapita	50,10	52,75	0,053 **
6	Ketimpangan Pendapatan (gini Ration)	0,40	-	0,40

Keterangan :

\*\* proyeksi sementara

\*\*\* proyeksi tidak berubah/ proyeksi masih tahun lalu

- data belum tersedia

Pada tahun 2022 indeks pembangunan manusia (IPM) sebanyak 68,99% atau naik 0,005% dari tahun 2021 yang hanya 68,67%, yang menandakan angka harapan putus sekolah menurun dan angka harapan hidup meningkat, serta dapat menekan angka kemiskinan untuk tidak naik dari 7,59% menjadi 7,58% atau turun 0,008% di tahun 2021. Angka pertumbuhan ekonomi daerah tahun 2021 angka semantara meningkat 1,808% atau 6,15% dari tahun 2020 yang hanya 2,19% sehingga mempengaruhi pendapatan daerah dan juga mempengaruhi tingkat pendapatan perkapita yang naik 0,053%. Pada ketimpangan pendapatan(gini Ration) tahun 2021 data belum dirilis sampai selesai penyusunan LPPD Tahun 2021 ini dirampungkan sehingga data sementara masih berlaku tahun 2020 yaitu 0,40%.

## CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pelaksanaan urusan pemerintahan terbagi atas 2 (dua) urusan yaitu Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Penunjang Pemerintahan

Urusan tersebut yang dilaksanakan oleh organiniasi perangkat daerah diuraikan sebagai berikut :

### Urusan Pemerintahan Wajib

Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. Dalam pelaksanaannya urusan pemerintahan wajib terbagi atas 2 urusan yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng pada Tahun 2022 Urusan Pemerintahan Wajib dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.2  
SKPD Pelaksana Urusan Wajib Dan Urusan Pilihan**

NO	NAMA URUSAN	SKPD PELAKSANA
<b>A URUSAN WAJIB</b>		
1	PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
2	KESEHATAN	Dinas Kesehatan
3	PEKERJAAN UMUM	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
4	PERUMAHAN RAKYAT	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
5	TRANTIBUN	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
6	SOSIAL	Dinas Sosial
7	TENAGA KERJA	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
8	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

9	PANGAN	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan
10	PERTANAHAN	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
11	LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup
12	ADM. KEPENDUDUKAN DAN CAPIL	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
15	PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan
16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Dinas Komunikasi Dan Informatika
17	KOPERASI DAN UKM	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan Ukm
18	PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga
20	STATISTIK	Dinas Komunikasi Dan Informatika
21	PERSANDIAN	Dinas Komunikasi Dan Informatika
22	KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
23	PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
24	KEARSIPAN	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
<b>B URUSAN PILIHAN</b>		
1	PERIKANAN	Dinas Peternakan , Kesehatan Hewan Dan Perikanan
2	PARIWISATA	Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga
3	PERTANIAN	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan Dinas Peternakan , Kesehatan Hewan Dan Perikanan
4	PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan Ukm
5	PERINDUSTRIAN	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan Ukm
6	TRANSMIGRASI	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

### Urusan Penunjang Pemerintahan

Urusan Penunjang Pemerintahan adalah Urusan Satuan Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan bagi perangkat daerah lainnya dalam melaksanakan fungsi perencanaan, keuangan, penelitian, kepegawaian, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan serta pengawasan. Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng pada Tahun 2021 Satuan Kerja Perangkat daerah yang melaksanakan Urusan Penunjang Pemerintahan adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Inspektorat
7. Kecamatan
8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

## **Indikator Kinerja Kunci Keluaran**

Indikator Kinerja Kunci Keluaran adalah proses kegiatan yang dibebankan pada perangkat daerah dalam memenuhi target kinerja penyelengaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun, adapun uraian hasil yang dicapai oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Soppeng pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

### **Urusan Wajib**

Pelaksanaan Urusan Wajib sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan wajib terbagi atas :

- **Urusan Wajib Pelayanan Dasar**, yaitu Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah dalam pemenuhan pelayanan dasar warga negara yang ada di daerah.
- **Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar** Yaitu, Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah dalam menunjang pelaksanaan pelayanan urusan wajib pelayanan dasar yang ada di daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng pada tahun 2020 dalam melaksanakan urusan tersebut, diuraikan sebagai berikut:

#### **1. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**

##### **A. URUSAN PENDIDIKAN**

Pada pelaksanaan urusan pelayanan dasar pada Bidang Pendidikan pada tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut:

###### **1) Program Kegiatan**

Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan dasar pada Urusan Pendidikan, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng menyusun Program Kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan anggaran Rp 408.604.150.323 dan program kegiatan sebagai berikut:

###### **a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, pelaksanaan kegiatan terdiri atas:

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

###### **b) Program Pengelolaan Pendidikan**

Pada Program Pengelolaan Pendidikan, pelaksanaan kegiatan terdiri atas:

- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
  - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
  - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
- c) Program Pengembangan Kurikulum

Pada Program Pengembangan Kurikulum, pelaksanaan kegiatan terdiri atas:

- Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar

- d) Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

Pada Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, pelaksanaan kegiatan terdiri atas:

- Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

2) Indikator Kinerja Kunci

Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Urusan Pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dapat di lihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.3**  
**IKK Output dan IKK Outcome**  
**Urusan Pendidikan**

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
A.1	Tingkat partisipasi warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	112,62%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data Jumlah Anak Uaia 5-6 Tahun yang susah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD Tahun 2021 sebanyak 3435 jiwa</li> <li>- Data pembagi dari data penduduk usia 5-6 tahun semester 1 tahun 2021 bersumber dari Dinas DUKCAPIL sebanyak 3060 jiwa</li> </ul>
	1. Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang terakreditasi (Negeri dan Swasta)	103 PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang teragreditasi diuraikan sebagai berikut: ✓ Agreditasi A = 8 ✓ Agreditasi B = 64 ✓ Agreditasi C = 31
	2. Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari PEMDA	n/a	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data tidak ada
	3. Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan	779 peserta didik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	daftar peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan
	4. Jumlah kebutuhan pendidik PAUD (Negeri)	516 Kebutu	Dinas Pendidikan dan	daftar sarana prasarana pendidikan PAUD

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	dan Swasta)	han	Kebudayaan	
	5. Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	n/a	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tidak ada data jumlah pendidik PAUD
	6. Jumlah Pendidik PAUD yang memiliki Ijazah D IV atau sarjana (S1), dan sertifikat Profesi guru Pendidikan PAUD	267 Orang Pendidik PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data Jumlah Pendidik PAUD yang memiliki Ijazah atau sertifikat pendidik adalah sebagai berikut: ✓ Diploma = ✓ Sarjana = ✓ Sertifikat pendidik =
	7. Jumlah Kepala Sekolah PAUD iajazah D-IV atau S.1 bersertifikat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD nonformal dari lembaga pemerintah	132 Kepala Sekolah PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data Jumlah Kepala Sekolah yang memiliki Ijazah atau sertifikat pendidik adalah sebagai berikut: ✓ Diploma = ✓ Sarjana = ✓ Sertifikat pendidik =
A.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	107,48%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	- Data tingkat partisipasi warga negra usia 7-12 tahun yang berpartisipasi di tingkat Pendidikan dasar sebanyak 18788 jiwa - Data pembagi dari data penduduk usia 7-12 tahun semester 1 tahun 2021 bersumber dari Dinas DUKCAPIL sebanyak 17480 jiwa
	1. Jumlah Satuan Pendidikan Dasar SD yang terakreditasi (Negeri dan Swasta)	252	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data Jumlah Satuan Pendidikan Dasar SD yang terakreditasi diuraikan sebagai berikut: ✓ Agreditasi A = 95 ✓ Agreditasi B = 154 ✓ Agreditasi C = 3
	2. Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari PEMDA	n/a	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari PEMDA
	3. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	17.743	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Semua peserta didik dibebaskan biaya pendidikan
	4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	2.277	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar
	5. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	2.590	Dinas Pendidikan dan	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	6. Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	1.012	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar
	7. jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	387	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data Jumlah pendidik PAUD di Kabupaten Soppeng adalah sebagai berikut: ✓ Negeri = ✓ Swasta =
	8. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	2.417	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik
	9. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	225	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah
	10. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/sederajat	375	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/sederajat
A.3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama,:;	120,62%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data Jumlah anak usia 13-15 tahun yang tamat dan sedang belajar di sekolah menengah pertama sebanyak 9004 jiwa</li> <li>- Data pembagi dari data penduduk semester 1 tahun 2021 bersumber dari Dinas DUKCAPIL sebanyak 7465 jiwa</li> </ul>
	1. Jumlah Satuan Pendidikan Dasar SMP yang terakreditasi (Negeri dan Swasta) adalah sebagai berikut:	38	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data Jumlah Satuan Pendidikan Dasar SMP yang terakreditasi diuraikan sebagai berikut: ✓ Agreditasi A = 26 ✓ Agreditasi B = 9 ✓ Agreditasi C = 3
	2. Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	n/a	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	data tidak ada
	3. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah	5.982	Dinas Pendidikan dan	Daftar peserta didik SMP yang menerima

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan		Kebudayaan	pembebasan biaya pendidikan
	4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	380	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data sarana prasarana Pendidikan SMP
	5. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	1221	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data guru SMP
	6. jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	152	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data sarana dan prasaran pendukung tenaga pendidikan SMP
	7. jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	155	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data Guru SMP
	8. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	1.182	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data Guru SMP yang berijazah D IV dan S1 dan sertifikat guru SMP
	9. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	33	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data Kepala Sekolah PAUD ijazah D-IV atau S.1 bersertifikat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk SMP formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan SMP nonformal dari lembaga pemerintah
	10. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/sederajat	136	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Daftar tenaga/staf administrasi perkantoran di sekolah SMP
A.4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	8,78	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan pendidikan kesetaraan sebanyak 384 jiwa</li> <li>- Data pembagi dari data penduduk semester 1 tahun 2021 bersumber dari Dinas DUKCAPIL sebanyak 4376 jiwa</li> </ul>
	1. Jumlah satuan	5	Dinas Pendidikan dan	Data Jumlah Satuan

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	pendidikan kesetaraan terakreditasi		Kebudayaan	Pendidikan kesetaraan yang terakreditasi diuraikan sebagai berikut: ✓ Agreditasi A = 0 ✓ Agreditasi B = 9 ✓ Agreditasi C = 3
	2. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	n/a	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data tidak ada
	3. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan	935	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	daftar peserta didik kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan
	4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	21	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	daftar sarana prasarana pendidikan kesetaraan
	5. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	75	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data Guru kesetaraan
	6. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	54	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data Guru Kesetaraan yang berijazah D IV dan S1
	7. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	n/a	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data tidak perlu di isi
	8. Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1	n/a	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data tidak perlu di isi

3) Prestasi/penghargaan yang diraih

Pada Tahun 2021 tidak ada penghargaan yang diraih terkait urusan pendidikan

## B. URUSAN KESEHATAN

Pada pelaksanaan urusan pelayanan dasar pada Bidang Kesehatan pada tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, dapat di lihat sebagai berikut:

1) Program Kegiatan

Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan dasar pada Urusan Kesehatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng menyusun Program Kegiatan pada Dinas Kesehatan dengan anggaran Rp 223.432.369.527 dan program kegiatan sebagai berikut:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD

b) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

- Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
- Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

- Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
- Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

d) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Pada Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman, pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

- Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
  - Kegiatan Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
  - Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
  - Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
- e) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
- Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:
- Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Indikator Kinerja Kunci

Penilaian Kinerja Penyelengaraan Pemerintahan Daerah pada Urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, dapat di lihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.4  
IKK Output dan IKK Outcome  
Urusan Kesehatan**

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
B.1	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	0,13%	RSUD Latemmamala Kab. Soppeng	Daya tampung RSUD Latemmala sebanyak 300 Jiwa dari Jumlah keseluruhan penduduk semester 2 (dua) tahun 2022 sebanyak 237875 jiwa
	1. Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	1 RS	RSUD Latemmamala Kab. Soppeng	- Keputusan Gubernur Sulsel Nomor 8/J.09/PTSP/2020 - SK Gubernur Nomor 955/II/TAHUN 2020
B.2	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya.	100%	RSUD Latemmamala Kab. Soppeng	Akreditasi yang didapat Paripurna Bintang 5 (lima)

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	1. Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	1 RS	RSUD Latemmamala Kab. Soppeng	keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 8/J.09/PTSP/2020 tentang Izin Operasional RSUD Latemmamala Soppeng, merupakan dasar Rumah sakit yang dibina dan dipersiapkan akreditasinya
B.3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	Dinas Kesehatan	Berdasarkan Perbup No.43 Tahun 2018 tentang Persalinan di Fasilitasi Kesehatan sehingga tidak ada ibu hamil yang tidak terlayanani. Jumlah Ibu Hamil yang terdaftar dan terlayani sebanyak 2574.
	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	245.353 persediaan	Dinas Kesehatan	Berdasarkan Perbup No.43 Tahun 2018 tentang Persalinan di Fasilitasi Kesehatan, sehingga pemenuhan dukungan logistic kesehatan bagi Ibu Hamil terjamin dengan baik.
	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	51	Dinas Kesehatan	Berdasarkan Perbup No.43 Tahun 2018 tentang Persalinan di Fasilitasi Kesehatan, tingkat pemenuhan pelayanan kesehatan pada
B.4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%	Dinas Kesehatan	- Data Ibu bersalin di Kabupaten Soppeng Tahun 2021 sebanyak 2811 jiwa Pembagi jumlah Ibu bersalin di Kabupaten Soppeng tahun 2021 sebanyak 2811 jiwa - Capaian persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan di dukung dengan Perbup No.43 Tahun 2018 tentang Persalinan di Fasilitasi Kesehatan
	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	8196 persediaan	Dinas Kesehatan	Data Logistik (Obat-obatan) untuk ibu bersalin
	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	51	Dinas Kesehatan	Data Petugas yang melayani ibu bersalin termasuk di puskesmas, polindes dan pustu adaah sebagai berikut: ✓ Dokter = 17 ✓ Bidan = 17 ✓ Perawat =17

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
B.5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data bayi baru lahir 0-28 hari di Kabupaten Soppeng Tahun 2021 sebanyak 2790 jiwa, Pembagi jumlah bayi baru lahir 0-28 hari di Kabupaten Soppeng tahun 2021 sebanyak 2790</li> <li>- Capaian Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir di dukung dengan Perbup No.43 Tahun 2018 tentang Persalinan di Fasilitasi Kesehatan</li> </ul>
	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	22104 persediaan	Dinas Kesehatan	Data Logistik (Obat-obatan) untuk bayi baru lahir
	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	51 petugas	Dinas Kesehatan	<p>Data Petugas yang melayani bayi baru lahir termasuk di puskesmas, polindes dan pustu adaah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Dokter = 17</li> <li>✓ Bidan = 17</li> <li>✓ Perawat = 17</li> </ul>
B.6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 'Data balita berusia 12-59 bulan tahun 2021 di Kabupaten Soppeng Tahun 2021 sebanyak 9846 jiwa dan Pembagi jumlah balita berusia 12-59 bulan di Kabupaten Soppeng tahun 2021 sebanyak 9846</li> <li>- Capaian Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar di dukung dengan Perbup No.43 Tahun 2018 tentang Persalinan di Fasilitasi Kesehatan</li> </ul>
	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	81846 persediaan	Dinas Kesehatan	Data Logistik (Obat-obatan) untuk balita
	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan balita sesuai standar	51 petugas	Dinas Kesehatan	<p>Data Petugas yang melayani kesehatan balita sesuai standar termasuk di puskesmas, polindes dan pustu adaah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Dokter = 17</li> <li>✓ Perawat = 17</li> <li>✓ Bidan = 17</li> </ul>

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
				✓ Gizi = 17
B.7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	19,85%	Dinas Kesehatan	Data anak berusia 7-15 tahun 2021 yang mendapatkan pelayanan di Kabupaten Soppeng Tahun 2021 sebanyak 5637 jiwa dan Pembagi jumlah anak berusia 7-15 semester 1 di Kabupaten Soppeng tahun 2021 yang bersumber dari DUKCAPIL sebanyak 28640 jiwa
	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	16911 persediaan	Dinas Kesehatan	Data Logistik (Obat-obatan) untuk anak usia pendidikan dasar untuk anak berusia 7-15
	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	85 petugas	Dinas Kesehatan	Data Petugas yang melayani kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar termasuk di puskesmas, polindes dan pustu adaah sebagai berikut: ✓ Dokter = 17 ✓ Perawat = 17 ✓ Bidan = 17 ✓ Gizi = 17 ✓ Kesmas = 17
B.8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	51,86%	Dinas Kesehatan	Data orang usia 15-59 tahun 2021 yang mendapatkan pelayanan di Kabupaten Soppeng Tahun 2021 sebanyak 76987 jiwa dan Pembagi warga negara usia 15-59 semester 2 di Kabupaten Soppeng tahun 2021 yang bersumber dari DUKCAPIL sebanyak 148451 jiwa
	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	167106 persediaan	Dinas Kesehatan	Data Logistik (Obat-obatan) untuk anak usia pendidikan dasar untuk skrening warga negara usia 15-59
	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	85 petugas	Dinas Kesehatan	Data Petugas yang melayani skrining kesehatan sesuai standar termasuk di puskesmas, polindes dan pustu adaah sebagai berikut: ✓ Dokter = 17 ✓ Perawat = 17 ✓ Bidan = 17 ✓ Gizi = 17 ✓ Kesmas = 17
B.9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas	51,16%	Dinas Kesehatan	Data orang usia 60 tahun keatas tahun 2021 yang

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar			mendapatkan pelayanan di Kabupaten Soppeng Tahun 2021 sebanyak 20317 jiwa dan Pembagi warga negara usia 60 tahun keatas di Kabupaten Soppeng tahun 2021 yang bersumber dari DUKCAPIL sebanyak 39710 jiwa
	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	60961 persediaan	Dinas Kesehatan	Data Logistik (Obat-obatan) untuk anak usia pendidikan dasar untuk skrening warga negara usia 60 tahun keatas
	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	85 petugas	Dinas Kesehatan	Data Petugas yang melayani skrining kesehatan sesuai standar termasuk di puskesmas, polindes dan pustu adaah sebagai berikut: ✓ Dokter = 17 ✓ Perawat = 17 ✓ Bidan = 17 ✓ Gizi = 17 ✓ Kesmas = 17
B.10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, dengan rumus sebagai berikut :	100%	Dinas Kesehatan	Data penderita hipertensi di Kabupaten Soppeng tahun 2021 sebanyak 4170 jiwa dan pembanginya jumlah pasien hipertensi di Kabupaten Soppeng sebanyak 4170 jiwa
	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	68 persediaan	Dinas Kesehatan	Data Logistik (Obat-obatan) untuk anak usia pendidikan dasar untuk penderita hipertensi
	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	85 petugas	Dinas Kesehatan	Data Petugas yang melayani skrining kesehatan sesuai standar untuk hipertensi termasuk di puskesmas, polindes dan pustu adaah sebagai berikut: ✓ Dokter = 17 ✓ Perawat = 17 ✓ Bidan = 17 ✓ Gizi = 17 ✓ Kesmas = 17
B.11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan	Data penderita DM di Kabupaten Soppeng tahun 2021 sebanyak 1234 dan pembanginya data jumlah penderita DM di Kabupaten Soppeng sebanyak 1234 jiwa
	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan	2510 logistik	Dinas Kesehatan	Data Logistik (Obat-obatan) untuk anak usia pendidikan

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	yang tersedia			dasar untuk penderita DM
	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	85 persediaan	Dinas Kesehatan	Data Petugas yang melayani skrining kesehatan sesuai standar untuk hipertensi termasuk di puskesmas, polindes dan pustu adaah sebagai berikut: ✓ Dokter = 17 ✓ Perawat = 17 ✓ Bidan = 17 ✓ Gizi = 17 Kesmas = 17
B.12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar, dengan rumus sebagai berikut :	100%	Dinas Kesehatan	Data penderita ODGJ tahun 2021 yang mendapatkan pelayanan di Kabupaten Soppeng Tahun 2021 sebanyak 424 jiwa dan Pembagi penderita ODGJ di Kabupaten Soppeng tahun 2021 sebanyak 242 jiwa
	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	68 persediaan	Dinas Kesehatan	Data Logistik (Obat-obatan) untuk anak usia pendidikan dasar untuk penderita ODGJ
	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	34 petugas	Dinas Kesehatan	Data Petugas yang melayani ODGJ termasuk sebagai berikut: ✓ Dokter = 17 ✓ Perawat = 17
B.13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan	Data penderita TBC tahun 2021 yang mendapatkan pelayanan di Kabupaten Soppeng Tahun 2021 sebanyak 595 jiwa dan Pembagi penderita TBC di Kabupaten Soppeng tahun 2021 sebanyak 595 jiwa
	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	502745 persediaan	Dinas Kesehatan	Data Petugas yang melayani skrining kesehatan sesuai standar termasuk di puskesmas, polindes dan pustu adaah sebagai berikut: ✓ Dokter = 17 ✓ ATLM = 17 ✓ Penata Rontgen = 2 ✓ Perawat = 17 ✓ Kesmas = 17
	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	70 petugas	Dinas Kesehatan	Data Petugas yang melayani skrining kesehatan sesuai standar termasuk di puskesmas, polindes dan pustu adaah

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
				sebagai berikut: ✓ Dokter = 17 ✓ ATLM = 17 ✓ Penata Rontgen = 2 ✓ Perawat = 17 Kesmas = 17
B.14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan	Data penderita HIV tahun 2021 yang mendapatkan pelayanan di Kabupaten Soppeng Tahun 2021 sebanyak 3103 jiwa Pembagi penderita HIV di Kabupaten Soppeng tahun 2021 sebanyak 3103 jiwa
	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	23034 persediaan	Dinas Kesehatan	Data Logistik (Obat-obatan) untuk anak usia pendidikan dasar untuk penderita HIV
	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	85 petugas	Dinas Kesehatan	Data Petugas yang melayani skrining kesehatan sesuai standar untuk HIV adalah sebagai berikut: ✓ Dokter = 17 ✓ Perawat = 17 ✓ Bidan = 17 ✓ Gizi = 17 Kesmas = 17

3) Prestasi/penghargaan yang diraih

Tidak ada Penghargaan di Tahun 2021

### C. URUSAN PEKERJAAN UNUM DAN PENATAAN RUANG

Pada pelaksanaan urusan pelayanan dasar pada Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dapat di lihat sebagai berikut:

1) Program Kegiatan

Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan dasar pada Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pemerrintah Daerah Kabupaten Soppeng menyusun Program Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan anggaran Rp 129.683.080.391 dan program kegiatan sebagai berikut:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
  - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b) Program Pengelolaan Sumber Daya Air
- Pada Program Pengelolaan Sumber Daya Air, pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:
- Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di bawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- c) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- Pada Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:
- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
- d) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- Pada Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:
- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/kota
- e) Program Penataan Bangunan Gedung
- Pada Program Penataan Bangunan Gedung, pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:
- Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
- f) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
- Pada Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya, pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:
- Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
- g) Program Penyelenggaraan Jalan
- Pada Program Penyelenggaraan Jalan, pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

- Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
- h) Program Pengembangan Jasa Konstruksi
- Pada Program Pengembangan Jasa Konstruksi, pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:
- Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
  - Penerbitan Izin Usaha Kecil Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)
  - Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
- i) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
- Pada Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

2) Indikator Kinerja Kunci

Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dapat di lihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.5  
IKK Output dan IKK Outcome  
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
C.1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	9,27%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Data Kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi dan Data keseluruhan kawasan pemukiman yang rawan banjir
	1. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	717,54 Ha	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Data keseluruhan kawasan pemukiman yang rawan banjir yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah
	2. Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	62388,6 meter	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Data panjang sungai kawasan pemukiman yang rawan banjir yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah
	3. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	tidak memiliki garis pantai surat keterangan nomor 034/LPPD/PI-PR/II/2022

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	kabupaten/kota (HA)			
	4. Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (ha)	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	tidak memiliki garis pantai surat keterangan nomor 035/LPPD/PI-PR/II/2022
	5. Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/[oa pengelolaan SD Air WS Kewenangan kabupaten/kota	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	surat keterangan nomor 036/LPPD/PI-PR/II/2022
	6. Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	surat keterangan nomor 037/LPPD/PI-PR/II/2022
	7. Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota, sebagai berikut :	8277 meter	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Data Sarana dan Prasarana pengamanan sungai milik PEMDA
	1) Bangunan perkuatan tebing (m)	5150 meter		
	2) Tanggul sungai (m)	3097 meter		
	3) Kanal banjir (m)	0		
	4) Pintu air/bendung pengendali banjir (Unit)	30 meter		
	5) Pompa banjir (Unit dan Kapasitas)	0		
	6) Polder/Kolam Retensi (Unit)	0		
	7) Breakwater (m)	0		
	8) Seawall dan Bangunan pengaman pantai lainnya (m)	0		

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
C.2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	n.a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	tidak memiliki garis pantai surat keterangan nomor 038/LPPD/PI-PR/II/2022
	1. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	n.a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	tidak memiliki garis pantai surat keterangan nomor 038/LPPD/PI-PR/II/2022
	2. Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	n.a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	tidak memiliki garis pantai surat keterangan nomor 038/LPPD/PI-PR/II/2022
	3. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (HA)	n.a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	tidak memiliki garis pantai surat keterangan nomor 038/LPPD/PI-PR/II/2022
	4. Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (ha)	n.a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	tidak memiliki garis pantai surat keterangan nomor 038/LPPD/PI-PR/II/2022
	5. Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/ tata pengelolaan SD Air WS Kewenangan kabupaten/kota	n.a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	tidak memiliki garis pantai surat keterangan nomor 038/LPPD/PI-PR/II/2022
	6. Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/ rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	n.a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	tidak memiliki garis pantai surat keterangan nomor 038/LPPD/PI-PR/II/2022
	7. Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota, sebagai berikut :	n.a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	tidak memiliki garis pantai surat keterangan nomor 038/LPPD/PI-PR/II/2022
	1) Bangunan perkuatan			

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	tebing (m)			
	2) Tangul sungai (m) 3) Kanal banjir (m) 4) Pintu air/bendung pengendali banjir (Unit) 5) Pompa banjir (Unit dan Kapasitas) 6) Polder/Kolam Retensi (Unit) 7) Breakwater (m)			
C.3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	6,21 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Data jaringan irigasi yang dibangun, ditingkatkan, direhabilitasi, dioperasikan dan dipelihara sebanyak 6001,34 Ha dan bagi Data Luas daerah irigasi kewenagan Kabupaten sebanyak 96666 Ha
	1. Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik	65,38%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Data jaringan irigasi primer di kabupaten
	2. Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	59,68%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Data jaringan irigasi sekunder di kabupaten
	3. Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	64,34	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Data jaringan irigasi tersier di kabupaten
C.4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	98,02%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Data rumah tangga yang dapatkan layanan air minum SPAM di Kab. Soppeng diuraikan tiap kecamatan sebanyak 56492 Rumah Tangga Data Jumlah rumah di Kab. Soppeng sebanyak 57632 Rumah Tangga
	1. Penetapan dokumen RISPAM kabupaten/kota (Ada /Tidak)	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penetapan Dokumen RISPAM Kabupaten/Kota tidak terdapat data karena Perencanaan Penyusunan Dokumen RISPAM sementara diusulkan untuk dianggarkan sesuai dengan Surat Keterangan Dinas PUPR Nomor

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
				030/LPPD/PU-PR/II/2022
	2. Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota (Ada/Tidak)	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penetapan JAKSTRADA Kab/Kota tidak terdapat data kerena perencanaan penyusunan JAKSTRADA sementara diusulkan untuk dianggarkan berdasarkan Surat Keterangan Dinas PUPR Nomor 031/LPPD/PU-PR/II/2022
	3. Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kab/Kota Penyelenggara SPAM	1 BUMD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Data BUMD yang mengelolah SPAM yaitu PDAM Kab.Soppeng
	4. Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	tidak ada izin yang dikeluarkan BU untuk SPAM Surat Keterangan Dinas PU-PR Nomor 033/LPPD/PI-PR/II/2022
	5. Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Data tidak ada
C.5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.	99,95%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Data rumah tangga yang memiliki akses pengolahan berupa cupluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah oleh PLT + jumlah rumah memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPAL dan Data Jumlah rumah di Kab. Soppeng
	1. Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-S	57260 Rumah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Data SPALD-S
	2. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD T	345 Rumah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Data SPALD-T
	3. Jumlah rumah dengan akses unit	40231 Rumah	Dinas Pekerjaan	Data rumah tangga yang memiliki akses pengolahan

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T		Umum dan Penataan Ruang	berupa cupluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah oleh PLT + jumlah rumah memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPAL dan Data Jumlah rumah di Kab. Soppeng
	4. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	32 rumah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Data Jumlah rumah yang menerima layanan jasa penedotan lumpur tinja tahun 2021
	5. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	32 rumah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Data Jumlah rumah yang menerima layanan jasa penedotan lumpur tinja tahun 2021
	6. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	32 rumah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Data Jumlah rumah yang menerima layanan jasa penedotan lumpur tinja tahun 2021
	7. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tidak terdapat data surat keterangan nomor 026/LPPD/PU-PR/II/2021
	8. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tidak terdapat data surat keterangan nomor 039/LPPD/PU-PR/II/2021
	9. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tidak terdapat data surat keterangan nomor 027/LPPD/PU-PR/II/2021
	10. Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tidak terdapat data surat keterangan nomor 040/LPPD/PU-PR/II/2021
	11. Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	75%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dokumentasi penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja
	12. Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dokumentasi kapasitas pengelolaan lumpur tinja yang tersedia dengan kapasitas 9 m <sup>3</sup> /hari

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	13. Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	tidak terdapat data penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPAL-D surat keterangan Dinas PU-PR nomor 028/LPPD/PI-PR/II/2022
	14. Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	tidak terdapat data rumah yang tangki septiknya yang sudah disedot surat keterangan Dinas PU-PR nomor 029/LPPD/PI-PR/II/2022
C.6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Data Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai dengan peruntukannya sebanyak 392 izin pembagi Data Jumlah IMB yang berlaku sebanyak 392 permohonan
	1. Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	11,99%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah IMB yang diberikan PEMD tahun 2021
	2. Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	392	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Data IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting
	3. Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	ADA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perda Kab. Soppeng Nomor 3 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung
	4. Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	TIDAK ADA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	tidak penetapan keputusan Bupati surat keterangan Dinas PU-PR nomor 023/LPPD/PI-PR/II/2022
	5. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	tidak ketetapan bangunan gedung yang ditetapkan surat keterangan Dinas PU-PR nomor 024/LPPD/PI-PR/II/2022
	6. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	tidak ketetapan bangunan gedung yang ditetapkan surat keterangan nomor 025/LPPD/PI-PR/II/2022
	7. Jumlah bangunan gedung negara milik	2952 unit	Dinas Pekerjaan	Data Jumlah bangunan gedung negara milik

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	Pemerintah Kab/Kota		Umum dan Penataan Ruang	Pemerintah Kab/Kota
	8. Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	2952	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Data Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat
C.7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	57,32%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data jalan kewenangan kabupaten yang mantap sebanuak 516,03 Km</li> <li>- Data Panjang jalan keseluruhan Kabupaten/Kota sebanyak 900,34</li> </ul>
	1. Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kab/Kota	898881 km	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SK BUPATI Nomor 882/IX/2017 tentang Penetapan Status Jalan Kabupaten dan Jalan Desa Di Kabupaten Soppeng
	2. Panjang jalan yang dibangun	1,45 km	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Data Panjang jalan yang dibangun
	3. Panjang jembatan yang dibangun	41 meter	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Data Panjang jembatan yang dibangun
	4. Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	4,26 km	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Data Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)
	5. Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	tidak ada jembatang yang diganti/dilebarkan surat keterangan Dinas PU-PR nomor 020/LPPD/PI-PR/II/2022
	6. Panjang jalan yang direkonstruksi/direhabilitasi	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	tidak ada jembatang yang diganti/dilebarkan surat keterangan Dinas PU-PR nomor 021/LPPD/PI-PR/II/2022
	7. Panjang jembatan yang direhabilitasi	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	tidak ada jembatang yang diganti/dilebarkan surat keterangan nomor 022/LPPD/PI-PR/II/2022
	8. Panjang jalan yang dipelihara	11,81 km	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Data Panjang jalan yang dipelihara

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	9. Panjang jembatan yang dipelihara	58,4 meter	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Data Panjang jembatan yang dipelihara
C.8.1	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi, dengan rumus sebagai berikut :	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	tidak ada data Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi surat keterangan Dinas PU-PR nomor 001/LPPD/PI-PR/II/2022
	1. Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	tidak ada data jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten surat keterangan Dinas PU-PR nomor 002/LPPD/PI-PR/II/2022
	2. Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	74 Tenaga kerja	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Data Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah Kab. Soppeng
	3. Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota (dibuktikan dengan sertifikat)	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	tidak ada data jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten surat keterangan Dinas PU-PR nomor 003/LPPD/PI-PR/II/2022
	4. Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	2 kegiatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dokumentasi kegiatan pembinaan jasa konstruksi (pelatihan/bintek) yang diselenggarakan oleh pemerintah/lembaga lainnya di Kab. Soppeng Yaitu : ✓ Pembekalan dan Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi ✓ Pelatihan Kerja Tukang Batu
	5. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	tidak Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab surat keterangan nomor 004/LPPD/PI-PR/II/2022
	6. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan	Tidak tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN		Ruang	tahun berjalan yang bersumber dari APBN surat keterangan nomor 005/LPPD/PI-PR/II/2022
	7. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	tidak Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya surat keterangan nomor 006/LPPD/PI-PR/II/2022
	8. Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	tidak Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala surat keterangan nomor 007/LPPD/PI-PR/II/2022
	9. Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	tidak Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten surat keterangan nomor 008/LPPD/PI-PR/II/2022
	10. Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	tidak Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya. surat keterangan nomor 009/LPPD/PI-PR/II/2022
	11. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	tidak Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis surat

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	operator dan teknisi/analisis			keterangan nomor 010/LPPD/PI-PR/II/2022
	12. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	tidak Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab surat keterangan nomor 011/LPPD/PI-PR/II/2022
	13. Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	tidak Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten surat keterangan nomor 012/LPPD/PI-PR/II/2022
	14. Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	ADA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Data Laporan Penerbitan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi
	15. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	tidak Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya surat keterangan nomor 013/LPPD/PI-PR/II/2022
	16. Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	tidak Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya surat keterangan nomor 014/LPPD/PI-PR/II/2022
	17. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum pernah dilaksanakan pendataan terkait Badan Usaha yang memiliki IUJKN surat keterangan Dinas PU-PR Nomor 015/LPPD/PU-PR/II/2022
	18. Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	tidak Tersedianya data Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota surat keterangan Dinas PU-PR nomor

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
				016/LPPD/PI-PR/II/2022
	19. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	tidak Tersedianya data Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota surat keterangan Dinas PU-PR nomor 017/LPPD/PI-PR/II/2022
	20. Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	tidak Tersedianya data Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota surat keterangan Dinas PU-PR nomor 018/LPPD/PI-PR/II/2022
	21. Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	tidak Tersedianya data Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota surat keterangan Dinas PU-PR nomor 019/LPPD/PI-PR/II/2022
	22. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Data tidak da
	23. Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	35 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Data Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya
	24. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan	0 kecelakaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	data kecelakaan konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasan

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	pengawasannya			
C.8.2	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi, dengan rumus sebagai berikut :		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1. Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	tidak ada data jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analis di wilayah kabupaten surat keterangan Dinas PU-PR nomor 002/LPPD/PI-PR/II/2022
	2. Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	74 Tenaga kerja	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Data Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analis yang terlatih di wilayah Kab. Soppeng
	3. Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	tidak ada data jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analis di wilayah kabupaten surat keterangan Dinas PU-PR nomor 003/LPPD/PI-PR/II/2022
	4. Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	2 kegiatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dokumentasi kegiatan pembinaan jasa konstruksi (pelatihan/bintek) yang diselenggarakan oleh pemerintah/lembaga lainnya di Kab. Soppeng Yaitu : ✓ Pembekalan dan Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi ✓ Pelatihan Kerja Tukang Batu
	5. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	tidak Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab surat keterangan nomor 004/LPPD/PI-PR/II/2022
	6. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tidak tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN surat keterangan nomor 005/LPPD/PI-PR/II/2022
	7. Tersedianya data dan informasi potensi	n/a	Dinas Pekerjaan	tidak Tersedianya data dan informasi potensi pasar

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya		Umum dan Penataan Ruang	jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya surat keterangan nomor 006/LPPD/PI-PR/II/2022
	8. Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	tidak Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala surat keterangan nomor 007/LPPD/PI-PR/II/2022
	9. Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	tidak Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten surat keterangan nomor 008/LPPD/PI-PR/II/2022
	10. Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	tidak Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya. surat keterangan nomor 009/LPPD/PI-PR/II/2022
	11. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analis	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	tidak Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analis surat keterangan nomor 010/LPPD/PI-PR/II/2022
	12. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan	tidak Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota		Ruang	operator/teknisi/analisis di wilayah kab surat keterangan nomor 011/LPPD/PI-PR/II/2022
	13. Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	tidak Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten surat keterangan nomor 012/LPPD/PI-PR/II/2022
	14. Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	ADA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Data Laporan Penerbitan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi
	15. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	tidak Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya surat keterangan nomor 013/LPPD/PI-PR/II/2022
	16. Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	tidak Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya surat keterangan nomor 014/LPPD/PI-PR/II/2022
	17. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum pernah dilaksanakan pendataan terkait Badan Usaha yang memiliki IUJKN surat keterangan Dinas PU-PR Nomor 015/LPPD/PU-PR/II/2022
	18. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	tidak Tersedianya data Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota surat keterangan Dinas PU-PR nomor

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
				016/LPPD/PI-PR/II/2022
	19. Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	tidak Tersedianya data Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota surat keterangan Dinas PU-PR nomor 017/LPPD/PI-PR/II/2022
	20. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	tidak Tersedianya data Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota surat keterangan Dinas PU-PR nomor 018/LPPD/PI-PR/II/2022
	21. Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	tidak Tersedianya data Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota surat keterangan Dinas PU-PR nomor 019/LPPD/PI-PR/II/2022
	22. Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	23. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	35 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Data Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya
	24. Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0 kecelakaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	data kecelakaan konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasan
	25. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	35	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Data jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	kewenangan pengawasannya			
C.9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Data Jumlah proyek yang menjadi kewenangan tanpa kecelakaan konstruksi sebanyak 0 kecelakaan dan Data jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya banyak 35 paket

3) Prestasi/penghargaan yang diraih

Tidak ada prestasi/penghargaan yang diraih pada tahun 2021

#### D. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

Pada pelaksanaan urusan pelayanan dasar pada Bidang Perumahan Rakyat pada tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, dapat di lihat sebagai berikut:

1) Program Kegiatan

Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan dasar pada Urusan Perumahan Rakyat, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng menyusun Program Kegiatan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dengan anggaran Rp 2.957.969.311 dan program kegiatan sebagai berikut:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah / Kabupaten / Kota

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah / Kabupaten / Kota, pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

b) Program Pengembangan Perumahan

Pada Program Pengembangan Perumahan, pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

- Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi

c) Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Pada Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan, pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

Penyelesaian sengketa tanah garapan Dalam Kabupaten/Kota

2) Indikator Kinerja Kunci

Penilaian Kinerja Penyelengaraan Pemerintahan Daerah pada Urusan Perumahan Rakyat yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, dapat di lihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.6**  
**IKK Output dan IKK Outcome**  
**Urusan Perumahan Rakyat**

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
D.1	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	106,25%	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2021 sebanyak 34 unit</li> <li>- Data Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2021 sebanyak 32 unit</li> </ul>
	1. Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	32 unit	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Data Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya
	2. Jumlah rumah yang terkena bencana alam	287 unit	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Data Jumlah rumah yang terkena bencana alam
	3. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	287 KK	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Data Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam adalah sebagai berikut: Jumlah RT = n/a Jumlah KK = 287 Jumlah Jiwa = n/a
	4. Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	34 unit	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Data Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi
	5. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Tidak ada rumah korban dibangun kembali di kawasan bencana sesuai rencana aksi, surat pernyataan Dinas PERKIM nomor 045.2/54/PKP/II/2022
	6. Jumlah unit rumah	0	Dinas	Tidak ada rumah korban

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi		Perumahan dan Kawasan Pemukiman	dibangun baru/relokasi sesuai rencana aksi, surat pernyataan Dinas PERKIM nomor 045.2/56/PKP/II/2022
D.2	7. Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Tidak ada Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana, surat pernyataan Dinas PERKIM nomor 045.2/55/PKP/II/2022
	8. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	34 kk	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Data Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi adalah sebagai berikut: Jumlah RT = n/a Jumlah KK = 34 Jumlah Jiwa = n/a
	9. Jumlah, luasan dan lokasi cadangan lahan	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Tidak ada lokasi cadangan lahan diperuntukkan bencana alam surat pernyataan Dinas PERKIM nomor 045.2/57/PKP/II/2022
	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota.	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota surat pernyataan Dinas PERKIM nomor 045.2/58/PKP/II/2022 tidak ada RT terkena relokasi program Pemda yang memenuhi kriteria penerima pelayanan surat pernyataan Dinas PERKIM nomor 045.2/59/PKP/II/2022
	1. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Tidak ada rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM surat pernyataan Dinas PERKIM nomor 045.2/60/PKP/II/2022
	2. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Tidak ada rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM			rencana pemenuhan SPM surat pernyataan Dinas PERKIM nomor 045.2/61/PKP/II/2022
	3. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Tidak ada rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM surat pernyataan Dinas PERKIM nomor 045.2/62/PKP/II/2022
	4. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Tidak ada rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM surat pernyataan Dinas PERKIM nomor 045.2/63/PKP/II/2022
	5. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Tidak ada rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM surat pernyataan Dinas PERKIM nomor 045.2/64/PKP/II/2022
	6. Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Tidak ada pengadaan tanah untuk relokasi rumah tangga yang terkena bencana alam surat pernyataan Dinas PERKIM nomor 045.2/65/PKP/II/2021
D.3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/kota yang ditangani.	n/a	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Tidak ada kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani surat pernyataan Dinas PERKIM nomor 045.2/66/PKP/II/2022
	1. Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	16,53 ha	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	SK Bupati nomor 664/X/2019
	2. Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	n/a	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Tidak ada unit peningkatan kualitas RTLH surat pernyataan Dinas PERKIM nomor 045.2/67/PKP/II/2022
	3. Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan	n/a	Dinas Perumahan dan Kawasan	Tidak ada luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	kumuh		Pemukiman	surat pernyataan Dinas PERKIM nomor 045.2/68/PKP/II/2022
D.4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni).	11,79%	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data Jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) sebanyak 6710 unit</li> <li>- Data Jumlah total unit rumah di Kab. Soppeng sebanyak 56899 unit</li> </ul>
	1. Jumlah rumah di kab/kota	56899 unit	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Data Jumlah rumah di Kab. Soppeng
	2. Jumlah unit PK RTLH	735 unit	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Data Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH
	3. Jumlah rumah tidak layak huni	6710 unit	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Data Jumlah rumah tidak layak huni
	4. Jumlah rumah yang tidak dihuni	n/a	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Tidak ada data rumah yang tidak dihuni surat pernyataan Dinas PERKIM nomor 045.2/69/PKP/II/2022
	5. Rasio rumah dan KK	1:1,14	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data Jumlah KK di Wilayah Kab. Soppeng bersumber dari DUKCAPIL sebanyak 79714 KK</li> <li>- Data Jumlah total unit rumah di Kab. Soppeng sebanyak 56899 unit</li> </ul>
	6. Jumlah rumah pembangunan baru	244 unit	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Data Jumlah rumah pembangunan baru
D.5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum).	0,43%	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU sebanyak 244 unit</li> <li>- Data Jumlah total unit rumah di Kab. Soppeng sebanyak 56899 unit</li> </ul>
	1. Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	46 perumah an	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Data Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU
	2. Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	244 unit	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Data Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum
	3. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan	244 unit	Dinas Perumahan	Data Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	lingkungan		dan Kawasan Pemukiman	lingkungan
	4. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	244 unit	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Data Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)
	5. Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	244 unit	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Data Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH
	6. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	244 unit	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Data Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU
	7. Jumlah pengembang yang tersertifikasi	n/a	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Tidak ada data pengembang yang tersertifikasi surat pernyataan Dinas PERKIM nomor 045.2/70/PKP/II/2022
	8. Jumlah pengembang yang terregistrasi	n/a	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Tidak ada data pengembang yang terregistrasi surat pernyataan Dinas PERKIM nomor 045.2/71/PKP/II/2022
	9. Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	n/a	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Tidak ada data pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan surat pernyataan Dinas PERKIM nomor 045.2/72/PKP/II/2022

## E. URUSAN KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pada pelaksanaan urusan pelayanan dasar pada Bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat pada tahun 2021 yang dilaksanakan oleh 2 (dua) Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu:

### Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

#### 1) Program Kegiatan

Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan dasar pada Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng menyusun Program Kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan anggaran Rp 13.714.856.046 dan program kegiatan sebagai berikut:

##### a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, dengan kegiatan sebagai berikut:

- Kegiatan Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Kegiatan Adminsitrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Kegiatan administrasi umum perangkat daerah
- Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
- Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
- Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

b) Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pelaksanaan Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan kegiatan sebagai berikut:

- Kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan keteriban umum dalam [satu] daerah kabupaten/kota
- Kegiatan Penegakan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/wali kota
- Kegiatan Pembinaan penyidik pegawai negeri sipil [ppns] kabupaten/kota

c) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Pelaksanaan Program Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, dengan kegiatan sebagai berikut:

- Kegiatan Pencegahan,Pengendalian,Pemadam,Penyelamatan,dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

2) Indikator Kinerja Kunci

Penilaian kinerja penyelengaraan pemerintahan daerah pada Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, dapat di lihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.6**  
**IKK Output dan IKK Outcome**  
**Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat**  
**Oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran**

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
E.1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan, dengan rumus sebagai berikut :	100%	Sat.Pol.PP & Damkar	Target pada Tahun 2021 pelayanan gangguan Trantibum yang diselesaikan terlaksana sesuai target dari RPJMD. Selama tahun 2021

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
				sebanyak 92 Pengaduan yang dilaporkan dan ditangani oleh petugas Sat.Pol.PP
	1. Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	92 pengaduan	Sat.Pol.PP & Damkar	Pada tahun 2020 tingkat pengaduan dan pelanggaran sebanyak 107 pengaduan, menurun di tahun 2021 sebanyak 92 pengaduan disbanding dengan tahun 2020 turun 16,30%
	2. Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	1566 orang	Sat.Pol.PP & Damkar	Pembinaan Satlinmas yang dilaksanakan oleh Sat.Pol.PP dan Damkar sebanyak 1566 orang berdasarkan SK Bupati Nomor: 01/I/2019
	3. Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	5 Perda/Perkada	Sat.Pol.PP & Damkar	Pada tahun 2021 penegakan perda/perkada yang dilaksanakan sebanyak 5 perda/perkada yang ditegakkan, atau naik dari tahun 2020 jumlah penegakan Perda/Perkada sebanyak 4 perda/perkada yang ditegakkan
	4. Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	2 Petugas	Sat.Pol.PP & Damkar	Jumlah petugas Sat.Pol.PP yang dibina menjadi PPNS sebanyak 2 orang dari jumlah keseluruhan petugas Sat.Pol.PP sebanyak 2 petugas
	5. Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	8 SOP	Sat.Pol.PP & Damkar	Jumlah SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan Trantibum berkurang dibanding tahun Sebelumnya menjadi 8 SOP
	6. Tersedianya sarana prasarana minimal	10 Unit	Sat.Pol.PP & Damkar	Tersedianya sarana prasarana minimal pada Sat.Pol.PP dalam pelaksanaan pelayanan minimal pada masyarakat, dengan rincian sarana prasarana sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Gedung Kantor</li> <li>✓ Alat Dalmas</li> <li>✓ Handy Talky</li> <li>✓ Senter Kepala</li> <li>✓ Kamera Digital</li> <li>✓ Kendaraan operasional roda 2</li> <li>✓ Kendaraan operasional roda 4</li> <li>✓ Kendaraan operasional roda 6</li> <li>✓ PC unit</li> <li>✓ Printer</li> </ul>

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
E.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	55,56%	Sat.Pol.PP & Damkar	Pada tahun 2020 persentase penegakan Peraturan Perundang-Undangan Perda/Perkada adalah 44,44% yaitu 4 Perda yang selalu dilanggar oleh masyarakat. Dari 9 Perda/Perkada yang memuat sanksi. Namun pada Tahun 2021 persentase penegakan Perda/Perkada meningkat menjadi 55,56% atau naik 1,12% dalam hal ini 5 Perda yang dilanggar oleh masyarakat dari 9 Perda/Perkada yang memuat sanksi. Untuk itu perlunya peningkatan sosialisasi peraturan Perundang-Undangan Perda/Perkada untuk diketahui oleh masyarakat.
E.5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.	n.a	Sat.Pol.PP & Damkar	Pada tahun 2021 tidak terjadi bencana kebakaran yang luar biasa, sehingga tidak terdapat data penanggulangan bencana dengan surat pernyataan dari Sat.Pol.PP dan Damkar Nomor 58/POL.PP&PMK/I/2022
	1. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB.	n.a	Sat.Pol.PP & Damkar	Pada tahun 2021 tidak terjadi bencana kebakaran yang luar biasa, sehingga tidak terdapat data penanggulangan bencana
	2. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana.	n.a	Sat.Pol.PP & Damkar	Pada tahun 2021 tidak terjadi bencana kebakaran yang luar biasa, sehingga tidak terdapat data penanggulangan bencana
	3. Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana.	n.a	Sat.Pol.PP & Damkar	Pada tahun 2021 tidak terjadi bencana kebakaran yang luar biasa, sehingga tidak terdapat data penanggulangan bencana
	4. Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana.	n.a	Sat.Pol.PP & Damkar	Pada tahun 2021 tidak terjadi bencana kebakaran yang luar biasa, sehingga tidak terdapat data penanggulangan bencana
E.6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.	100 %	Sat.Pol.PP & Damkar	Pelaksanaan pelayanan penyeleman dan evakuasi korban kebakaran pada tahun 2021 melebihi target sebesar 100% dibandingkan pada target RPJMD yang telah

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
				ditetapkan sebesar 90%. Hal ini perlu dipertahankan dalam pelaksanaan pelayanan minimal di masyarakat.
	1. Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	2 SOP	Sat.Pol.PP & Damkar	Jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah 2 SOP yaitu - SOP Animal Rescue; dan - SOP Penyusunan Laporan Kejadian Dalam pelaksanaan penyelamatan non kebakaran yang dilaksanakan oleh bidang kebakaran telah melaksanakan pengaduan/laporan dari masyarakat sebanyak 43 kejadian non kebakaran
	2. Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan.	ADA 8 Posko 82 unit	Sat.Pol.PP & Damkar	dalam pelaksanaan percepatan pelayanan minimal dimasyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng telah membuat 8 Posko/UPTD penanganan kebakaran di Kabupaten Soppeng. Posko/UPTD Pemadam Kebakaran tersebar di 8 Kecamatan yang siap melayani masyarakat dalam penanggulangan bencana kebakaran di Wilayah Kecamatan yang ada di Kabupaten Soppeng
	3. Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan.	ADA	Sat.Pol.PP & Damkar	Untuk mendukung pelayanan pemerintah dalam penanggulangan bencana kebakaran pada masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng menempatkan petugas kebakaran di 8 Posko/UPTD Kebakaran dengan susunan petugas yang siap dalam 24 jam yang bergiliran sesuai dengan jadwal tugas yang telah ditetapkan.
	4. Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana	ADA 10 UNIT	Sat.Pol.PP & Damkar	Dalam mendukung peningkatan pelayanan pemerintah dalam penanggulangan bencana kebakaran, pemerintah

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa.			<p>Desa/Kelurahan menyiapkan sarana/prasarana damkar yang siap membantu petugas kebakaran dari Posko/UPTD Kebakaran dalam mengantisipasi awal penanganan bencana kebakaran yang ada di desa/kelurahan. Sarana prasarana pemadam kebakaran yang siap membantu dalam penanggulangan kebakaran di wilayah desa/kelurahan tersebar di beberapa desa yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Desa Citta.</li> <li>2) Desa Pesse.</li> <li>3) Desa Kessing.</li> <li>4) Desa Sering.</li> <li>5) Desa Barang.</li> <li>6) Desa Tellulimpoe.</li> <li>7) Desa Patampanua.</li> <li>8) Desa Leworeng.</li> <li>9) Desa Panincong.</li> <li>10) Desa Bulue.</li> </ul>
	5. Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi.	5 Jenis	Sat.Pol.PP & Damkar	Dalam mendukung pelayanan masyarakat bidang kebakaran, Pemerintah Daerah menyiapkan sarana prasana pemadam, penyelamatan dan evakuasi pada setiap Posko/UPTD Kebakaran sebanyak 10 Unit. Namun setiap posko tidak merata sarana prasarana yang disiapkan, akibat keterbatasan anggaran
	6. Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	1 Orang	Sat.Pol.PP & Damkar	Perlunya peningkatan aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi pemadam yang hanya 1 orang petugas saja. Untuk itu perlunya penambahan anggaran dalam peningkatan kualitas aparatur pemadam kebakaran di wilayah Kabupaten Soppeng.
	7. Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat	a/n	Sat.Pol.PP & Damkar	Belum adanya relawan yang dibentuk dalam mempermudah pelayanan minimal di masyarakat, sehingga sering tidak tercapaiannya response time

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran.			penanganan kebakaran di wilayah Kabupaten Soppeng, terutama di wilayah pegunungan, terpencil dan wilayah padat penduduk.
	8. Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	4 Kali	Sat.Pol.PP & Damkar	Dalam peningkatan kecepatan response time dan kedisiplinan petugas pemadam kebakaran Kabupaten Soppeng, Pemerintah Dearah Kabupaten Soppeng melaksanakan bina kesamaptaan oleh Sat.pol.PP dan Pemadam Kebakaran sebanyak 4 kali dalam satu tahun.
E.7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	8,84 menit	Sat.Pol.PP & Damkar	Data Laporan Kejadian Kebakaran per Tahun 2021

3) Prestasi/penghargaan yang diraih

Tidak ada prestasi atau penghargaan yang diraih oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran pada tahun 2021

#### Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1) Program Kegiatan

Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan dasar pada Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kabupaten Soppeng menyusun Program Kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan anggaran Rp4.554.035.747,- dan program kegiatan sebagai berikut:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, pelaksanaan kegiatan terdiri dari:

- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

b) Program Penanggulangan Bencana

Pada Program Penanggulangan Bencana, pelaksanaan kegiatan terdiri dari:

- Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
  - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
  - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
- 2) Indikator Kinerja Kunci
- Penilaian kinerja penyelengaraan pemerintahan daerah pada Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dapat di lihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.7**  
**IKK Output dan IKK Outcome**  
**Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat**  
**Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
E.4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	25667 jiwa	BPBD	data jumlah penduduk di kawasan rawan bencana
	1. Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal.	1 dokumen	BPBD	Dokumentasi Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana sebanyak 1 dokumen yang dilaksanakan
	2. Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100%	BPBD	data jumlah penduduk di kawasan rawan bencana sebanyak 25667 jiwa
	3. Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal.	n/a	BPBD	Belum menyusun Dokumen Renkon masih bentuk dokumen studi mitigasi bencana alam dan bencana geologi akibat anggaran terbatas surat pernyataan BPBD Nomor 050/20-6/BPBD/II/2022
	4. Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan.	n/a	BPBD	Tidak melaksanakan pelatihan akibat keterbatasan anggaran surat pernyataan nomor 050/20.B/BPBD/2022
	5. Persentase warga negara yang ikut pelatihan.	n/a	BPBD	Tidak melaksanakan pelatihan akibat keterbatasan anggaran surat pernyataan nomor 050/20.B/BPBD/2022

	6. Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana.	n/a	BPBD	Pusdalop belum dibentuk surat pernyataan nomor 050/20-9/BPBD/2022
	7. Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan.	n/a	BPBD	surat pernyataan nomor 050/20-10/BPBD/2022
E.5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.	n/a	BPBD	Tidak terdapat data
	1. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB.	n/a	BPBD	- Surat Pernyataan Sat.Pol.PP & PMK Nomor 57/POL.PP&PMK/I/2022 - surat pernyataan BPBD nomor 050/20.A/BPBD/II/2022
	2. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana.	n/a	BPBD	- Surat Pernyataan Sat.Pol.PP & PMK Nomor 57/POL.PP&PMK/I/2022 - surat pernyataan BPBD nomor 050/20.A/BPBD/II/2022
	3. Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana.	57 orang	BPBD	Surat Keputusan Bupati Soppeng nomor 74/I/2021 tentang Pembentukan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana
	4. Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana.	n/a	BPBD	surat pernyataan BPBD nomor 050/20.A/BPBD/II/2022

3) Prestasi/penghargaan yang diraih

Tidak ada prestasi atau penghargaan yang diraih oleh Badan Penaggulangan Bencana Daerah pada tahun 2021

## F. URUSAN SOSIAL

Pada pelaksanaan Urusan Pelayanan Dasar pada Bidang Sosial pada tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dapat di lihat sebagai berikut:

## 1) Program Kegiatan

Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan dasar pada Urusan Sosial, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng menyusun Program Kegiatan pada Dinas Sosial dengan anggaran Rp9.799.410.887 dan program kegiatan sebagai berikut:

### a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

### b) Program Pemberdayaan Sosial

Pada Program Pemberdayaan Sosial, pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

- Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

### c) Program Rehabilitasi Sosial

Pada Program Rehabilitasi Sosial, pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

- Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, Serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial

### d) Program Penanganan Bencana

Pada Program Penanganan Bencana, pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

- Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

### e) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Pada Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan, pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

- Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

### f) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Pada Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

- Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

## 2) Indikator Kinerja Kunci

Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Urusan Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, dapat di lihat pada tabel berikut:pada tabel berikut:

**Tabel 2.8**  
**IKK Output dan IKK Outcome**  
**Urusan Sosial**

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
F.1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemisyang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM).	49,70%	Dinas Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data Populasi Sosial yang tertangani Kabupaten Soppeng Tahun 2021 sebanyak 250 jiwa</li> <li>- Data Populasi Sosial yang tertangani pada Tabel Tertangani Diluar Panti sebanyak 503 jiwa</li> </ul>
	1. Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	2 layanan	Dinas Sosial	<p>Dalam melaksanakan pelayanan pengaduan bagimasyarakat yang berdampak pada sosial, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng menyiapkan layanan pengaduan, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ BPJS</li> <li>✓ BPNT</li> </ul>
	2. Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjur usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM		Dinas Sosial	<p>data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjur usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM, sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Penyandang Disabilitas sebanyak 1 jiwa</li> <li>✓ Anak Terlantar sebanyak 32 jiwa</li> </ul>
	3. Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	3 TRC	Dinas Sosial	<p>Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk dalam penanggulangan sosial, oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tagana</li> <li>✓ TRC</li> <li>✓ PSC</li> </ul> <p>Tim Reasi Cepat ini melaksanakan penaganan saat mitigasi bencana bila diperlukan</p>

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	4. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau,	494 jiwa	Dinas Sosial	<p>Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau dalam pelayanan adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Penyandang Disabilitas sebanyak 153 jiwa</li> <li>✓ Anak Terlantar sebanyak 234 jiwa</li> <li>✓ Lanjut Usia Terlantar sebanyak 107 jiwa</li> </ul>
	5. Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	4 unit	Dinas Sosial	Dokumentasi Kendaraan Roda 4 yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki Dinas Sosial Kab. Soppeng
	6. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi,	285 jiwa	Dinas Sosial	<p>Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Penyandang Disabilitas sebanyak 82 jiwa</li> <li>✓ Anak Terlantar sebanyak 203 jiwa</li> </ul>
	7. Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	n/a	Dinas Sosial	Belum ada Rumah singgah Di Kabupaten soppeng untuk PMKS, Surat Pernyataan Dinas Sosial No. 804/96/Dinsos/II/2022
	8. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	n/a	Dinas Sosial	Tidak terdapat data
	9. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	26 jiwa	Dinas Sosial	<p>Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Penyandang Disabilitas sebanyak 26 jiwa</li> </ul>
	10. Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	n/a	Dinas Sosial	Belum ada Rumah singgah Di Kabupaten soppeng untuk PMKS, Surat Pernyataan Dinas Sosial No. 804/96/Dinsos/II/2022

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	11. Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia		Dinas Sosial	
	12. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	n/a	Dinas Sosial	
	13. Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah	n/a	Dinas Sosial	Belum ada Rumah singgah Di Kabupaten soppeng untuk PMKS, Surat Pernyataan Dinas Sosial No. 804/96/Dinsos/II/2022
	14. Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	46 relawan	Dinas Sosial	Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan, terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pendamping disabilitas = 1 orang</li> <li>✓ Pendamping Anak = 1 orang</li> <li>✓ Pendamping Fakir Miskin = 1 orang</li> <li>✓ Pendamping Keluarga Harapan = 35 orang</li> <li>✓ TKSK = 8 orang</li> </ul>
	15. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	153 jiwa	Dinas Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Penyandang Disabilitas sebanyak 26 jiwa</li> <li>✓ Anak Terlantar sebanyak 20 jiwa</li> <li>✓ Lanjut Usia Terlantar sebanyak 107 jiwa</li> </ul>
	16. Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	n/a	Dinas Sosial	Tidak terdapat data
	17. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan	1 jiwa	Dinas Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan			yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan adalah sebagai berikut: ✓ Lanjut Usia Terlantar sebanyak 1 jiwa an. HIDAYA
	18. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	n/a	Dinas Sosial	Tidak terdapat data
	19. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	n/a	Dinas Sosial	Tidak terdaat data
	20. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	n/a	Dinas Sosial	Tidak terdaat data
	21. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	26	Dinas Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk adalah sebagai berikut: ✓ Anak Terlantar sebanyak 22 jiwa ✓ Lanjut Usia Terlantar sebanyak 4 jiwa
F.2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota.	100%	Dinas Sosial	Nama Penerima Bantuan Bencana Tahun 2021 sebanyak 192 jiwa
	1. Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	192	Dinas Sosial	- Daftar Nama Penerima Bantuan Bencana Alam Tahun 2021 sebanyak 162 jiwa - Daftar Nama Penerima Bantuan Bencana Sosial Tahun 2021 sebanyak 30 jiwa
	2. Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	n/a	Dinas Sosial	Tidak terdapat data

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	3. Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	n/a	Dinas Sosial	Surat pernyataan 804/252/Dinsos/II/2022
	4. Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	n/a	Dinas Sosial	Surat pernyataan 804/227/Dinsos/II/2022
	5. Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	n/a	Dinas Sosial	Tidak terdapat data
	6. Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	63 relawan	Dinas Sosial	Jumlah Pekerja Sosial Profesional/Tenaga Kesejahteraan Sosial Dan/Atau Relawan Sosial Yang Tersedia, Adalah Sebagai Berikut: ✓ TKSK = 8 relawan ✓ PKH = 35 relawan ✓ Pendamping Anak = 1 relawan ✓ Pendamping Disabilitas = 1 relawan ✓ Pendamping Bpnt = 1 relawan ✓ TAGANA = 17 relawan

3) Prestasi/penghargaan yang diraih

Tidak ada prestasi atau penghargaan yang diraih oleh Dinas Sosial pada tahun 2021

## 2. URUSAN WAJIB TIDAK TERKAIT DENGAN PELAYANAN DASAR

### A. URUSAN TENAGA KERJA

Pada pelaksanaan urusan pelayanan wajib tidak terkait dengan pelayanan dasar Pada Bidang Ketenaga Kerjaan pada tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasil dapat di lihat sebagai berikut:

#### 1) Program Kegiatan

Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan bukan dasar pada Urusan Tenaga Kerja, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng menyusun Program Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, jumlah anggaran Rp 266,719,850 dengan program kegiatan uraian sebagai berikut:

##### a) Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Kerja

Pada Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Kerja menghasilkan

- Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi

##### b) Program perencanaan tenaga kerja

Pada Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Kerja menghasilkan

- Penyusunan rencana tenaga kerja (RTK)

2) Indikator Kinerja Kunci

Penilaian Kinerja Penyelengaraan Pemerintahan Daerah pada Urusan Tenaga Kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Operasional Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dapat di lihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.9**  
**IKK Output dan IKK Outcome**  
**Urusan Tenaga Kerja**

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
A.1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja.	61,32%	Dinas PMPTSP-NAKERTRANS	Data penempatan pencari kerja tahun 2021 sebanyak 447 pencaker Data pencaker yang terdaftar sebanyak 729 pencaker
	1. Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota	n/a	Dinas PMPTSP-NAKERTRANS	Surat Pernyataan Nomor 50/MPTSP-NAKERTRANS/II/2022
	2. Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja.	n/a	Dinas PMPTSP-NAKERTRANS	Surat Pernyataan Nomor 51/DPMPTSP-NAKERTRANS/II/2022
	3. Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota	n/a	Dinas PMPTSP-NAKERTRANS	Surat Pernyataan Nomor 74/DPMPTSP-NAKERTRANS/II/2022
A.2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi.	0,47	Dinas PMPTSP-NAKERTRANS	Sertifikat "on The Job Training Competency of Barista" sebanyak 5 orang Data tenaga kerja di kabupaten sebanyak 1069
	1. Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster.	100%	Dinas PMPTSP-NAKERTRANS	Dokumentasi Pelatihan Barista Tahun 2021
	2. Persentase instruktur bersertifikat kompetensi.	50%	Dinas PMPTSP-NAKERTRANS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sertifikat Kompetensi No 56303512300004082017</li> <li>- Surat Keputusan Bupati Nomor : 565/XII/2021 tentang pemberhentian pejabat administrasi dan pengangkatan dalam jabatan fungsional melalui penyetaraan jabatan lingkup pemerintah kabupaten soppeng</li> <li>- Surat Keputusan Bupati Nomor : 565/XII/2021 tentang pemberhentian pejabat administrasi dan pengangkatan dalam jabatan fungsional melalui penyetaraan jabatan lingkup</li> </ul>

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
				pemerintah kabupaten soppeng
	3. Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan.	40%	Dinas PMPTSP-NAKERTRANS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sertifikat Kompetensi No 56303512300004082017</li> <li>- Daftar Pelatihan dan Magang Kompetensi Barista</li> </ul>
	4. Persentase LPK yang terakreditasi.	28,57%	Dinas PMPTSP-NAKERTRANS	<p>Yang mempunyai sertifikat hanya 2 LPK dari 7 LPK yang terdaftar yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sertifikat Akreditasi LPK no 79/L.A-LPK/XII/2020</li> <li>- Sertifikat Akreditasi no 110/L.A-LPK/XII/2020</li> </ul>
	5. Persentase LPK yang memiliki perizinan.	100%	Dinas PMPTSP-NAKERTRANS	<p>Ada 7 LPK yang terdaftar yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPK Aqilah Tekno Edukasi Nomor 12/DPMPTSP_NAKER TRANS/II/2020</li> <li>2. LPK Lembaga Pelatihan Kerja STEKOM Nomor 28/NAKERTRANS/IX/2 017</li> <li>3. LPK BLK Komunitas Pondok Pesantren Perguruan Ganra Nomor 14/PTSP-NAKERTRANS/II/2020</li> <li>4. LPK Wiliana, Calio Kel.Ujung Kec.Lilirilau Kab. Soppeng Nomor 2/LPK/PMPTSP-NAKERTRANS/V/2021</li> <li>5. LPK Workshop Las BLK Komunitas Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama Sering Kab. Soppeng Nomor 13/DPMPTSP-NAKERTRANS/II/2020</li> <li>6. LPK Komunitas Pondok Pesantren Darussalam Beru Kab. Soppeng Nomor 1/LPK/DPMPTSP-NAKERTRANS/V/2021</li> <li>7. LPK YP.AN-NAILAH Nomor 27/NAKERTRANS/IX/2 017</li> </ol>
	6. Jumlah penganggur yang dilatih	5 orang	Dinas PMPTSP-NAKERTRANS	Daftar Pelatihan dan Magang Kompetensi Barista
	7. Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	100%	Dinas PMPTSP-NAKERTRANS	Pelatihan dan Magang Kompetensi Barista

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
				sebanyak 5 orang
	8. Persentase penyerapan lulusan	100%	Dinas PMPTSP-NAKERTRANS	Pelatihan dan Magang Kompetensi Barista sebanyak 5 orang
	9. Lulusan bersertifikat kompetensi	0	Dinas PMPTSP-NAKERTRANS	Surat Pernyataan Nomor 52/DPMPTSP-NAKERTRANS/II/2002
	10. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan.	n/a	Dinas PMPTSP-NAKERTRANS	Surat Pernyataan Nomor 53/DPMPTSP-NAKERTRANS/II/2002
	11. Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI).	n/a	Dinas PMPTSP-NAKERTRANS	Surat Pernyataan Nomor 54/DPMPTSP-NAKERTRANS/II/2002
A.3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	579642	Dinas PMPTSP-NAKERTRANS	Tingkat Produktivitas tenaga kerja pendapatan per tenaga kerja yaitu PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)
	1. Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas.	n/a	Dinas PMPTSP-NAKERTRANS	Surat Pernyataan Nomor 55/DPMPTSP-NAKERTRANS/II/2002
	2. Data tingkat produktivitas total.	n/a	Dinas PMPTSP-NAKERTRANS	Surat Pernyataan Nomor 66/DPMPTSP-NAKERTRANS/II/2002
A.4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	3,98%	Dinas PMPTSP-NAKERTRANS	Data jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak sebanyak 20 perusahaan Dari jumlah perusahaan yang terdata sebanyak 502 perusahaan
	1. Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	n/a	Dinas PMPTSP-NAKERTRANS	Surat Pernyataan Nomor 56/DPMPTSP-NAKERTRANS/II/2002
	2. Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	100%	Dinas PMPTSP-NAKERTRANS	Data jumlah perusahaan yang memiliki perjanjian kerja bersama (PKB) sebanyak 8 perusahaan dari jumlah perusahaan memiliki SP/SB sebanyak 8 perusahaan
	3. Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang	n/a	Dinas PMPTSP-NAKERTRANS	Surat Pernyataan Nomor 57/DPMPTSP-NAKERTRANS/II/2002

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan			
	4. Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah.	100%	Dinas PMPTSP-NAKERTRANS	Data jumlah perusahaan yang sudah menyusun struktur dan skala upah sebanyak 7 perusahaan dari jumlah perusahaan yang telah mengatur syarat kerja (yang diatur dalam PP atau PKB) sebanyak 7 perusahaan
	5. Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	23,90%	Dinas PMPTSP-NAKERTRANS	data jumlah perusahaan yang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 120 perusahaan dari Jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan wajib lapor sebanyak 502 perusahaan
	6. Persentase jumlah perusahaan yang berselisih.	0,20%	Dinas PMPTSP-NAKERTRANS	Terbitnya 1 buah Surat Perjanjian Bersama
	7. Jumlah mogok kerja	n/a	Dinas PMPTSP-NAKERTRANS	Surat Pernyataan Nomor 58/DPMPTSP-NAKERTRANS/II/2002
	8. Jumlah penutupan perusahaan	n/a	Dinas PMPTSP-NAKERTRANS	Surat Pernyataan Nomor 59/DPMPTSP-NAKERTRANS/II/2002
	9. Jumlah perselisihan kepentingan	n/a	Dinas PMPTSP-NAKERTRANS	Surat Pernyataan Nomor 60/DPMPTSP-NAKERTRANS/II/2002
	10. Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	n/a	Dinas PMPTSP-NAKERTRANS	Surat Pernyataan Nomor 61/DPMPTSP-NAKERTRANS/II/2002
	11. Jumlah perselisihan PHK	n/a	Dinas PMPTSP-NAKERTRANS	Surat Pernyataan Nomor 62/DPMPTSP-NAKERTRANS/II/2002
	12. Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	33 pekerja	Dinas PMPTSP-NAKERTRANS	Data jumlah pekerja ter-PHK melalui aplikasi SISNAKER tahun 2021
	13. Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	1	Dinas PMPTSP-NAKERTRANS	Terbitnya 1 buah Surat Perjanjian Bersama
	14. Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	n/a	Dinas PMPTSP-NAKERTRANS	Surat Pernyataan Nomor 63/DPMPTSP-NAKERTRANS/II/2002
	15. Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui	100%	Dinas PMPTSP-NAKERTRANS	Data Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perjanjian Bersama sebanyak 1 perjanjian

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial			
A.5	Percentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota.	61,32%	Dinas PMPTSP-NAKERTRANS	Data jumlah pencari kerja yang ditempatkan tahun 2021 sebanyak 447 pencaker dari Jumlah pencaker yang terdaftar sebanyak 729 pencaker
1.	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	n/a	Dinas PMPTSP-NAKERTRANS	Surat Pernyataan Nomor 64/DPMPTSP-NAKERTRANS/II/2002
2.	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	729 pencaker	Dinas PMPTSP-NAKERTRANS	Data pencari kerja tahun 2021
3.	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	1 BKK	Dinas PMPTSP-NAKERTRANS	Data jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK)
4.	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	n/a	Dinas PMPTSP-NAKERTRANS	Surat Pernyataan Nomor 65/DPMPTSP-NAKERTRANS/II/2002
5.	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	1 asn	Dinas PMPTSP-NAKERTRANS	Surat Keputusan Bupati Nomor : 565/XII/2021 tentang pemberhentian pejabat administrasi dan pengangkatan dalam jabatan fungsional melalui penyetaraan jabatan lingkup pemerintah kabupaten soppeng
6.	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	n/a	Dinas PMPTSP-NAKERTRANS	Surat Pernyataan Nomor 67/DPMPTSP-NAKERTRANS/II/2002
7.	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota.	n/a	Dinas PMPTSP-NAKERTRANS	Surat Pernyataan Nomor 68/DPMPTSP-NAKERTRANS/II/2002
8.	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	n/a	Dinas PMPTSP-NAKERTRANS	Surat Pernyataan Nomor 69/DPMPTSP-NAKERTRANS/II/2002
9.	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)yang mendapatkan sosialisasi	n/a	Dinas PMPTSP-NAKERTRANS	Surat Pernyataan Nomor 70/DPMPTSP-NAKERTRANS/II/2002
10.	Jumlah Calon Pekerja	9	Dinas PMPTSP-NAKERTRANS	data Jumlah CPMI tahun

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	CPMI		2021
	11. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	100%	Dinas PMPTSP-NAKERTRANS	Data jumlah Pekerja Migran indonesia yang mendapatkan fasilitas kepulangan sebanyak 4 PMI
	12. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja.	n/a	Dinas PMPTSP-NAKERTRANS	Surat Pernyataan Nomor 71/DPMPTSP-NAKERTRANS/II/2002
	13. Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	n/a	Dinas PMPTSP-NAKERTRANS	Surat Pernyataan Nomor 72/DPMPTSP-NAKERTRANS/II/2002
	14. Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk.	n/a	Dinas PMPTSP-NAKERTRANS	Surat Pernyataan Nomor 73/DPMPTSP-NAKERTRANS/II/2002

3) Prestasi/penghargaan yang diraih

Tidak ada prestasi atau penghargaan yang diraih oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada urusan ketenagakerjaan pada tahun 2021

## B. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Pada pelaksanaan urusan pelayanan wajib tidak terkait dengan pelayanan dasar pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat di lihat sebagai berikut:

1) Program Kegiatan

Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan bukan dasar pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng menyusun Program Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan anggaran Rp 5.889.661.637 dan program kegiatan sebagai berikut:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan sebagai berikut:

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

b) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Pada Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, dengan kegiatan sebagai berikut:

- Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
- Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota

c) Program Perlindungan Perempuan

Pada Program Perlindungan Perempuan, dengan kegiatan sebagai berikut:

- Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

d) Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Pada Program Peningkatan Kualitas Keluarga, dengan kegiatan sebagai berikut:

- Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan kesertaan gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

e) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Pada Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak, dengan kegiatan sebagai berikut:

- Pengumpulan Pengolahan Analis dan penyajian Data Gender dan Anak dalam kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

f) Program Perlindungan Khusus Anak

Pada Program Perlindungan Khusus Anak, dengan kegiatan sebagai berikut:

- Pencegahan Kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah Kabupaten/Kota

- Penyediaan Layanan bagi anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

2) Indikator Kinerja Kunci

Penilaian Kinerja Penyelengaraan Pemerintahan Daerah pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dapat di lihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.10**  
**IKK Output dan IKK Outcome**  
**Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
G.1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	1,5%	Dinas P3APPKB	Tingkat dukungan penganggaran ARG oleh pemerintah daerah hanya mencapai 1,5% dibandingkan dari rencana target RPJMD awal sebanyak 2,5%. Begitupun pula perbandingan penganggaran 2020 mengalami penurunan pada tahun 2021
	1. Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	34 SKPD	Dinas P3APPKB	Data Jumlah Lembaga tingkat daerah kabupaten yang terlatih PUG
	2. Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	57 kegiatan	Dinas P3APPKB	Data Jumlah kegiatan PUG pada perangkat daerah
G.2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten.	0,03%	Dinas P3APPKB	Tingkat kekerasan terhadap anak kurang dari usia 18 tahun di Kabupaten Soppeng menurun 0,01%, akibat peran serta masyarakat, media massa yang bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menaggulangi kekerasan anak di masyarakat.
	1. Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap	5 Media Massa	Dinas P3APPKB	media massa yang mengadakan kerjasama dengan PEMDA Tahun 2021

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	anak			
	2. Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	45 lembaga	Dinas P3APPKB	pada tahun 2021 jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki SPM sebanyak 45 lembaga, meningkat dari tahun 2020 hanya 8 lembaga
	3. Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100%	Dinas P3APPKB	Data Jumlah Korban Kekerasan anak Tahun 2021 sebanyak 15 orang dan tertangani dengan baik
	4. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	3 lembaga	Dinas P3APPKB	Data Jumlah Lembaga Layanan Anak yang mendapatkan pelatihan
	5. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	n.a	Dinas P3APPKB	Surat Pernyataan Dinas P3APPKB
G.3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	8,12%	Dinas P3APPKB	0,0002% tahun 2020
	1. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	18 ormas	Dinas P3APPKB	Data Ormas perempuan yang sudah mendapatkan pelatihan
	2. Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	n.a	Dinas P3APPKB	Surat Pernyataan Dinas P3APPKB
	3. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	n.a	Dinas P3APPKB	Surat Pernyataan Dinas P3APPKB
	4. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	n.a	Dinas P3APPKB	Surat Pernyataan Dinas P3APPKB
	5. Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	1 program	Dinas P3APPKB	Kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan tahun 2021
	6. Jumlah lembaga penyediaan layanan	7 lembaga	Dinas P3APPKB	Data Jumlah Lembaga penyedia layanan

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	perlindungan hak perempuan yang telah terstandardisasi			perlindungan perempuan tahun 2021
	7. Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100%	Dinas P3APPKB	Data Jumlah Korban kekerasan perempuan yang terlayani tahun 2021 sebanyak 10 orang

3) Prestasi/penghargaan yang diraih

Adapun penghargaan yang dapat diperoleh oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada tahun 2021 yaitu :

- a) Penghargaan Pemerintah Pusat.

Tahun 2021 Penghargaan tingkat nasional tidak ada.

- b) Penghargaan Pemerintah Provinsi.

Penghargaan yang diperoleh pada tahun 2021 yaitu

- Penghargaan Pendataan Keluarga 2021 (PK21) dari Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan

- c) Penghargaan Lembaga Internasional.

Penghargaan yang didapat dari lembaga internasional tidak ada

- d) Penghargaan Lembaga Nasional.

Penghargaan yang diperoleh pada tahun 2021 yaitu;

- Penhargaan Kabupaten/Kota Layak Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak republic Indonesia
- Penghargaan Penerima anugerah Parahita Ekapraya Tahun 2021 Kategori Madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak republic Indonesia
- Partisipasi Dalam Penanggulangan Pekerja Anak di Indonesia Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak republic Indonesia.

### C. URUSAN PANGAN

Pada pelaksanaan urusan pelayanan wajib tidak terkait dengan pelayanan dasar pada Bidang Pangan pada tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan dapat di lihat sebagai berikut:

1) Program Kegiatan

Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan bukan dasar pada Urusan Pangan, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng menyusun Program Kegiatan pada Dinas Tanaman Pangan,

Holtikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan dengan anggaran Rp 1.325.237.000 dan program kegiatan sebagai berikut:

a) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

Pada Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan terdiri dari:

- Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

b) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Pada Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, terdiri dari:

- Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan
- Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
- Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per Kapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

c) Program Penanganan Kerawanan Pangan

Pada Program Penanganan Kerawanan Pangan, terdiri dari:

- Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan

d) Program Pengawasan Keamanan Pangan

Pada Program Pengawasan Keamanan Pangan, terdiri dari:

- Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

2) Indikator Kinerja Kunci

Penilaian Kinerja Penyelengaraan Pemerintahan Daerah pada Urusan Pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan dan Ketahan Pangan, dapat di lihat pada tabel berikut::

**Tabel 2.11  
IKK Output dan IKK Outcome  
Pelaksanaan Urusan Pangan**

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
H.1	Percentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	25,82%	Dinas TPHPKP	Data Jumlah cadangan pangan sebanyak 25340 ton dan data Jumlah kebutuhan pangan sebanyak 98150 ton
	1. Tersedianya	ADA	Dinas	Tersedianya infarstruktur

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan		TPHPKP	gudang cadangan pangan
	2. Tersedianya dan tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	ADA	Dinas TPHPKP	Data penyaluran Bahan Pangan (Beras dan Telur) Ke TTIC/TTI Tahun 2021
	3. Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	n/a	Dinas TPHPKP	Belum tersedianya regulasi untuk penentuan harga minimun pangan okal di kabupaten Soppeng Surat Pernyataan Dinas TPHPKP
	4. Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	ADA	Dinas TPHPKP	Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura Perkebunan dan Ketahanan Kabupaten Soppeng Nomor 800/2505/DTPHPKP/XI/2021
	5. Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	ADA	Dinas TPHPKP	Tersedianya peta kerawanan bencana pangan sehingga mempermudah pendektisan dini bencana yang terjadi di Wilayah Kabupaten Soppeng
	6. Tertanganinya kerawanan pangan	Tertangan ni	Dinas TPHPKP	Data Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Pada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kab. Soppeng Tahun 2021
	7. Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan		Dinas TPHPKP	Dokumentasi Penyaluran Cadangan Pangan pada daerah rentang rawan pangan yaitu : 1. Penyerahan Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Korban Kebakaran Di Kel.Lemba Kec. Lalabata 2. Penyerahan Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Korban Kebakaran Di Desa Kampiri Kec. Citta 3. Penyerahan Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
				<p>kepada Korban Banjir Di Kel.Limpomajang Kec. Mariotiwawa</p> <p>4. Penyerahan Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Korban Kebakaran Di Desa Bulue Kec. Marioriawa</p> <p>5. Penyerahan Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Korban Kebakaran Di Desa Bulue Kec. Marioriawa</p>
	8. Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	TERLAK SANA	Dinas TPHPKP	<p>Data hasil pengawasan keamanan pangan segar terbit surat pengawasan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Nomor: 5633/FOOD/X/21</li> <li>✓ Nomor: 5634/FOOD/X/21</li> <li>✓ Nomor: 5635/FOOD/X/21</li> <li>✓ Nomor: 5636/FOOD/X/21</li> <li>✓ Nomor: 5637/FOOD/X/21</li> <li>✓ Nomor: 5855/FOOD/X/21</li> <li>✓ Nomor: 5855/FOOD/X/21</li> <li>✓ Nomor: 5857/FOOD/X/21</li> </ul>

3) Prestasi/penghargaan yang diraih

Tidak ada prestasi atau penghargaan yang diraih oleh Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan dan Katahanan Pangan urusan pangan pada tahun 2021

#### D. URUSAN PERTANAHAN

Pada pelaksanaan urusan pelayanan wajib tidak terkait dengan pelayanan dasar pada Bidang Pertanahan pada tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dapat di lihat sebagai berikut:

1) Program Kegiatan

Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan bukan dasar pada Urusan Pertanahan, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng menyusun Program Kegiatan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dengan anggaran Rp 56.400.00. dan program kegiatan sebagai berikut:

a) Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Pada Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan, pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

- Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam kabupaten/kota

2) Indikator Kinerja Kunci

Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Urusan Pertanahan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, dapat di lihat pada tabel berikut:dapat di lihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.12**  
**IKK Output dan IKK Outcome**  
**Pelaksanaan Urusan Pertanahan**

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
I.1	Percentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100%	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data Luas Tanah Izin Lokasi Tahun 2021 sebanyak 120699 ha</li> <li>- Data Laporan Penerbitan Izin Lokasi sebanyak 120699 ha</li> </ul>
	1. SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	100%	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data Jumlah Izin Lokasi yang diterbitkan tahun 2021 sebanyak 4 izin</li> <li>- Data Laporan Penerbitan Izin Lokasi sebanyak 4 izin</li> </ul>
	2. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek.	100%	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Data Pemohon yang diusulkan panitia pertimbangan landreform tahun 2021 sebanyak 8 obyek tanah sesuai dengan Surat BPN Kabupaten Soppeng No. HP.02.01/252-73.12/I/2022 Perihal Permintaan Data
	3. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee		Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Data penetapan besarnya ganti rugi tanah kelebihan maksimum/absentee tahun 2021 781,38 ha sesuai Surat BPN Kabupaten Soppeng No. HP.02.01/252-73.12/I/2022 Perihal Permintaan Data
	4. Dokumen Izin membuka tanah	100%	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Data Jumlah Izin Lokasi yang diterbitkan tahun 2021 sebanyak 4 izin dari Data Laporan Penerbitan Izin Lokasi sebanyak 4 permohonan yang masuk
	5. Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota.	35 dokumen	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Data penetapan site lokasi pembangunan fisik sebanyak 35 dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik
I.2	Percentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum.	100%	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 67471 m di konversi menjadi Ha menjadi 6.75 ha</li> <li>- Data daftar prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan</li> </ul>

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
				permukiman
I.3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	120699 m <sup>2</sup>	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Data Luas Tanah Izin Lokasi Tahun 2021 dan Data Laporan Penerbitan Izin Lokasi
I.4	Mengukur persentase Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap direistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	1367 m <sup>2</sup>	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Data Tersedianya Tanah Objek Landreform (TOL) Tahun sesuai dengan Surat BPN Kabupaten Soppeng No. HP.02.01/252-73.12/I/2022 Perihal Permintaan Data
I.5	Mengukur persentase tersedianya tanah untuk masyarakat	9,01 ha	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Data tersedianya tanah ntuk masyarakat tahun 2021
I.6	Mengukur persentase Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi.	50%	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Surat Pernyataan Dinas PERKIM Nomor 045.2/73/PKP/II/2022 Junlah Sengketa Tanah yang ditangani pada tahun 2021 sebanyak 3 Kasus dan Data Hasil Identifikasi Aset Bermasalah Pemerintah Kabupaten Soppeng sebnayak 6 kasus

3) Prestasi/penghargaan yang diraih

Tidak ada prestasi atau penghargaan yang diraih oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman urusan pertanahan pada tahun 2021

## E. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Pada pelaksanaan urusan pelayanan wajib tidak terkait dengan pelayanan dasar pada Bidang Lingkungan Hidup pada tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dapat di lihat sebagai berikut:

1) Program Kegiatan

Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan bukan dasar pada Urusan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng menyusun Program Kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup dengan anggaran Rp 9.943.800.207 dan program kegiatan sebagai berikut:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, pelaksanaan kegiatan adalah:

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

b) Program Pengendalian Pencemaran Dan / Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Pada Program Pengendalian Pencemaran Dan / Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, pelaksanaan kegiatan adalah:

- Pencegahan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota
- Penanggulangan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota

c) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Pada Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI), pelaksanaan kegiatan adalah:

- Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten / Kota

d) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Pada Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, pelaksanaan kegiatan adalah:

- Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota

e) Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Pada Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, pelaksanaan kegiatan adalah:

- Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten / Kota

f) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Pada Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, pelaksanaan kegiatan adalah:

- Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten / Kota

g) Program Pengelolaan Persampahan

Pada Program Pengelolaan Persampahan, pelaksanaan kegiatan adalah:

- Pengelolaan Sampah

2) Indikator Kinerja Kunci

Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Urusan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, dapat di lihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.13  
IKK Output dan IKK Outcome  
Pelaksanaan Urusan Lingkungan Hidup**

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
2.J.1	Mengukur Indeks Kualitas	69.52	Dinas	Berdasarkan Peraturan

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	IKLH	Lingkungan Hidup	Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No. 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup hasil pengukuran IKLH Kab. Soppeng didapat skor 69.520 telah memenuhi <b>kriteria sedang</b> , dari perbandingan target RPJMD tingkat IKHL kabupaten Soppeng semakin membaik dari tingkat target yang di tergetkan
2.J.2	Mengukur capaian Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	74,06 %	Dinas Lingkungan Hidup	Cakupan pelayanan pengelolaan sampah di Kabupaten Soppeng belum optimal dikarenakan perbandingan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang ada belum sebanding dengan luas
	1. Tersedianya informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbulan sampah	0.64	Dinas Lingkungan Hidup	cakupan pelayanan, Tempat Pemrosesan Sampah (TPA) masih Control Landfill belum Sanitary Landfill dan sudah overcapacity serta masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah secara mandiri
	2. Tersedianya informasi terkait kapasitas TPA terhadap volume timbulan sampah	22,364.64	Dinas Lingkungan Hidup	
	3. Tersedianya informasi terkait jumlah TPST dibagi jumlah sampah pada masing-masing lingkungan	Belum Ada	Dinas Lingkungan Hidup	Untuk kegiatan pengurangan sampah yang dilakukan oleh pemerintah Kab. Soppeng meliputi Bank Sampah Induk, TPS3R Pasar Setral, dan Pengomposan TPA
2.J.3	Mengukur tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	11.43 %	Dinas Lingkungan Hidup	Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan atau Usaha yang melanggar termasuk kategori Pelanggaran Izin Lingkungan
	1. Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, dengan hitungan rumus sebagai berikut:	100%	Dinas Lingkungan Hidup	Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah melalui DPMTSP sebanyak 9 Izin Lingkungan berdasarkan rekomendasi persetujuan UKL-UPL / DPLH dari Dinas Lingkungan Hidup. Setelah terbitnya UU Cipta Kerja, Izin Lingkungan dihapus dan persetujuan lingkungan berupa SKKLH untuk dokumen Andal & PKPLH untuk Dokumen UKL-UPL yang diterbitkan sebanyak 5 PKPLH oleh DLH. Dan semua usulan

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
				permohonan telah terintegrasi kedalamnya
	2. Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	14.28%	Dinas Lingkungan Hidup	Belum sebandingnya Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) di Kabupaten Soppeng terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah Kab. Soppeng
	3. Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah Kabupaten/Kota	n/a	Dinas Lingkungan Hidup	Belum ada kelembagaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Kab. Soppeng
	4. Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	n/a	Dinas Lingkungan Hidup	
	5. Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	n/a	Dinas Lingkungan Hidup	
	6. Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani	0	Dinas Lingkungan Hidup	Tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya, sehingga Tidak adanya pengaduan dari masyarakat

3) Prestasi/penghargaan yang diraih

Tidak ada prestasi atau penghargaan yang diraih oleh Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2021

## F. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Pada pelaksanaan urusan pelayanan wajib tidak terkait dengan pelayanan dasar pada Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat di lihat sebagai berikut:

1) Program Kegiatan

Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan bukan dasar pada Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng menyusun Program Kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan anggaran Rp5.442.103.574 dan program kegiatan sebagai berikut:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Program Pendaftaran Penduduk
- Kegiatan Pelayanan pendaftaran penduduk terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

b) Program Pencatatan Sipil

Pada Program Pencatatan Sipil, pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

- Kegiatan Pelayanan pencatatan sipil

c) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Pada Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

- Penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan

2) Indikator Kinerja Kunci

Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dapat di lihat pada tabel berikut:dapat di lihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.14  
IKK Output dan IKK Outcome  
Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
2.K.1.1	Mengukur tingkat perekaman KTP Elektronik	99,59%	Dinas Dukcapil	Data penduduk yang berumur 17 tahun ke atas yang memiliki E-KTP sebanyak 182.524 orang, dengan uraian sebagai berikut: ✓ LK = 86.028 orang ✓ PR = 96.496 orang
	1. Menghitung Persentase Penerbitan akta perkawinan	65,87%	Dinas Dukcapil	Data penduduk yang mempunyai akta perkawinan sebanyak 73.580 orang dengan uraian sebagai berikut: ✓ LK = 36.228 orang ✓ PR = 37.352 orang
	2. Menghitung Persentase Penerbitan akta perceraian	2,33%	Dinas Dukcapil	Data penduduk yang mempunyai akta perceraian sebanyak 2.600 orang dengan uraian

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
				sebagai berikut: ✓ LK = 1.076 orang ✓ PR = 1.524 orang
	3. Menghitung Persentase Penerbitan akta kematian	46,68%	Dinas Dukcapil	Data kepemilikan akta kematian sebanyak 10.862 orang dengan uraian sebagai berikut: ✓ LK = 5.854 orang ✓ PR = 5.008 orang
	4. Menghitung Persentase Penyajian data kependudukan	2 kali penyajian data penduduk	Dinas Dukcapil	dokumentasi Buku Penyajian data Kabupaten Soppeng DKB.I dan DKB.II
2.K.1.2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA		Dinas Dukcapil	Data kepemilikan KIA anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) tahun sebanyak 35.076 orang dengan uraian sebagai berikut: ✓ LK = 35.076 orang ✓ PR = 54.593 orang
2.K.1.3	Persentase Kepemilikan akta kelahiran		Dinas Dukcapil	Data kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun sebanyak 62.219 orang dengan uraian sebagai berikut: ✓ LK = 32.097 orang ✓ PR = 30.122 orang
2.K.1.4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	17,65%	Dinas Dukcapil	Data jumlah OPD yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kinerja sebanyak 6 OPD, yaitu 1. DP3APPKB, 2. DIKBUD, 5)BPKPD, 3. DISKOMINFO, 4. DINSOS, 8)DPMD Perlunya OPD melakukan kerjasama dengan Dinas Kependudukan untuk memanfaatkan data penduduk yang akurat kedepannya.

3) Prestasi/penghargaan yang diraih

Tidak ada prestasi atau penghargaan yang diraih oleh Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2021

## G. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Pada pelaksanaan urusan pelayanan wajib tidak terkait dengan pelayanan dasar pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dapat di lihat sebagai berikut:

## 1) Program Kegiatan

Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan bukan dasar pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng menyusun Program Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan anggaran Rp.4.284.116.864 dan program kegiatan sebagai berikut:

### a) Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan

Pada pelaksanaan Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan, mempunyai kegiatan sebagai berikut:

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor.
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
- Penyediaan Bahan / Material.
- Fasilitasi Kunjungan Tamu.
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- Penyediaan jasa Komunikasi umber Daya Air dan Listrik.
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya

### b) Program Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Pada pelaksanaan Program Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, mempunyai kegiatan sebagai berikut:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD

### c) Program Administrasi Pemerintahan Desa

Pada pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Desa, mempunyai kegiatan sebagai berikut:

- Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

- Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
  - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
  - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
  - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
  - Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa
  - Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
  - Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan
- d) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Pada pelaksanaan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, mempunyai kegiatan sebagai berikut:

- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa / Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.
- Fasilitasi Pemerintahan Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.
- Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.

## 2) Indikator Kinerja Kunci

Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dapat di lihat pada tabel berikut: dapat di lihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.15**  
**IKK Output dan IKK Outcome**  
**Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
2.L.1	Percentase pengentasan desa tertinggal	20 %	DPMD	Data jumlah peningkatan desa tertinggal menjadi desa berkembang sebanyak 1 desa yang meningkat dari jumlah desa tertinggal per awal tahun sebanyak 5 desa
	1. Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam kerjasama antar desa	22 desa	DPMD	Data jumlah desa melaksanakan kerjasama
	2. Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan	n/a	DPMD	Tidak ada desa yang melakukan kerjasama antar desa tahun berjalan diakibatkan dalam proses pembentukan kegiatan dan kegiatan dikurangi karena refocusing anggaran untuk

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
				menanganan Covid 19, surat pernyataan Dinas PMD Nomor 87/DPMD/II/2022
	3. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	47 LKD/LAD	DPMD	Data Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan dilengkapi dengan data dokumen pelaksanaan peningkatan kapasitas LKD/LAD di desa
	4. Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	3 LKD/LAD	DPMD	Data Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan dilengkapi dengan data dokumen pelaksanaan peningkatan kapasitas LKD/LAD di desa
2.L.2	Menghitung Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	8%	DPMD	Data Jumlah peningkatan desa berkembang menjadi desa mandiri sebanyak 2 desa dari Jumlah desa berkembang (per awal tahun-n) sebanyak 26 desa
	1. Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam kerjasama antar desa	22 desa	DPMD	Data jumlah desa melaksanakan kerjasama
	2. Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	n/a	DPMD	Tidak ada desa yang melakukan kerjasama antar desa tahun berjalan diakibatkan dalam proses pembentukan kegiatan dan kegiatan dikurangi karena refocusing anggaran untuk menanganan Covid 19, surat pernyataan Dinas PMD Nomor 87/DPMD/II/2022
	3. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	47 LKD/LAD	DPMD	Data Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan dilengkapi dengan data dokumen pelaksanaan peningkatan kapasitas LKD/LAD di desa
	4. Jumlah peningkatan	3	DPMD	Data Jumlah peningkatan

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	LKD/LAD		desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan dilengkapi dengan data dokumen pelaksanaan peningkatan kapasitas LKD/LAD di desa

3) Prestasi/penghargaan yang diraih

Tidak ada prestasi atau penghargaan yang diraih oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2021

#### H. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Pada pelaksanaan urusan pelayanan wajib tidak terkait dengan pelayanan dasar pada Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat di lihat sebagai berikut:

1) Program Kegiatan

Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan bukan dasar pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng menyusun Program Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan anggaran Rp 3.410.510.850 dan program kegiatan sebagai berikut:

a) Program Kegiatan Pengendalian Penduduk

Pada Program Kegiatan Pengendalian Penduduk, pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

- Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Propinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kualitas Penduduk
- Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

b) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Pada Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

- Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
- Pendayagunaan Tenaga Penyuluhan KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)

- Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
  - Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat daerah Kabupaten/Kotadalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Keseftaan Ber•KB
- c) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
- Pada program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS), pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:
- Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

2) Indikator Kinerja Kunci

Penilaian Kinerja Penyelengaraan Pemerintahan Daerah pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dapat di lihat pada tabel berikut:dapat di lihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.16**  
**IKK Output dan IKK Outcome**  
**Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
2.M.1	Mengukur TFR (Angka Kelahiran Total)	2,16	Dinas P3APPKB	data masih SUSENAS 2019
	1. Tersedianya dokumen Grand DesignPembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	n/a	Dinas P3APPKB	surat pernyataan Dinas P3APPKB nomor 212/DP3APPKB/I/2022
	2. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	1026 jiwa	Dinas P3APPKB	Daftar laporan perincian usia NTCR tahun 2021
	3. Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	16,1 %	Dinas P3APPKB	data masih SUSENAS 2019
	4. Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	100%	Dinas P3APPKB	Data Jumlah Masyarakat terpapar program KKBK sebanyak 36408 jiwa
	5. Jumlah stakeholders/ pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi	15 OPD dan Ormas	Dinas P3APPKB	data stakeholders dan mitra kerja dalam pengelolaan KKBPK

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK			
2.M.2	Menghitung Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	75,42%	Dinas P3APPKB	Data pencapaian jumlah peserta KB Aktif Modern Tahun 2021 sebanyak 27458 Peserta KB Modern dari jumlah wajib PUS sebanyak 36408 PUS
	1. Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	100%	Dinas P3APPKB	- Data Faskes yang siap melayani KB MKJP sebanyak 8 Faskes - Kesepahaman Bersama antara Dinas P3APPKB dengan Faskes di Kab.Soppeng
	2. Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	75,39%	Dinas P3APPKB	Data Persentase Peserta KB Aktif Kontraensi Jangka Panjang (MKJP) Tahun 2021 Tingkat Kecamatan Se Kabupaten Soppeng sebanyak 27463 peserta KB aktif dari jumlah wajib PUS sebanyak 36429 PUS
	3. Jumlah Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	13 kelompok	Dinas P3APPKB	Daftar kelompok kerja yang aktif
	4. Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan		Dinas P3APPKB	Data peserta KB pasca bersalin tingkat Kabupaten Soppeng Tahun 2021 sebanyak 2861 peserta KB pasca persalinan menurut metode kontrasepsi cara modern dari Jumlah sasaran peserta Kab pasca persalinan sebanyak 14909 sasaran
2.M.3	Menghitung Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	14,24%	Dinas P3APPKB	Data Jumlah penduduk dan pasangan usia subur (PUS) tingkat kecamatan se Kabupaten Soppeng tahun 2021 sebanyak 5188 PUS yang ingin ber KB tetapi tidak terlayani dibandingkan jumlah pasangan PUS sebanyak 36429 PUS
	1. Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	45,17%	Dinas P3APPKB	Data Persentase Kepesertaan KB di Desa/Kelurahan yang terendah adalah Desa Parenring, Kecamatan Lilirilau
	2. Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	18163	Dinas P3APPKB	Data peserta KB yang menerima PBI

3) Prestasi/penghargaan yang diraih

Penghargaan yang diterima Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng untuk urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun 2021 meliputi:

a) Penghargaan Pemerintah Pusat.

Penghargaan dari pemerintah pusat tidak ada

b) Penghargaan Pemerintah Provinsi.

Penghargaan perovinsi adalah:

- Penghargaan dari Perwakilan BKKBN propinsi Sulawesi selatan kepada Bupati Soppeng atas Penghargaan Pendataan Keluarga 2021 (PK21)

c) Penghargaan Lembaga Internasional.

Penghargaan yang didapat dari lembaga internasional tidak ada.

d) Penghargaan Lembaga Nasional.

Penghargaan yang didapat dari lembaga Nasional tidak ada

## I. URUSAN PERHUBUNGAN

Pada pelaksanaan urusan pelayanan wajib tidak terkait dengan pelayanan dasar pada Bidang Perhubungan pada tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dapat dilihat sebagai beriku:

1) Program Kegiatan

Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan bukan dasar pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng menyusun Program Kegiatan pada Dinas Perhubungan dengan anggaran Rp 9.300.707.388 dan program kegiatan sebagai berikut:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, pelaksanaan kegiatan terdiri dari:

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

b) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Pada Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), pelaksanaan kegiatan terdiri dari:

- Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten
- Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
- Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
- Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
- Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas untuk (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
- Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
- Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Penertiban Izin Penyelenggraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 

2) Indikator Kinerja Kunci

Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Urusan Perhubungan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, dapat di lihat pada tabel berikut:dapat di lihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.17  
IKK Output dan IKK Outcome  
Urusan Perhubungan**

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
2.N.1	Rasio koneksi Kabupaten/Kota	62 RTK	Dinas Perhubungan	Data angkutan jalan tahun 2021
	1. Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	n/a	Dinas Perhubungan	Surat pernyataan nomor 23.98/DISHUB/II/2022
	2. Terlaksananya pelayanan uji berkala	n/a	Dinas Perhubungan	Surat pernyataan nomor 23.98/DISHUB/II/2022
	3. Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	18,49%	Dinas Perhubungan	Data penetapan tarif angkutan umum dalam bentuk SK Bupati Nomor 583/X/2005 dan surat edaran Dinas Perhubungan Nomor 248.06/Dishub/VII/2021
	4. Persentase pelaksanaan	91,63%	Dinas Perhubungan	Data jumlah Pemasangan Perlengkapan Jalan Tahun

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota			2021 sebanyak 186 titik dari target yang akan dipasangani pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota sebanyak 203 titik
2.N.2	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	0,009	Dinas Perhubungan	Data proyeksi pembebanan jaringan jalan
	1. Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalulintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	91,63%	Dinas Perhubungan	Data jumlah Pemasangan Perlengkapan Jalan Tahun 2021 sebanyak 186 titik dari target yang akan dipasangani pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota sebanyak 203 titik

3) Prestasi/penghargaan yang diraih

Tidak ada prestasi atau penghargaan yang diraih oleh Dinas Perhubungan pada tahun 2021

## J. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pada pelaksanaan urusan pelayanan wajib tidak terkait dengan pelayanan dasar pada Bidang Komunikasi dan Informatika pada tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informastika adalah sebagai berikut:

1) Program Kegiatan

Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan bukan dasar pada Urusan Komunikasi dan Informatika, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng menyusun Program Kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika dengan anggaran Rp. 7.301.640.265 dan program kegiatan sebagai berikut:

a) Program Kegiatan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota

Pada Program Kegiatan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota, uraian kegiatan sebagai berikut:

- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b) Program Kegiatan Sub Kegiatan Informasi dan Komunikasi Publik
- Pada Program Kegiatan Sub Kegiatan Informasi dan Komunikasi Publik, uraian kegiatan sebagai berikut:
- Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- c) Program Kegiatan Sub Kegiatan Aplikasi Informatika
- Pada Program Kegiatan Sub Kegiatan Aplikasi Informatika, uraian kegiatan sebagai berikut:
- Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

## 2) Indikator Kinerja Kunci

Penilaian Kinerja Penyelengaraan Pemerintahan Daerah pada Urusan Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, dapat di lihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.18**  
**IKK Output dan IKK Outcome**  
**Urusan Komunikai dan Informatika**

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
2.O.1	Mengukur Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	97,06%	Diskominfo	Masih adanya OPD yang belum terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo sebanyak 1 OPD yaitu Kecamatan Lilitraja
	1. Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	97,06%	Diskominfo	Masih adanya perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo sebanyak 1 Perangkat Daerah yaitu Kecamatan Lilitraja
	2. Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	97,06	Diskominfo	Masih adanya perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo sebanyak 1 Perangkat Daerah yaitu Kecamatan Lilitraja
	3. Tersedianya 84system elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis	Tersedia	Diskominfo	Peraturan Bupati Soppeng Nomor 87 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Website dan Media Sosial Pemerintah Daerah

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah, dengan data kelengkapan sebagai berikut :			
2.O.2	<p>Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi</p> <p>1. Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan sistem pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015</p>	100%	Diskominfo	<p>Data Jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online yaitu 36 layanan SKPD yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ SIPD = 34</li> <li>✓ SIMPEG = 1</li> <li>✓ LAPOR = 1</li> </ul>
	<p>2. Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar</p>	97 event	Diskominfo	<p>Data Jumlah kegiatan (event), perangkat daerah dan layanan publik pada pemerintahan daerah yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015</p>
	<p>3. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan</p>	82,35%	Diskominfo	<p>Data Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebanyak 28 perangkat daerah dari jumlah perangkat daerah sebanyak 34 perangkat daerah</p>
	<p>4. Persentase layanan SPBE (layanan sistem dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis</p>	100%	Diskominfo	<p>Data Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebanyak 34 perangkat daerah dari jumlah sebanyak 34 perangkat daerah</p>
		82,35%	Diskominfo	<p>Data Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara</p>

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	yang telah diimplementasikan secara elektronik			elektronik sebanyak 28 layanan dari jumlah keseluruhan sebanyak 34 layanan
	5. Persentase layanan SPBE (layanan sistem dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	5,88%	Diskominfo	Data Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik sebanyak 1 SKPD yaitu: 1. DUKCAPIL
	6. Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100%	Diskominfo	Data Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak 34 perangkat daerah
	7. Persentase layanan sistem dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	100%	Diskominfo	Data Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan sebanyak 3 layanan yaitu: ✓ SIAK ✓ OSS ✓ SP4N LAPOR
	8. Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	8,82%	Diskominfo	Data Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah sebanyak 3 perangkat daerah yaitu: ✓ BAPPELITBANGDA ✓ BKPSDM ✓ DINAS DUKCAPIL
	9. Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	100%	Diskominfo	Data Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah sebanyak 34 perangkat daerah
	10. Persentase perangkat daerah yang memperbarui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	100%	Diskominfo	Data Jumlah perangkat daerah yang memperbarui datanya sesuai siklus jenis data sebanyak 34 perangkat daerah
	11. Persentase data yang dapat berbagi pakai	8,82%	Diskominfo	Data Jumlah data yang dapat berbagi pakai sebanyak 3 data yaitu: ✓ SIPD ✓ SIAK ✓ SIMPEG
	12. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart	14,71%	Diskominfo	Data Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
2.O.2	mendukung smart city			city sebanyak 5 perangkat daerah YAITU: ✓ DISKOMINFO ✓ BKPSDM ✓ DPMPTSP-NAKERTRANS ✓ DPPK&UKM ✓ RSUD LATEMMAMALA ✓ BPKPD
	13. Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	13,33%	Diskominfo	Data Jumlah ASN pengelola TIK dan piagam pegelola TIK sebanyak 3 ASN dari jumlah keseluruhan ASN Kominfo sebanyak 15 ASN
	14. Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi egovernment, dengan dokumen master plan	ada	Diskominfo	Peraturan Bupati Soppeng Nomor 61/IX/2020 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Soppeng
2.O.3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	42,25%	Diskominfo	Data Jumlah Pengunjung Webside sebanyak 100495 kunjungan dari total jumlah penduduk 237875
	1. Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	100%	Diskominfo	Data Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi dengan uraian Kelompok Informasi Masyarakat sebanyak 54 KIM, Media Cetak sebanyak 47 MC dan Media Online sebanyak 55 MO
	2. Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	100%	Diskominfo	Data Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi dengan uraian FB PEMKAB sebanyak 388 postingan, Youtube sebanyak 38 postingan, dan Instagram sebanyak 388 postingan
	3. Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	100%	Diskominfo	Data Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi dengan uraian PPID dan LAPOR, melampirkan ✓ SK Bupati Soppeng Nomor 126/I/2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kabupaten Soppeng ✓ SK Bupati Soppeng

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
				<p>Nomor 152/II/2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kabupaten Soppeng</p> <p>✓ SK Bupati Soppeng Nomor 319/VI/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2021</p>

3) Prestasi/penghargaan yang diraih

Tidak ada prestasi atau penghargaan yang diraih oleh Dinas Komunikasi dan Informatika urusan komunikasi dan informasi pada tahun 2021

## K. URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Pada pelaksanaan urusan pelayanan wajib tidak terkait dengan pelayanan dasar pada Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut:

1) Program Kegiatan

Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan bukan dasar pada Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng menyusun Program Kegiatan pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan anggaran Rp 465.166.313 dan program kegiatan sebagai berikut:

a) Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi.

Pada Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi, kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota

b) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Pada Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

c) Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian

Pada Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian, kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Pendidikan dan Latihan UKM Bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota

d) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)

Pada Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM), kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan.

e) Program Pengembangan UMKM

Pada Program Pengembangan UMKM, kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

2) Indikator Kinerja Kunci

Penilaian Kinerja Penyelengaraan Pemerintahan Daerah pada Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah, dapat di lihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.19  
IKK Output dan IKK Outcome  
Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
2.P.1	Menghitung Persentase Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	45,18%	Dinas PPK&UKM	Data Koperasi yang meningkat kualitas berdasarkan RAT, Volume usaha dan asset sebanyak 75 koperasi dari jumlah keseluruhan koperasi sebanyak 166 koperasi
	1. Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	17,69%	Dinas PPK&UKM	Data penerbitan ijin usaha simpan pinjam koperasi sebanyak 23 koperasi dari jumlah koperasi simpan pinjam sebanyak 166 koperasi
	2. Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi	n/a	Dinas PPK&UKM	Jumlah penerbitan izin membuka kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam tidak ada yang dikeluarkan kerana tidak ada yang mengajukan

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota			permohonan izin Surat Pernyataan Dinas P2K-UKM nomor 01/KUM-1-PPK&UKM/II/2022
	3. Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	25,90%	Dinas PPK&UKM	Data Koperasi yang diperiksa dan diawasi sebanyak 43 koperasi dari jumlah koperasi sebanyak 166 koperasi
	4. Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	42,48%	Dinas PPK&UKM	Data rekapitulasi penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam di Kabupaten Soppeng sebanyak 65 koperasi dari jumlah keseluruhan koperasi simpan pinjam sebanyak 153 koperasi
	5. Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	36,14%	Dinas PPK&UKM	Daftar nama koperasi yang mengikuti pelatihan dan pendidikan koperasi tahun 2021 sebanyak 60 koperasi dari jumlah koperasi 166 koperasi
	6. Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	18,15%	Dinas PPK&UKM	- Daftar nama anggota koperasi yang mengikuti pelatihan dan pendidikan koperasi tahun 2021 sebanyak 120 anggota - Daftar nama anggota koperasi sebanyak 661 anggota
	7. Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		Dinas PPK&UKM	- Koperasi yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian tahun 2021 sebanyak 5 koperasi - Data Jumlah Koperasi Kabupaten Soppeng sebanyak 166 koperasi
	8. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	tidak perlu di isi	Dinas PPK&UKM	data tidak perlu di isi
	9. Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam	45,18%	Dinas PPK&UKM	Daftar koperasi telah menerima Sertifikat NIK sebanyak 75 koperasi dari Data Jumlah Koperasi Kabupaten Soppeng sebanyak 166 koperasi

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	daerah kabupaten/kota			
	10. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota, dengan rumus sebagai berikut :	37,35%	Dinas PPK&UKM	Jumlah Koperasi yang diberi dukungan fasilitas pembiayaan sebanyak 62 koperasi dari Jumlah Koperasi di Kabupaten Soppeng sebanyak 166 koperasi
	11. Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	n/a	Dinas PPK&UKM	Data koperasi yang diberi dukungan fasilitas pemasaran belum ada kerana usaha koperasi hanya simpan pinjam dan pertokoan serta tidak adanya koperasi produksi Surat Keterangan Dinas P2K-UKM Nomor 02/KUM-2-PPK&UKM/ II/2022
	12. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	100%	Dinas PPK&UKM	Jumlah Koperasi Tahun 2021 di Kabupaten Soppeng sebanyak 166
	13. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	n/a	Dinas PPK&UKM	Data Jumlah Koperasi yang diberikan fasilitas kemitraan UKM pada tahun 2021 tidak ada karena koperasi hanya simpan pinjam dan pertokoan Surat Pernyataan Dinas P2K-UKM nomor 03/KUM-1-PPK&UKM/II/2022
2.P.2	Menghitung persentase Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha, dengan rumus sebagai berikut :	7,50%	Dinas PPK&UKM	Data Usaha Mikro dan Wirausaha Tahun 2016-2021 di Kabupaten Soppeng sebanyak 535 dari jumlah usaha mikro dan wirausaha sebanyak 7129
	1. Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	28,04%	Dinas PPK&UKM	- Jumlah usaha mikro tahun 2020 sebanyak 430 - Jumlah usaha mikro tahun 2021 sebanyak 535
	2. Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	n/a	Dinas PPK&UKM	Jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS) belum ada, karena belum ada aplikasi online data

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
				system (ODS) pada SKPD bersangkutan, Surat Keterangan Dinas P2K-UKM nomor 01/KUM.3/PPK&UKM/II/2021
	3. Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	15,14%	Dinas PPK&UKM	Data Usaha Mikro yang bermitra dengan perbankan sebanyak 1079 dari jumlah Data Usaha Mikro di Kabupaten Soppeng sebanyak 7129
	4. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	15,40%	Dinas PPK&UKM	Usaha Mikro yang terfasilitasi standarisasi sebanyak 124 dan belum difasilitasi standarisasi Tahun 2021 sebanyak 756
	5. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	20,50%	Dinas PPK&UKM	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha sebanyak 115 dari jumlah usaha mikro di Kabupaten Soppeng sebanyak 756
	6. Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	7,50%	Dinas PPK&UKM	Data Usaha Mikro yang diberikan dukungan fasilitas sebanyak 535 dari Data Usaha Mikro Tahun 2016-2021 sebanyak 7129
	7. Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui Lembaga pendampingan	n/a	Dinas PPK&UKM	Jumlah Usaha Mikro yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha tidak terdapat data kerena kegiatan pendampingan melalui lembaga pendampingan belum pernah dilakukan dan belum adanya usulan dari Desa/Kelurahan dan para pelaku usaha untuk difasilitasi pendampingan usaha, Surat Pernyataan Dinas P2K-UKM Nomor 02/Kum.3/PPK&UKM/II/2022

3) Prestasi/penghargaan yang diraih

Tidak ada prestasi atau penghargaan yang diraih oleh Dinas Perdagangan, Perindustria, Koperasi dan UKM urusan koperasi, usaha kecil dan menengah pada tahun 2021

## L. URUSAN PENANAMAN MODAL

Pada pelaksanaan urusan pelayanan wajib tidak terkait dengan pelayanan dasar pada Bidang Penanaman Modal pada tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebagai berikut:

### 1) Program Kegiatan

Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan bukan dasar pada Urusan Penanaman Modal, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng menyusun Program Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, jumlah anggaran yang ditetapkan Rp.5.098.091.873 dan program kegiatan sebagai berikut:

#### a) Program pelayanan penanaman modal

Pada Program pelayanan penanaman modal, kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota

#### b) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pada Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota

#### c) Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota, kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
- Administrasi keuangan perangkat daerah
- Administrasi umum perangkat daerah
- Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
- Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

### 2) Indikator Kinerja Kunci

Penilaian Kinerja Penyelengaraan Pemerintahan Daerah pada Urusan Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dapat di lihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.20**  
**IKK Output dan IKK Outcome**  
**Urusan Penanaman Modal**

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
2.Q.2	Menghitung Persentase peningkatan investasi di	114,52%	Dinas PMPTSP-	- Data Jumlah Investasi tahun 2021

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	Kabupaten /Kota		NAKERTRA NS	Rp57.658.667.253,- - Data Jumlah Investasi tahun 2020 di Kabupaten Soppeng Rp123.688.144.297,-
	1. PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	n/a	Dinas PMPTSP-NAKERTRA NS	Surat Pernyataan Dinas PMPTSP-NAKERTRANS Nomor : 40/DPMPTSP-NAKERTRANS/II/2022
	2. Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	31 SOP	Dinas PMPTSP-NAKERTRA NS	Data SOP Pelaksanaan Pemberian Fasilitasi/Insentif penanaman modal
	3. Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	70 LKPM	Dinas PMPTSP-NAKERTRA NS	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal sebanyak 70 LKPM
	4. Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	n/a	Dinas PMPTSP-NAKERTRA NS	Surat Pernyataan Dinas PMPTSP-NAKERTRANS Nomor : 42/DPMPTSP-NAKERTRANS/II/2022
	5. Kegiatan pameran penanaman modal	n/a	Dinas PMPTSP-NAKERTRA NS	Surat Pernyataan Dinas PMPTSP-NAKERTRANS Nomor : 43/DPMPTSP-NAKERTRANS/II/2022
	6. Kegiatan penerimaan misipenanaman modal	n/a	Dinas PMPTSP-NAKERTRA NS	Surat Pernyataan Dinas PMPTSP-NAKERTRANS Nomor : 44/DPMPTSP-NAKERTRANS/II/2022
	7. Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	19 kali	Dinas PMPTSP-NAKERTRA NS	Data Konsultasi Perizinan dan Non Perizinan
	8. Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	1672 Perizinan dan non perizinan	Dinas PMPTSP-NAKERTRA NS	- Jumlah penerbitan perizinan sebanyak 1648 - Jumlah penerbitan non perizinan sebanyak 24
	9. Laporan realisasi penanaman modal (Rp)	57.658.667 .253,-	Dinas PMPTSP-NAKERTRA NS	Data Jumlah Nilai Realisasi Penanaman Modal yang Terpantau di Kabupaten Soppeng Tahun 2021
	10. Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	7 orang	Dinas PMPTSP-NAKERTRA NS	Sertifikat ASNpenanaman modal yang memahami ketentuan pelaksanaan kegiatan penanaman modal
	11. Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	199 perusahaan	Dinas PMPTSP-NAKERTRA NS	Data Jumlah Perusahaan yang mendapatkan pengawasan dan pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Soppeng

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	12. Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi kabupaten/kota	92,97%	Dinas PMPTSP-NAKERTRANS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data Laporan Penerbitan Surat Izin yang telah diserahkan Tahun 2021 sebanyak 1672</li> <li>- Data Jumlah Pendaftaran Perizinan dan Non Perizinan Tahun 2021 sebanyak 1812</li> </ul>

3) Prestasi/penghargaan yang diraih

Tidak ada prestasi atau penghargaan yang diraih oleh Dinas Penenaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi urusan penenaman modal pada tahun 2021

#### M. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Pada pelaksanaan urusan pelayanan wajib tidak terkait dengan pelayanan dasar pada Bidang Kepemudaan dan Olahraga pada tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga adalah sebagai berikut:

1) Program Kegiatan

Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan bukan dasar pada Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng menyusun Program Kegiatan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga dengan anggaran Rp 5.031.513.141 dan program kegiatan sebagai berikut:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat daerah
- Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

b) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Pada Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

- Penyadara, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
- Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

c) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Pada Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan, pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

- Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan

d) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Pada Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan, pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

- Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
- Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

2) Indikator Kinerja Kunci

Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.21  
IKK Output dan IKK Outcome  
Urusan Kepemudaan dan Olahraga**

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
2.R.1	Menghitung persentase Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri, dengan rumus sebagai berikut :	1,03%	DINAS PARPORA	Faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya kegiatan ini adalah belum terprogramnya pelatihan kewirausahaan dalam bidang kepemudaan, sehingga kegiatan tersebut akan dilaksanakan di tahun selanjutnya.
	1. Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	n/a	DINAS PARPORA	tidak terdapat data akibat pembatasan kegiatan masyarakat dan refocusing anggaran dengan Surat Pernyataan DISPARPORA nomor:556/61.d/DISPARPORA/II/2022
	2. Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	n/a	DINAS PARPORA	tidak terdapat data akibat pembatasan kegiatan masyarakat dan refocusing anggaran dengan Surat Pernyataan DISPARPORA nomor:556/61.d/DISPARPORA/II/2022

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
2.R.2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan	5,49%	DINAS PARPORA	Data pemuda usia 16-30 tahun yang aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan sebanyak 2925 orang dari jumlah pemuda usia 16-30 tahun di kabupaten sppeng sebanyak 53278 orang
	1. Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	n/a	DINAS PARPORA	tidak terdapat data akibat pembatasan kegiatan masyarakat dan refocusing anggaran dengan Surat Pernyataan DISPARPORA nomor:556/61.c/DISPARPORA/II/2022
	2. Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	n/a	DINAS PARPORA	tidak terdapat data akibat pembatasan kegiatan masyarakat dan refocusing anggaran dengan Surat Pernyataan DISPARPORA nomor:556/61.c/DISPARPORA/II/2022
2.R.3	Peningkatan Prestasi Olahraga		DINAS PARPORA	Daftar atlit berprestasi peraih medali tahun 2021
	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	2 medali	DINAS PARPORA	
	1. Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan-satuan pendidikan	46 pelatih	DINAS PARPORA	Daftar pelatih olahraga tahun 2021
	2. Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	n/a	DINAS PARPORA	tidak terdapat data akibat pembatasan kegiatan masyarakat dan refocusing anggaran dengan Surat Pernyataan DISPARPORA nomor:556/61.b/DISPARPORA/II/2022

3) Prestasi/penghargaan yang diraih

Penghargaan yang dicapai oleh Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga selama satu tahun Khususnya Bidang Keolahragaan meliputi:

a) Penghargaan Tingkat Provinsi

Penghargaan perseorangan yang diraih dalam kejuaraan tenis Meja kelompok Umur Se-Sulawesi Selatan tahun 2021 sebanyak 4 Orang, penghargaan perseorangan dalam Kejuaraan tenis meja kelompok umur Se Sul-SelBar tahun

2021 sebanyak 2 Orang dan perhargaan perseorangan dalam kejuaraan menembak Kapolda Sul-Sel Cup IX 2021 adalah 1 orang.

- b) Penghargaan Tingkat Nasional.

Penghargaan perseorangan dalam kejuaraan Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) sebanyak 2 orang yang terdiri dari 1 orang pada cabang olahraga Tenis Meja dan 1 orang dari cabang olahraga Lempar Lembing.

## N. URUSAN STATISTIK

Pada pelaksanaan urusan pelayanan wajib tidak terkait dengan pelayanan dasar pada Bidang Statistik pada tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

- 1) Program Kegiatan

Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan bukan dasar pada Urusan Statistik, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng menyusun Program Kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika dengan anggaran Rp. 143,950,000 dan program kegiatan sebagai berikut:

- a) Program Kegiatan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Pada Program Kegiatan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral, uraian kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah Kabupaten/Kota, adalah sebagai berikut:

- 1) Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral

- 2) Indikator Kinerja Kunci

Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Urusan Statistik yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dapat di lihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.22**  
**IKK Output dan IKK Outcome**  
**Urusan Statistik**

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
2.S.1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data 98statistic dalam menyusun perencanaan pembangunan	100%	DIKOMINFO	Data Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah sebanyak 34 OPD

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	daerah			
	1. Tersedianya buku profil daerah	ada	DIKOMINFO	SOPPENG DALAM ANGKA 2021
	2. Jumlah survei statistik sektoral yang dilakukan	8 sektoral	DIKOMINFO	Screenshot Web Kabupaten Soppeng (soppeng.kab.go.id pada laman satistik yaitu: 1. Ekonomi 2. Geografis 3. Pemerintahan 4. Kependudukan 5. Sosial 6. Industri 7. Pariwisata 8. Perdagangan
	3. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan oleh Kominfo, yaitu: 1. Jumlah TV Kabel 2. Jumlah Media	2 sektoral	DIKOMINFO	Data Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan oleh Kominfo, yaitu: 1. Jumlah TV Kabel 2. Jumlah Media
	4. Jumlah survei statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	n/a	DIKOMINFO	Surat Pernyataan Dinas KOMINFO
	5. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	n/a	DIKOMINFO	Surat Pernyataan Dinas KOMINFO
	6. Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	2 sektoral	DIKOMINFO	Surat BPS Kab. Soppeng Nomor: B-081/BPS/7312/06/12/2021
	7. Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	n/a	DIKOMINFO	Surat Pernyataan Dinas KOMINFO
2.S.2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	34 OPD	DIKOMINFO	Data Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah sebanyak 34 OPD

3) Prestasi/penghargaan yang diraih

Tidak ada prestasi atau penghargaan yang diraih oleh Dinas Komunikasi dan Informatikan urusan statistik pada tahun 2021

## O. URUSAN PERSANDIAN

Pada pelaksanaan urusan pelayanan wajib tidak terkait dengan pelayanan dasar pada Bidang Persandian pada tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

### 1) Program Kegiatan

Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan bukan dasar pada Urusan Persandian, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng menyusun Program Kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika dengan anggaran Rp. 48,350,000 dan program kegiatan sebagai berikut:

#### a) Program Kegiatan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengamanan Informasi

Kegiatan Program Kegiatan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengamanan Informasi, adalah sebagai berikut:

##### 1) Pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik

Kegiatan Pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik, adalah sebagai berikut:

- Pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik

##### 2) Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, adalah sebagai berikut:

- Operasionalisasi jaring komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten/kota

### 2) Indikator Kinerja Kunci

Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Urusan Persandian yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dapat di lihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.23  
IKK Output dan IKK Outcome  
Urusan Persandian**

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
2.T.1	Mengukur tingkat keamanan informasi pemerintah	49,40%	DIKOMINFO	Indeks KAMI
	1. Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya	n/a	DIKOMINFO	Data tidak ada

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan			
	2. Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	100%	DIKOMINFO	Data Surat Sandi Tahun 2021 sebanyak 539
	3. Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	n/a	DIKOMINFO	Surat Keterangan Dis KOMINFO
	4. Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	100%	DIKOMINFO	Penerapan mail sanpati (JKS) "Sanapati.net" sebanyak 1 titik

3) Prestasi/penghargaan yang diraih

Tidak ada prestasi atau penghargaan yang diraih oleh Dinas Komunikasi dan Informatika urusan persandian pada tahun 2021

## P. URUSAN KEBUDAYAAN

Pada pelaksanaan urusan pelayanan wajib tidak terkait dengan pelayanan dasar pada Bidang Kebudayaan pada tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut:

1) Program Kegiatan

Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan bukan dasar pada Urusan Kebudayaan, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng menyusun Program Kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan anggaran Rp 506.620.000 dan program kegiatan sebagai berikut:

a) Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Pada Program Pengembangan Kesenian Tradisional, pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

- 1) Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan kegiatan pada Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota, adalah sebagai berikut:
- Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
- b) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
- Pada Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:
- 1) Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan kegiatan pada Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota, adalah sebagai berikut:
- Pengembangan Cagar Budaya
- 2) Indikator Kinerja Kunci
- Penilaian Kinerja Penyelengaraan Pemerintahan Daerah pada Urusan Kebudayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.24**  
**IKK Output dan IKK Outcome**  
**Urusan Pendidikan dan Kebudayaan**

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
2.U.1	Mengukur persentase Terlestarikannya Cagar Budaya	25%	Dinas Dikbud	Cagar budaya yang dilestarikan sebanyak 8 CB dari jumlah keseluruhan cagar budaya sebanyak 32 CB
	1. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi	52 OK	Dinas Dikbud	Data jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi
	2. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	49 PK	Dinas Dikbud	Data Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)
	3. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	n/a	Dinas Dikbud	Tidak terdapat data
	4. Jumlah SDM, lembaga dan pranata	15 lembaga	Dinas Dikbud	Data SDM Lembaga dan pranata yang dibina

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)			(peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)
	5. Register cagar budaya (pendaftaran, pengiasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	n/a	Dinas Dikbud	Tidak terdapat data
	6. Perlindungan cagar budaya kabupaten/kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	n/a	Dinas Dikbud	Surat Pernyataan nomor 432.1/849/DIKBUD/III/2022 Surat Pernyataan nomor 432.1/850/DIKBUD/III/2022
	7. Layanan perijinian membawa cagar budaya kabupaten ke luar kabupaten dengan dukungan data	n/a	Dinas Dikbud	Data tidak ada
	8. Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi) Jumlah pengembangan cagar budaya di kabupaten	28 cb	Dinas Dikbud	Data Jumlah Cagar Budaya di teliti
	9. Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata) Jumlah CB dimanfaatkan	32 cb	Dinas Dikbud	data cagar budaya yang dimanfaatkan tahun 2021
	10. Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	348 koleksi	Dinas Dikbud	Data Koleksi museum latemmamala kabupaten soppeng
	11. Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana	3524 pengunjung	Dinas Dikbud	Data pengunjung museum tahun 2021

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	dan prasarana museum.			
	12. Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	tidak perlu di isi	Dinas Dikbud	tidak perlu di isi
	13. Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	n/a	Dinas Dikbud	Data tidak ada
	14. Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	n/a	Dinas Dikbud	Data tidak ada
	15. Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	n/a	Dinas Dikbud	Data tidak ada
	16. Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	26 orang	Dinas Dikbud	SK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng Nomor 047/SK/DIKBUD/IV/2021
	17. Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	n/a	Dinas Dikbud	Data tidak ada
	18. Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	n/a	Dinas Dikbud	Data tidak ada
	19. Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	7 kegiatan	Dinas Dikbud	Data kegiatan ddi museum

3) Prestasi/penghargaan yang diraih

Tidak ada prestasi atau penghargaan yang diraih oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan urusan kebudayaan pada tahun 2021

#### Q. URUSAN PERPUSTAKAAN

Pada pelaksanaan urusan pelayanan wajib tidak terkait dengan pelayanan dasar pada Bidang Perpustakaan pada tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Karsipan adalah sebagai berikut:

1) Program Kegiatan

Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan bukan dasar pada Urusan Perpustakaan, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng menyusun Program Kegiatan pada Dinas Perpustakaan dan Karsipan dengan anggaran Rp 7.286.743.182 dan program kegiatan sebagai berikut:

a) Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan

Pada pelaksanaan Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan, dengan kegiatan sebagai berikut:

- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

b) Program Pembinaan Perpustakaan

Pada pelaksanaan Program Pembinaan Perpustakaan, dengan kegiatan sebagai berikut:

- Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
- Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
- 

2) Indikator Kinerja Kunci

Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Urusan Perpustakaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dapat di lihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.25  
IKK Output dan IKK Outcome  
Pelaksanaan Urusan Perpustakaan**

NO	IKK OUTPUT//IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
2.V.1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat ✓ Indikator Frekuensi Membaca ✓ Indikator Durasi Membaca ✓ Indikator Jumlah Bahan Bacaan	150 kali 120 menit 4:1 orang	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat, dengan Menghitung tingkat kegemaran membaca masyarakat melalui pengukuran indikator ✓ Indikator Frekuensi Membaca = 180 kali ✓ Indikator Durasi Membaca = 225 menit ✓ Indikator Jumlah Bahan Bacaan = 101112 judul buku Dengan mengambil sampel jumlah kunjungan ke perpustakaan daerah sebanyak 27077 kunjungan
	1. Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	1:1,46	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	data koleksi buku diperpustakaan sebanyak 298149 exemplar dibagi Data Jumlah Penduduk usia 6-70

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
				tahun 2021 di Kabupaten Soppeng sebanyak 203957 orang
	2. Pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	13,32%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	data kunjungan masyarakat diperpustakaan sebanyak 27165 exsamplar dibagi Data Jumlah Penduduk usia 6-70 tahun 2021 di Kabupaten Soppeng sebanyak 203957 orang
	3. Ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	0,12%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	data jumlah pemustakaan di kabupaten soppeng sebanyak 252 petugas dibagi Data Jumlah Penduduk usia 6-70 tahun 2021 di Kabupaten Soppeng sebanyak 203957 orang
	4. Perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	42,22%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Data perpustakaan yang ber SNP di Kabupaten Soppeng sebanyak 19 perpustakaan dari jumlah seluruh perpustakaan di kabupaten soppeng sebanyak 54 perpustakaan
	5. Pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	7 kelompok	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat sebanyak 7 kelompok sebagai berikut: Kelompok Baca Polres Kelompok Baca Citta Kelompok Baca Taman Kalong Kelompok Baca Ganra Kelompok Baca Ganra Kelompok Baca Rumah Sakit Latemmala
2.P.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	28,74%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Indek pembangunan literasi masyarakat diambil dari <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Data jumlah layanan perpustakaan sebanyak 52 layanan</li> <li>✓ Data jumlah judul buku di perpustakaan sebanyak 101112 judul</li> <li>✓ Data Jumlah pemustakaan</li> <li>✓ Data Jumlah kunjungan diperpustakaan sebanyak 27077 kunjungan</li> <li>✓ Jumlah anggota perpustakaan sebanyak 123 anggota</li> </ul> <p>Yang dibagi jumlah warga negara usia 6-70 di Kabupaten sebanyak 222358 orang</p> <p>✓ Data jumlah Perpustakaan Ber SNP sebanyak 19</p>

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
				perpustakaan dibagi jumlah keseluruhan perpustakaan di Kabupaten Soppeng sebanyak 45 perpustakaan
	1. Naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	n/a	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	jumlah naska kuno yang dialih bahasakan tidak ada Surat Pernyataan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Nomor 34.a/DPK/II/2022
	2. Naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	n/a	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	jumlah naska kuno yang dialih bahasakan tidak ada Surat Pernyataan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Nomor 34.a/DPK/II/2022
	3. Koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada diwilayahnya (item)	n/a	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	jumlah naska kuno yang dialih bahasakan tidak ada Surat Pernyataan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Nomor 34.a/DPK/II/2022

3) Prestasi/penghargaan yang diraih

Tidak ada prestasi atau penghargaan yang diraih oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan urusan perpustakaan pada tahun 2021

## R. URUSAN KEARSIPAN

Pada pelaksanaan urusan pelayanan wajib tidak terkait dengan pelayanan dasar pada Bidang Kearsipan pada tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah sebagai berikut:

1) Program Kegiatan

Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan bukan dasar pada Urusan Kearsipan, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng menyusun Program Kegiatan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan anggaran Rp 56.326.500 dan program kegiatan sebagai berikut:

a) Progam Pengelolaan Arsip

Pada pelaksanaan Progam Pengelolaan Arsip, dengan kegiatan sebagai berikut:

- Pengelolaan Arsip Dinamis Kabupaten/Kota
- Pengelolaan Arsip Dinamis Kabupaten / Kota
- Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/ Kota

2) Indikator Kinerja Kunci

Penilaian Kinerja Penyelengaraan Pemerintahan Daerah pada Urusan Kearsipan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dapat di lihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.26**  
**IKK Output dan IKK Outcome**  
**Pelaksanaan Urusan Kearsipan**

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
2.W.1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	25%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Arsip Aktif yang telah dibuatkan daftar arsip
	1. Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Arsip Aktif yang telah dibuatkan daftar arsip sebanyak 544 arsip
	2. Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip	n/a	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Data tidak ada
	3. Arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	n/a	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Data tidak ada
	4. Jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	n/a	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Data tidak ada
2.W.2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	n/a	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Data tidak ada
	1. Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	n/a	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Surat Pernyataan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Nomor 34b/DPK/II/2022
	2. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	n/a	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Surat Pernyataan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Nomor 34b/DPK/II/2022
	3. Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan yang sesuai NSPK di provinsi	n/a	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Surat Pernyataan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Nomor 34b/DPK/II/2022

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	4. Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota yang sesuai NSPK	n/a	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Surat Pernyataan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Nomor 34b/DPK/II/2022
	5. Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK	n/a	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Surat Pernyataan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Nomor 34b/DPK/II/2022

3) Prestasi/penghargaan yang diraih

Tidak ada prestasi atau penghargaan yang diraih oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan urusan kearsipan pada tahun 2021

#### Urusan Pilihan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Urusan Pilihan merupakan Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah, oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng pada tahun 2020 dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut :

#### A. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pada pelaksanaan urusan pilihan pada Bidang Kelautan dan Perikanan pada tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

1) Program Kegiatan

Untuk mendukung pelaksanaan Urusan Pilihan pada Urusan Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng menyusun Program Kegiatan pada Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan sebanyak 5 program dengan jumlah kegiatan sebanyak 15 kegiatan dengan anggaran Rp. 8.196.909.898 dengan realisasi anggaran Rp. 7.883.815.909 dan program kegiatan sebagai berikut:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

b) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Kegiatan pada Program Pengelolaan Perikanan Tangkap adalah sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
- 2) Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota

c) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Kegiatan pada Program Pengelolaan Perikanan Budidaya adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
- 2) Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

d) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Kegiatan pada Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

- 1) Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/ Kota

e) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Kegiatan pada Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan adalah sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil
- 2) Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

2) Indikator Kinerja Kunci

Penilaian Kinerja Penyelengaraan Pemerintahan Daerah pada Urusan Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan dapat di lihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.27**  
**IKK Output dan IKK Outcome**  
**Urusan Kelautan dan Perikanan**

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
3.A.1	Jumlah Total Produksi	3425,7	Dinas	Data Produksi Perikanan

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota	ton	Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan	Tangkap dan Perikanan Budidaya Tahun 2021
	1. Rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	120 KK	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan	RTP Nelayan yang melakukan diversifikasi usaha tahun 2021
	2. Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	2 beroperasi	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan	Daftar Nama Pendaratan Ikan Tahun 2021
	3. Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam1 (satu) Daerah kabupaten/kota yang diterbitkan	a/n	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan	data tidak ada disebabkan karena tidak ada pembudidaya ikan yang mengajukan permohonan izin, Surat Pernyataan Dinas PKHP Nomor 804/66.1/DPKHP/I/2022
	4. Pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/ penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan	15 kelompok	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan	Data Daftar Nama Kelompok Pembudidaya lakan yang Dibina Tahun 2021
	5. Benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	8,7 ton	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan	Data Pemberian Budidaya Tahun 2021

3) Prestasi/penghargaan yang diraih

Tidak ada prestasi atau penghargaan yang diraih oleh Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan pada tahun 2021

## B. URUSAN PARIWISATA

Pada pelaksanaan urusan pilihan pada Bidang Pariwisata pada tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut:

1) Program Kegiatan

Untuk mendukung pelaksanaan Urusan Pilihan pada Urusan Pariwisata, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng menyusun Program Kegiatan pada Dinas Pariwisata,

Kepemudaan dan Olahraga dengan anggaran Rp 575.155.599 dan program kegiatan sebagai berikut:

a) Program Peningkatan daya Tarik Destinasi Pariwisata

Pada Program Peningkatan daya Tarik Destinasi Pariwisata, pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

- Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

b) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Pada Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

- Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

2) Indikator Kinerja Kunci

Penilaian Kinerja Penyelengaraan Pemerintahan Daerah pada Urusan Pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dapat di lihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.28**  
**IKK Output dan IKK Outcome**  
**Urusan Pariwisata**

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
3.B.1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	n/a	DINAS DISPARPORA	data wisatawan mancanegara tidak terdapat data surat pernyataan DISPARPORA nomor 556/61.b/DISPARPORA/II/2022
	1. Entitas pengelolaan destinasi	52 pengelolah	DINAS DISPARPORA	SK Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Nomor 88/DISPARPORA/XII/2021
	2. Kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	120 unit	DINAS DISPARPORA	Data Jumlah lengkap infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di Kabupaten Soppeng yang terdiri dari: ✓ Jumlah Infrastruktur dasar = 12 ✓ Jumlah Fasilitas Umum = 42 ✓ Jumlah Fasilitas pariwisata = 66
	3. Tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	565 buah	DINAS DISPARPORA	Data Usaha Pariwisata Tahun 2021 terdiri dari: ✓ Jumlah Daya Tarik usaha Wisata = 60 ✓ Jumlah Kawasan pariwisata = 2 ✓ Jumlah Jasa makanan dan minuman = 230

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
				✓ Jumlah Penyediaan akomodasi = 271 ✓ Jumlah Spa = 2
	4. Wisatawan mancanegara	n/a	DINAS DISPARPORA	data wisatawan mancanegara yang berkunjung di Kabupaten Soppeng tidak terdapat data diakibatkan pembatasan berkunjungan wisatawan luar negeri ke Kabupaten Soppeng sesuai dengan Surat Pernyataan DISPARPORA nomor 556/61.f/DISPARPORA/II/2012
	5. Promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	n/a	DINAS DISPARPORA	data wisatawan mancanegara yang berkunjung di Kabupaten Soppeng tidak terdapat data diakibatkan pembatasan berkunjungan wisatawan luar negeri ke Kabupaten Soppeng sesuai dengan Surat Pernyataan DISPARPORA nomor 556/61.f/DISPARPORA/II/2012
	6. Event luar negeri yang diikuti kabupaten/kota	n/a	DINAS DISPARPORA	data wisatawan mancanegara yang berkunjung di Kabupaten Soppeng tidak terdapat data diakibatkan pembatasan berkunjungan wisatawan luar negeri ke Kabupaten Soppeng sesuai dengan Surat Pernyataan DISPARPORA nomor 556/61.f/DISPARPORA/II/2012
	7. Industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	n/a	DINAS DISPARPORA	data wisatawan mancanegara yang berkunjung di Kabupaten Soppeng tidak terdapat data diakibatkan pembatasan berkunjungan wisatawan luar negeri ke Kabupaten Soppeng sesuai dengan Surat Pernyataan DISPARPORA nomor 556/61.g/DISPARPORA/II/2012
	8. Tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	n/a	DINAS DISPARPORA	data tidak tenaga kerja pariwisata bersertifikat Surat Pernyataan DISPARPORA nomor 556/61.g/DISPARPORA/II/2012
	9. SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan, dengan rumus sebagai berikut:	100%	DINAS DISPARPORA	Data peserta pembekalan pariwisata pada duta wisata Kabupaten Soppeng dan duta pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan dibuktikan dengan sertifikat sebanyak 24 orang
	10. Lokasi yang memperoleh	n/a	DINAS DISPARPORA	data wisatawan mancanegara yang berkunjung di Kabupaten

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat			soppeng tidak terdapat data diakibatkan pembatasan kegiatan masyarakat di Kabupaten Soppeng sesuai dengan Surat Pernyataan DISPARPORA nomor 556/61.e/DISPARPORA/II/2012
3.B.2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	3,66%	DINAS DISPARPORA	data jumlah kunjungan wisatawan nusantara pada tahun 2021 di Kab. Soppeng naik 3,66% dari tahun 2020
3.B3	Tingkat Hunian Akomodasi	21,84%	DINAS DISPARPORA	Data jumlah kamar yang terjual sebanyak 5919 dari jumlah kamar terediah sebanyak 271, yang menandakan kunjungan wisatawan lokal masih mendominasi kunjungan pariwisata
3.B.4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	4,97%	DINAS DISPARPORA	Data Bersumber Dari BPS Soppeng Dalam Angka 2021 dengan kontribusi sektor pariwisata sebanyak Rp617.440.000 dari jumlah total PDRB Kabupaten Soppeng sebanyak Rp 12.426.780.000
3.B.5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	0,81%	DINAS DISPARPORA	Data PAD Pariwisata Tahun 2021 sebanyak Rp27.697.000 dari Total PAD Rp155.453.702.843,9

3) Prestasi/penghargaan yang diraih

Penghargaan perseorangan pada tingkat Provinsi yang diraih oleh 4 orang delegasi Kabupaten Soppeng dalam pemilihan Duta Wisata Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021. Penghargaan yang dicapai yakni Duta Wisata Kategori Best Talent diraih 1 orang dan Duta Wisata Kategori Favorit diraih 1 orang.

### C. URUSAN PERTANIAN

Pada pelaksanaan urusan pilihan pada Bidang Pertanian pada tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan dan Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

1) Program Kegiatan

#### Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan

Untuk mendukung pelaksanaan Urusan Pilihan pada Urusan Pertanian, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng menyusun Program Kegiatan pada Dinas Tanaman Pangan,

Holtikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan dengan anggaran Rp 27.659.204.073 dan program kegiatan sebagai berikut:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 6 (enam) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan, yaitu:

- 1) Kegiatan Perencanaan, Pengangguran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
Pada pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Pengangguran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, sub kegiatan terdiri dari :

- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Pada pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, sub kegiatan terdiri dari :

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

- 3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pada pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, sub kegiatan terdiri dari :

- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material
- Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- 4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pada pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, sub kegiatan terdiri dari :

- Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pada pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sub kegiatan terdiri dari :
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pada pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sub kegiatan terdiri dari :
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
  - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- b) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
- Pada Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan yaitu sebagai berikut :
- 1) Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
- Pada pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian, sub kegiatan terdiri dari :
- Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas Teknologi dan Spesifik Lokasi
  - Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
- 2) Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
- Pada pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota, sub kegiatan terdiri dari :
- Sub Kegiatan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman
  - Sub Kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
- c) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- Pada Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 7 (tujuh) sub kegiatan yaitu :

1) Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian

Pada pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian, sub kegiatan terdiri dari :

- Sub Kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan / LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan / KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan / LCP2B
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya

2) Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian

Pada pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian, sub kegiatan terdiri dari :

- Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
- Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian
- Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
- Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit
- Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya

d) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Pada Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

1) Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota

Pada pelaksanaan Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota, sub kegiatan terdiri dari :

- Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

e) Program Penyuluhan Pertanian

Pada Program Penyuluhan Pertanian, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan yaitu :

1) Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

Pada pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, sub kegiatan terdiri dari :

- Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
- Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa

- Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penuluhan Pertanian
- Sub Kegiatan Pembentukan Badan Usaha Milik Petani
- Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota

#### **Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan**

Untuk mendukung pelaksanaan Urusan Pilihan pada Urusan Pertanian, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng menyusun Program Kegiatan pada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan dengan anggaran Rp 8.196.909.898 dan program kegiatan sebagai berikut:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan dan 20 (dua puluh) sub kegiatan yaitu :

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, sub kegiatan terdiri dari :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, sub kegiatan terdiri dari :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

3) Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

Pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, sub kegiatan terdiri dari :

- Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah.

4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, sub kegiatan terdiri dari :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
- Penyedian Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan/ Material
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, sub kegiatan terdiri dari :

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sub kegiatan terdiri dari :

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sub kegiatan terdiri dari :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

b) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Pada Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

1) Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya

Pada Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya, sub kegiatan terdiri dari :

- Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap

2) Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota

Pada Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota, sub kegiatan terdiri dari :

- Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil

c) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Pada Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

1) Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil

Pada Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil, sub kegiatan terdiri dari :

- Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil

2) Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

Pada Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, sub kegiatan terdiri dari :

- Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
- Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

d) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pada Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

- 1) Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/ Kota

Pada Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/ Kota, sub kegiatan terdiri dari :

- Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/ Kota

e) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Pada Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

- 1) Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil

Pada Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil, sub kegiatan terdiri dari :

- Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

- 2) Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

Pada Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil, sub kegiatan terdiri dari :

- Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

- 3) Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

Pada Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota, sub kegiatan terdiri dari :

- Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

2) Indikator Kinerja Kunci

Penilaian Kinerja Penyelengaraan Pemerintahan Daerah pada Urusan Pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Pereburunan dan Ketahanan Pangan dapat di lihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.29**  
**IKK Output dan IKK Outcome**  
**Urusan Pertanian**

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
3.C.1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	547,45%	DINAS TPHPKP	Data Produksi dan Produktivitas Tanaman Padi dan Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Di Kabupaten Soppeng Tahun 2021
	1. Sarana dan prasana pertanian yang diberikan, dengan rumus sebagai berikut:	287 paket	DINAS TPHPKP	Data Jumlah Sarana Prasarana yang diberikan tahun 2021 dengan uraian sebagai berikut: ✓ Sarana = 213 paket ✓ Prasarana = 74 paket
	2. Prasarana pertanian yang digunakan	213 paket	DINAS TPHPKP	Data Jumlah Sarana Prasarana yang diberikan tahun 2021
	3. Penerbitan izin usaha pertanian	25 izin	DINAS TPHPKP	Data Daftar Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Pertanian (IUP) Tahun 2021
	4. Prasarana yang digunakan	100%	DINAS TPHPKP	Data Jumlah Sarana Prasarana yang diberikan tahun 2021 sebanyak 74 paket
	5. Jumlah usulan izin usaha pertanian kab/kota	100%	DINAS TPHPKP	Data Daftar Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Pertanian (IUP) Tahun 2021 sebanyak 25 izin dan permohonan
3.C.2	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	-42,86%	DINAS TPHPKP	Data kasus kejadian/kasus hewan menular tahun 2021 dan tahun 2020 data kasus menurun dari tahun sebelumnya dari 21 kasus tahun 2020 menjadi 13 kasus di tahun 2021
	1. Fasilitasi penanggulangan bencana	100%	DINAS TPHPKP	Daftar Lokasi Penanggulangan Bencana Padi Puso Akibat Banjir Di Kabupaten Soppeng sebanyak 1524 Ha

3) Prestasi/penghargaan yang diraih

Penghargaan yang dicapai pada Tahun 2021 adalah Penghargaan Abdi Bakti Tani dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia oleh Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan pada tahun 2021

## **D. URUSAN PERDAGANGAN**

Pada pelaksanaan urusan pilihan pada Bidang Perdagangan pada tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi., Usaha Kecil dan Menegah adalah sebagai berikut:

### 1) Program Kegiatan

Untuk mendukung pelaksanaan Urusan Pilihan pada Urusan Perdagangan, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng menyusun Program Kegiatan pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Mengah dengan anggaran Rp 16.503.713.377 dan program kegiatan sebagai berikut:

#### a) Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan

Pada Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan, dengan kegiatan yaitu :

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah.
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

#### b) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Pada Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, dengan kegiatan yaitu :

- Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
- Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya

#### c) Program Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

Pada Program Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting, dengan kegiatan yaitu :

- Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota

#### d) Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Pada Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, dengan kegiatan yaitu :

- Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

2) Indikator Kinerja Kunci

Penilaian Kinerja Penyelengaraan Pemerintahan Daerah pada Urusan Perdagangan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Usaha Kecil dan Menegah dapat di lihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.30**  
**IKK Output dan IKK Outcome**  
**Urusan Perdagangan**

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
3.F.1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	3,77%	DINAS PPK&UKM	Data rekapan penerbitan surat izin usaha (SIUP) perdagangan tahun 2021 sebanyak 177 pelaku usaha dengan dari Data pelaku Usaha wilayah Kebupaten Soppeng Tahun 2021 sebanyak 4691 pelaku usaha
	1. Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin :		DINAS PPK&UKM	
	✓ izin pusat belanja	n/a	DINAS PPK&UKM	tidak ada data jumlah izin belanja yang diterbitkan Surat Pernyataan Dinas P2K-UKM Nomor 14/PERDAG PPKMUKM/II/2022 - tidak ada data pemohon izin pusat belanja yang mengajukan Surat Pernyataan Dinas P2K-UKM Nomor 18/PERDAG PPKUKM/II/2022
	✓ izin 123ook swalayan	100%	DINAS PPK&UKM	Data Toko Modern Swalayan Dalam Wilayah Kebupaten Soppeng yang diterbitkan pada Tahun 2021 sebanyak 10 izin dari jumlah permohonan sebanyak 10 pemohon 2021
	2. Penerbitan TDG	100%	DINAS PPK&UKM	Data Gudang yang terbit pada tahun 2021 sebanyak 7 gudang dari jumlah pemohon penerbitan izin gudang sebanyak 7 permohonan
	3. Gudang yang tidak mempunyai TDG	17,95%	DINAS PPK&UKM	Data Gudang yang terbit pada tahun 2021 sebanyak 7 gudang dari data Laporan Penerbitan Tanda Daftar Gudang (TDG) Tahun 2021 sebanyak 39 gudang
	4. Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu ✓ Penerima waralaba	n/a	DINAS PPK&UKM	'tidak ada data penerima waralaba dari waralaba yang bermohon

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	lanjutan dari waralaba dalam negeri			untuk STPW Waralaba Surat Pernyataan Dinas P2K-UKM Nomor 13/Perdag PPK-UKM/II/2022
	✓ Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	n/a		'tidak ada data penerima waralaba dari waralaba yang bermohon untuk STPW Waralaba Surat Pernyataan Dinas P2K-UKM Nomor 13/Perdag PPK-UKM/II/2022
	5. Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah Kab/Kota	n/a	DINAS PPK&UKM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada data jumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah Kabupaten, karean tidak ada pengusaha yang mengajukan izin bahan berbahaya, Surat Pernyataan Dinas P2K-UKM Nomor 17/PERDAG PPKUKM/II/2022</li> <li>- Tidak ada prnerbitan surat SIUP bahan berbahaya karena tidak ada pemohon untuk penerbitan SIUP bagi pengecer Surat Pernyataan Dinas P2K-UKM Nomor 11/PERDAG ppkukm/ii/2021</li> </ul>
	6. Penerbitan SKA yang tepat waktu	n/a	DINAS PPK&UKM	Tidak terlaksana kerana belum terdaftar sebagai instansi penerbit surat keterangan asal (IPSKA) sebagai mana tercantum dalam KEPMENDAG-RI Nomor 896 Tahun 2019, Surat Pernyataan Dinas P2K-UKM Nomor 15/PERDAG PPKUKM/II/2022
	7. Pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	20%	DINAS PPK&UKM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data Pasar yang telah direvitalisasi tahun 2021 sebanyak 2</li> <li>- Data Pasar Rakyat Kabupaten Soppeng Provinsi SulawesiSelatan Tahun 2021 sebanyak 18</li> </ul>
	8. Koefisien variasi harga antar waktu	3,36%	DINAS PPK&UKM	Data Perkembangan Harga Rata-Rata Kebutuhan Pokok Masyarakat Di Tingkat Perdagangan Bulan Januari-Desember 2021
3.F.2	Persentase kinerja realisasi pupuk	26,81%	DINAS PPK&UKM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data Realisasi Pupuk yang tersalurkan tahun 2021 sebanyak 30,827 ton</li> <li>- Data Targer Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) (RDKK) Tahun 2022 sebanyak 115,001 ton</li> </ul>

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	1. Pupuk dan pestisida yang tersalurkan - Jumlah pupuk yang disalurkan - Target komisi pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Tingkat Provinsi sebesar (90% dari RDKK - RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok)	30,827 ton  103,501 ton  115,001 ton	DINAS PPK&UKM	Data Realisasi Pupuk yang tersalurkan  Data Targer Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) (RDKK) Tahun 2022  Data E-RDKK (Ton)
3.F.3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	70,55%	DINAS PPK&UKM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data Hasil Pelayanan Sidang Tera fan Tera Ulang Kabupaten Soppeng Tahun 2021 sebanyak 1919 unit</li> <li>- Data Potensi Alat-Alat UTTP Wilayah Kerja Kabupaten Soppeng sebanyak 2720</li> </ul>
	1. Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan  2. Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	70,55%  100%	DINAS PPK&UKM  DINAS PPK&UKM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data Jumlah total UTTP yang ditera dan ditera ulang pada tahun berjalan sebanyak 1919 unit</li> <li>- Data Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di Kabupaten/Kota sebanyak 2720 unit</li> </ul> Dat Jumlah Sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan sesuai ketentuan yang berlaku tahun 2021 sebanyak 6559

3) Prestasi/penghargaan yang diraih

Tidak ada prestasi atau penghargaan yang diraih oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah urusan perindustrian pada tahun 2021

## E. URUSAN PERINDUSTRIAN

Pada pelaksanaan urusan pilihan pada Bidang Perindustrian pada tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah adalah sebagai berikut:

## 1) Program Kegiatan

Untuk mendukung pelaksanaan Urusan Pilihan pada Urusan Perindustrian, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng menyusun Program Kegiatan pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah dengan anggaran Rp 1.611.409.000 dan program kegiatan sebagai berikut:

### a) Program Kegiatan Urusan Perindustrian

Pada Program Kegiatan Urusan Perindustrian, dengan kegiatan yaitu :

- Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

### b) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Pada Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional, dengan kegiatan yaitu :

- Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota

## 2) Indikator Kinerja Kunci

Penilaian Kinerja Penyelengaraan Pemerintahan Daerah pada Urusan Perindustrian yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah dapat di lihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.31  
IKK Output dan IKK Outcome  
Urusan Perindustrian**

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
3.G.1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	47,62%	DINAS PPK&UKM	<ul style="list-style-type: none"><li>- Data industri tahun 2021 sebanyak 31 industri</li><li>- Data industri tahun 2020 sebanyak 21 industri</li></ul>
	1. Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	100%	DINAS PPK&UKM	Data Jumlah Izin yang diterbitkan tahun 2021 sebanyak 31 isin usaha
3.G.2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan	20%	DINAS PPK&UKM	<ul style="list-style-type: none"><li>- Lampiran Data RIPIN yang diterapkan di Kabupaten sebanyak 2 kegiatan</li><li>- Lampiran Data RIPIN menurut PP Nomor 14 Tahun 2015 sebanyak 10 kegiatan</li></ul>

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	dalam RPIK			
	1. Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA, dengan Capaian target tahapan penyelesaian RPIK yaitu :	100%	DINAS PPK&UKM	<p>Capaian target tahapan penyelesaian RPIK yaitu:</p> <p>Tersusunnya naskah akademik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersusunnya Draft Raperda RPIK = 30%</li> <li>- Draft Raperda RPIK yang disetujui DPRD dan mendapat Rekomendasi dinas yang membidangi perindustrian di Provins= 20%</li> <li>- Persetujuan Draft Raperda RPIK oleh Gubernur Provinsi = 15%</li> <li>- Penetapan Perda RPIK = 10%</li> </ul>
3.G.3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100%	DINAS PPK&UKM	Data Jumlah Izin yang dipatau dan dikeluarkan tahun 2021 sebanyak 31 dari jumlah perohonan sebanyak 31 permohonan
	1. Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha 127ndustry (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	100%	DINAS PPK&UKM	Data Jumlah Izin yang dipatau dan dikeluarkan tahun 2021 sebanyak 31 dari jumlah perohonan sebanyak 31 permohonan
3.G.4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	n/a	DINAS PPK&UKM	Data tidak ada data di sebabkan tidak adanya pemohon/pengajuan izin yang masuk Surat Pernyataan Dinas P2K-UKM Nomor 87.a/IND/PPKUKM/I/2022
	1. Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	n/a	DINAS PPK&UKM	Data tidak ada
3.G.5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya	n/a	DINAS PPK&UKM	Data tidak ada

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	di Daerah Kabupaten/Kota			
3.G.6	<p>Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini, dengan rumus sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterkinian informasi industri : <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%)</li> <li>➢ Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%)</li> <li>➢ Tidak menyampaikan informasi industri (0%)</li> </ul> </li>   <li>2. Kelengkapan informasi industri meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%)</li> <li>➢ Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%)</li> </ul> </li> </ol>	<p>Tidak ada</p> <p>ada</p>	<p>DINAS PPK&amp;UKM</p> <p>DINAS PPK&amp;UKM</p> <p>DINAS PPK&amp;UKM</p>	Data kemajuan industri
	1. Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota	n/a	DINAS PPK&UKM	Penerapan SII Nas belum dilaksanakan pada tahun 2021, Surat Pernyataan DP2K-UKM nomor 86.a/IND/PPKUKM/ I/2021

3) Prestasi/penghargaan yang diraih

Tidak ada prestasi atau penghargaan yang diraih oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah urusan perindustrian pada tahun 2021

## F. URUSAN TRANSMIGRASI

Pada pelaksanaan urusan pilihan pada Bidang Transmigrasi pada tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebagai berikut:

1) Program Kegiatan

Untuk mendukung pelaksanaan Urusan Pilihan pada Urusan Transmigrasi, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng menyusun Program Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan anggaran yang ditetapkan Rp.152.399.500 dan program kegiatan sebagai berikut:

a) Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Pada Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi, kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian

2) Indikator Kinerja Kunci

Penilaian Kinerja Penyelengaraan Pemerintahan Daerah pada Urusan Transmigrasi yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Sat Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat di lihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.32  
IKK Output dan IKK Outcome  
Urusan Transmigrasi**

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
3.H	1. Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	1 upto	DINAS PMPTSP-NAKERTRANS	KEPMENDES-PDT-TRANS Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengembangan Satuan Permukiman Transmigrasi Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2021
	2. Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	88 KK		Data Kepala Keluarga di daerah transmigrasi
	3. Jumlah satuan pemukiman yang dibina	1 pemukiman		KEPMENDES-PDT-TRANS Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengembangan Satuan Permukiman Transmigrasi Oleh Pemerintah

			Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2021
--	--	--	-------------------------------------

3) Prestasi/penghargaan yang diraih

Tidak ada prestasi atau penghargaan yang diraih oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi urusan transmigrasi pada tahun 2021

**Urusan Penunjang Pemerintahan**

Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng pada tahun 2020 dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut :

**A. PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

Pada pelaksanaan urusan pilihan pada Bidang Perencanaan dan Keuangan pada tahun 2021 yang dilaksanakan oleh 2 (dua) Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu:

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

1) Program Kegiatan

Untuk mendukung pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan pada Perencanaan dan Keuangan, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng menyusun Program Kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah anggaran yang ditetapkan sebanyak Rp.145.519.073.481 dengan program kegiatan sebagai berikut:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan sebagai berikut :

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari:

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

3) Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah, terdiri dari:

- Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah

4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdiri dari:

---

- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

5) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari:

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan/Material
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari:

- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari:

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari:

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

b) Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kegiatan sebagai berikut :

1) Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, terdiri dari:

- Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD

- Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran

2) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, terdiri dari:

- Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
- Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
- Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
- Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
- Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, terdiri dari:

- Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
- Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
- Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran
- Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah

4) Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari:

- Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
- Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
- Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota

c) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pada Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan kegiatan sebagai berikut :

1) Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari:

- Penyusunan Standar Harga
- Pengamanan Barang Milik Daerah

- Penilaian Barang Milik Daerah
- Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtempahan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
- Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

d) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pada Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan kegiatan sebagai berikut :

1) Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, terdiri dari:

- Perencanaan pengelolaan pajak daerah
- Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
- Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
- Penagihan Pajak Daerah
- Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
- Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

2) Indikator Kinerja Kunci

Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Urusan Penunjang Pemerintahan pada Perencanaan dan Keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dapat di lihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.33**  
**IKK Output dan IKK Outcome**  
**Urusan Penunjang Pemerintahan Perencanaan dan Keuangan**  
**Yang Dilaksanakan Oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah**

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
4.A.1	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	13,78	BPKPD	Data Jumlah belanja pegawai tahun 2021
4.A.2	Rasio PAD		BPKPD	Data Rasio PAD Tahun 2021 bersumber dari BPS (Soppeng Dalam Angka 2022) PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Soppeng (miliar rupiah) 2017-2021
4.A.5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)		BPKPD	transfer expenditures adalah hibah, bantuan sosial, subsidi, pembayaran bunga, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga dan data belanja urusan pemerintahan adalah

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
				seluruh belanja daerah di luar belanja modal
4.A.6	Opini Laporan Keuangan	WTP	BPKPD	Data penghargaan opini laporan keuangan 10 tahun
	✓ Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2021	WTP	BPKPD	
	✓ Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2020	WTP	BPKPD	
	✓ Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2019	WTP	BPKPD	
	✓ Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2018	WTP	BPKPD	
	✓ Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2017	WTP	BPKPD	
	✓ Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2016	WTP	BPKPD	
	✓ Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2015	WTP	BPKPD	
	✓ Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2014	WTP	BPKPD	
	✓ Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2013	WTP	BPKPD	
	✓ Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2012	WTP	BPKPD	
	✓ Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2011	WTP	BPKPD	
	✓ Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2010	WTP	BPKPD	
	✓ Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2009	WTP	BPKPD	

3) Prestasi/penghargaan yang diraih

Penghargaan yang diperoleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Kabupaten Soppeng pada tahun 2021, antara lain :

- **Penghargaan Pemerintah Pusat**

Penghargaan dari Bank Indonesia sebagai Pemerintah Daerah Terbaik 2 dengan Porsi Nominal Transaksi Pendapatan melalui Qris Terbanyak pada tahun 2021

Inspektorat Daerah

1) Program Kegiatan

Untuk mendukung pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan pada Perencanaan dan Keuangan, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng menyusun Program Kegiatan pada Inspektorat Daerah dengan anggaran Rp 10.397.524.026 dan program kegiatan sebagai berikut:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, kegiatan terdiri dari :

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

b) Program Penyelenggaraan Pengawasan

Pada Program Penyelenggaraan Pengawasan, kegiatan terdiri dari :

- Penyelenggaraan Pengawasan Internal
- Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

c) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Pada Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, kegiatan terdiri dari:

- Pendampingan dan Asistensi

2) Indikator Kinerja Kunci

Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Urusan Penunjang Pemerintahan pada Perencanaan dan Keuangan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah dapat di lihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.34**  
**IKK Output dan IKK Outcome**  
**Urusan Penunjang Pemerintahan Perencanaan dan Keuangan**  
**Yang Dilaksanakan Oleh Inspektorat Daerah**

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	TARGET CAPAIAN (RPJMD) 2021/ CAPAIAN LPPD TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
4.A.3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level 2	Level 2	Inspektorat	Pada peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan tingkat Kualitas APIP pada level 2 disebabkan tingkat tindak lanjut temuan pada tahun 2021 sebanyak 262 temuan dan yang diselesaikan sebanyak 156 temuan atau persentase penyelesaian temuan 59,54% dan temuan BPK pada tahun 2021 sebanyak 741 temuan dan ditindak lanjuti dari temuan BPK sebanyak 530 temuan atau 71,52%
4.A.4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level 2	Level 2	inspektorat	

- 3) Prestasi/penghargaan yang diraih  
Tidak ada penghargaan pada tahun 2021

## B. PENGADAAN

Pada pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan pada Bidang Pengadaan pada tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Sekeretariat Daerah adalah sebagai berikut:

1) Program Kegiatan

Untuk mendukung pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan pada Pengadaan, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng menyusun Program Kegiatan pada Sekretariat Daerah dengan anggaran Rp. 511.954.600,- dan program kegiatan sebagai berikut:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan sebagai berikut:

- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

b) Program Perekonomian dan Pembangunan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan sebagai berikut:

- Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
- Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
- Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
- Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan

2) Indikator Kinerja Kunci

Penilaian Kinerja Penyelengaraan Pemerintahan Daerah pada Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Sekretariat daerah dapat di lihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.35**  
**IKK Output dan IKK Outcome**  
**Urusan Penunjang Pemerintahan Pengadaan**  
**Yang Dilaksanakan Oleh Sekretariat Daerah**

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
4.B.1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	n/a	Sekeretariat Daerah Bagia Pengadaan Barang dan Jasa	Berdasarkan data kontrak pengadaan barang jasa konstruksi tahun 2021, tidak ada kontrak jasa konstruksi yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal, surat pernyataan Nomor 80/B.BPJ/II/2022
4.B.2	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	84%	Sekeretariat Daerah Bagia Pengadaan Barang dan Jasa	Data kontrak paket pekerjaan pengadaan jasa konstruksi kabupaten soppeng tahun 2021 sebanyak 84 paket Data pengadaan barang/jasa melalui metode penunjukan langsung Pemerintah Kabupaten Soppeng tahun 2021 sebanyak 1 paket
4.B.3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	49,77%	Sekeretariat Daerah Bagia Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan realisasi dan kativasi pengadaan Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2021 per bulan Desember 2021 pada belanja langsung sebanyak Rp.583.431.549.766 dan belanja modal Rp.290.348.896.182

## C. KEPEGAWAIAN

Pada pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan di Bidang Kepegawaian pada tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut:

### 1) Program Kegiatan

Untuk mendukung pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan pada Kepegawaian, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng menyusun Program Kegiatan pada Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia, jumlah anggaran yang ditetapkan Rp9.412.785.948,- dengan program kegiatan sebagai berikut:

#### a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari kegiatan sebagai berikut :

- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

#### b) Program Kepegawaian Daerah

- Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
- Mutasi dan Promosi ASN
- Pengembangan Kompetensi ASN
- Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

#### c) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

- Pengembangan Kompetensi Teknis
- Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

### 2) Indikator Kinerja Kunci

Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.36**  
**IKK Output dan IKK Outcome**  
**Urusan Penunjang Pemerintahan Kepegawaian**  
**Yang Dilaksanakan Oleh**  
**Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia**

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
4.C.1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian BKPSDM	Realisasi 6,76% dari target 7,06 terlihat masih tingginya ASN yang berpendidikan SMA kebawah, ini diakibatkan ASN yang berpendidikan SMA kebawah adalah Cleaning Service dan umur mereka rata-rata hampir pensiun
4.C.2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian BKPSDM	Realisasi 0,24% dari Target 0,25% hampir mencapai target ini akibat dilaksanakannya penyetaraan Jabatan Struktural ke dalam Jabatan Fungsional sebanyak 224 ASN
4.C.3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		Bidang Pengembangan SDM, Bidang Mutasi, Promosi dan Penilaian	Realisasi 74,49% dari target 85,91% belum mencapai target akibat bertambahnya pejabat fungsional yang disetarakan dari jabatan fungsional pada akhir desember serta banyak pejabat structural yang belum mengikuti diklat kepemimpinan karena keterbatasan anggaran

3) Prestasi/penghargaan yang diraih

Tidak ada prestasi/penghargaan yang diraih tahun 2021

#### D. MANAJEMEN KEUANGAN

Pada pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan di Bidang Manajemen Keuangan pada tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

- Program Kegiatan

Untuk mendukung pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan pada Perencanaan dan Keuangan, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng menyusun Program Kegiatan pada

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapat Daerah, jumlah anggaran Rp.145.519.073.481 dengan program kegiatan sebagai berikut:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

b) Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
- 2) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
- 3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
- 4) Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

c) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pada Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pengelolaan Barang Milik Daerah

d) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pada Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

- Indikator Kinerja Kunci

Penilaian Kinerja Penyelengaraan Pemerintahan Daerah pada Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dapat di lihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.37  
IKK Output dan IKK Outcome  
Urusan Penunjang Pemerintahan Manajemen Keuangan  
Yang Dilaksanakan Oleh  
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah**

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
4.D.1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam	7,28%	BPKPD	Kurang dari 7,28% anggaran yang tidak terialisasi atau 92,72% anggaran sudah

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	APBD			terialisasi dari target yang telah ditetapkan sebelum perubahan, perlunya pada tahun kedepannya agar ditingkatkan realisasi penggunaan anggaran pada tingkat SKPD
4.D.2	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD,	21,61%	BPKPD	Capaian pada tahun 2021 melebihi dari target RPJMD tahun 2021 yaitu 21,41% dari target yang telah ditetapkan
4.D.3	Assets Management 1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak) 4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)	Ya Ya Ya Ya Ya	BPKPD BPKPD BPKPD BPKPD BPKPD	Data Assets Management yang telah didata dan dicatat pada data assets secara manual dan secara digital oleh SKPD, dengan adanya berita acara rekon Assets yang telah ditandatangani oleh pejabat pengelola, dan pejabat pemeriksa asset
4.D.4	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	9,23%	BPKPD	Data Silpa tahun 2020 dan total belanja sebelum

- Prestasi/penghargaan yang diraih  
Penghargaan yang diperoleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng pada tahun 2021, antara lain :
- **Penghargaan Pemerintah Pusat**  
Penghargaan dari Bank Indonesia sebagai Pemerintah Daerah Terbaik 2 dengan Porsi Nominal Transaksi Pendapatan melalui Qris Terbanyak pada tahun 2021

## E. TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK

Pada pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan di Bidang Transparansi dan Partisipasi Publik pada tahun 2021 yang dilaksanakan oleh 10 (sepuluh) Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu:

### Dinas Komunikasi dan Informatika

#### 1) Program Kegiatan

Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan bukan dasar pada Urusan Komunikasi dan Informatika, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng menyusun Program Kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika dengan anggaran Rp. 7.301.640.265 dan program kegiatan sebagai berikut:

a) Program Kegiatan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota

Pada Program Kegiatan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota, uraian kegiatan sebagai berikut:

1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Pelaksanaan kegiatan pada Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut:

- Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
- Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Pelaksanaan kegiatan pada Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut:

- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
- Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
- Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD

3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Pelaksanaan kegiatan pada Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut:

- Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD

4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Pelaksanaan kegiatan pada Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut:

- Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian
- Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian

5) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pelaksanaan kegiatan pada Administrasi Umum Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut:

- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Penyediaan peralatan rumah tangga
- Penyediaan bahan logistik kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan bahan/material
- Fasilitasi kunjungan tamu
- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
-

- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  
Pelaksanaan kegiatan pada Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, adalah sebagai berikut:
- Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Pelaksanaan kegiatan pada Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, adalah sebagai berikut:
- Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
  - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Pelaksanaan kegiatan pada Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, adalah sebagai berikut:
- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
  - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
  - Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
- b) Program Kegiatan Sub Kegiatan Informasi dan Komunikasi Publik  
Pada Program Kegiatan Sub Kegiatan Informasi dan Komunikasi Publik, uraian kegiatan sebagai berikut:
- 1) Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  
Pelaksanaan kegiatan pada Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, adalah sebagai berikut:
- Monitoring opini dan aspirasi publik
  - Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi public
  - Pelayanan Informasi Publik
  - Kemitraan dengan pemangku kepentingan
  - Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik
  - Penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas
- c) Program Kegiatan Sub Kegiatan Aplikasi Informatika  
Pada Program Kegiatan Sub Kegiatan Aplikasi Informatika, uraian kegiatan sebagai berikut:
- 1) Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  
Pelaksanaan kegiatan pada Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, adalah sebagai berikut:

- Penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota
  - Penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah
- 2) Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan kegiatan pada Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, adalah sebagai berikut:
- Pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah
  - Pengelolaan government chief information officer (GCIO)
- 2) Indikator Kinerja Kunci
- Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dapat di lihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.38**  
**IKK Output dan IKK Outcome**  
**Urusan Penunjang Pemerintahan Transparasi dan Partisipasi Publik**  
**Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Komunikasi dan Informatika**

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
4.E.1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	100%	DINAS KOMINFO	Pelaksanaan Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan pada DINAS KOMINFO
4.E.2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah:	100%	DINAS KOMINFO	Pelaksanaan Akses publik terhadap informasi keuangan daerah pada DINAS KOMINFO dengan adanya Website Pemda yang memuat tentang transparasi anggaran daerah

#### Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

- 1) Program Kegiatan
- Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan bukan dasar pada Urusan Penanaman Modal, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng menyusun Program Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, jumlah anggaran yang ditetapkan Rp.5.098.091.873 dan program kegiatan sebagai berikut:
- a) Program pelayanan penanaman modal
- Pada Program pelayanan penanaman modal, kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota
- b) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- Pada Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
- Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota
- c) Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota
- Pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota, kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
- Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
  - Administrasi keuangan perangkat daerah
  - Administrasi umum perangkat daerah
  - Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
- 2) Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
- Indikator Kinerja Kunci
- Penilaian Kinerja Penyelengaraan Pemerintahan Daerah pada Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dapat di lihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.39**  
**IKK Output dan IKK Outcome**  
**Urusan Penunjang Pemerintahan Transparasi dan Partisipasi Publik**  
**Yang Dilaksanakan Oleh**  
**Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan**  
**Transmigrasi**

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
4.E.1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	100%	DINAS PMPTSP-NAKERTRAN	Pelaksanaan Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan pada DPMPTSP-NAKERTRAN terdapat pada kegiatan Administrasi umum perangkat daerah dengan Pagu Anggaran Rp.255.531.682 dan realisasi Anggaran Rp.251.563.082 atau 98,45%

- 3) Prestasi/penghargaan yang diraih
- Tidak ada prestasi/ penghargaan yang diraih tahun 2021

## **Kecamatan Lalabata**

### **1) Program Kegiatan**

Untuk mendukung pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan pada Transparasi dan Partisipasi Publik, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng menyusun Program Kegiatan pada Kecamatan Lalabata, jumlah anggaran Rp 14.955.662.232 dengan program kegiatan sebagai berikut:

#### **a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Program kegiatan tersebut terdiri dari :

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

#### **b) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.**

Program kegiatan tersebut terdiri dari :

- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

#### **c) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**

Program kegiatan tersebut terdiri dari :

- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- Pemberdayaan Kelurahan.

#### **d) Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**

Program kegiatan tersebut terdiri dari :

- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

#### **e) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

Program kegiatan tersebut terdiri dari :

- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

### **2) Indikator Kinerja Kunci**

Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Lalabata dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.40**  
**IKK Output dan IKK Outcome**  
**Urusan Penunjang Pemerintahan Transparasi dan Partisipasi Publik**  
**Yang Dilaksanakan Oleh Kecamatan Lalabata**

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
4.E.1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	100%	Kecamatan Lalabata	Pelaksanaan Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan pada Kecamatan Liliraja terdapat pada Program Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) dengan Pagu Anggaran Rp 21.600.000 dan realisasi Anggaran Rp 21.600.000 atau 100 %

- 3) Prestasi/penghargaan yang diraih  
Tidak ada prestasi/penghargaan yang diraih pada tahun 2021

#### **Kecamatan Liliraja**

- 1) Program Kegiatan

Untuk mendukung pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan pada Transparasi dan Partisipasi Publik, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng menyusun Program Kegiatan pada Kecamatan Liliraja, jumlah anggaran Rp 5.748.184.992,- dengan program kegiatan sebagai berikut:

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program kegiatan tersebut terdiri dari :

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- b) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.

Program kegiatan tersebut terdiri dari :

- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

- c) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Program kegiatan tersebut terdiri dari :

- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

d) Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Program kegiatan tersebut terdiri dari :

- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

e) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program kegiatan tersebut terdiri dari :

- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

2) Indikator Kinerja Kunci

Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Lilitraja dapat di lihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.41**  
**IKK Output dan IKK Outcome**  
**Urusan Penunjang Pemerintahan Transparasi dan Partisipasi Publik**  
**Yang Dilaksanakan Oleh Kecamatan Lilitraja**

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
4.E.1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	100%	Kecamatan Lilitraja	Pelaksanaan Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan pada Kecamatan Lilitraja terdapat pada Program Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) dengan 150 perizinan non usaha dan 451 non perizinan yang dikeluarkan. Pagu Anggaran Rp Rp33.250.000 dan realisasi Anggaran Rp3.250.000 atau 100%

3) Prestasi/penghargaan yang diraih

Tidak ada penghargaan pada tahun 2021

### **Kecamatan Lilitrau**

1) Program Kegiatan

Untuk mendukung pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan pada Transparasi dan Partisipasi Publik, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng menyusun Program Kegiatan pada Kecamatan Lilitrau dengan anggaran Rp 8.786.138.985 dan program kegiatan diuraikan sebagai berikut:

a) Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota

Pada Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota, terdiri dari :

- 1) Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
- 2) Administrasi keuangan perangkat daerah

Pelaksanaan Administrasi keuangan perangkat daerah, menghasilkan kegiatan sebagai berikut:

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan penatausahaan atau pengujian/verifikasi keuangan skpd
- Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi skpd

3) Administrasi umum perangkat daerah

Pelaksanaan Administrasi umum perangkat daerah, menghasilkan kegiatan sebagai berikut:

- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan bahan logistik kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan bahan / material
- Fasilitas kunjungan tamu
- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd

4) Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

Pelaksanaan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah menghasilkan kegiatan sebagai berikut:

- Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

5) Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah

Pelaksanaan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah, menghasilkan kegiatan sebagai berikut:

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

6) Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

Pelaksanaan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, menghasilkan kegiatan sebagai berikut:

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

b) Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

Pada Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, terdiri dari :

- 1) Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan  
Pelaksanaan Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, menghasilkan kegiatan sebagai berikut:

- Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait

- 2) Kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat  
Pelaksanaan Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, menghasilkan kegiatan sebagai berikut:

- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
- Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan non perizinan

- c) Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan

Pada Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, terdiri dari :

- 1) Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa

Pelaksanaan Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa, menghasilkan kegiatan sebagai berikut:

- Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan

- 2) Kegiatan pemberdayaan kelurahan

Pelaksanaan Kegiatan pemberdayaan kelurahan, menghasilkan kegiatan sebagai berikut:

- Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan
- Pemberdayaan masyarakat kelurahan

- d) Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum

Pada Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum, terdiri dari :

- 1) Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

Pelaksanaan Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, menghasilkan kegiatan sebagai berikut:

- Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan

- e) Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

Pada Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, terdiri dari :

- 1) Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa

- Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa

- 2) Indikator Kinerja Kunci

Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Lilirilau dapat di lihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.42**  
**IKK Output dan IKK Outcome**  
**Urusan Penunjang Pemerintahan Transparasi dan Partisipasi Publik**  
**Yang Dilaksanakan Oleh Kecamatan Lilirilau**

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
4.E.1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	100%	Kecamatan Lilirilau	Pelaksanaan Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan pada Kecamatan Lilirilau terdapat pada Program Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) dengan Pagu Anggaran Rp 31.200.000 dan realisasi Anggaran Rp 28.750.000 atau 92,15%

- 3) Prestasi/penghargaan yang diraih  
Tidak ada prestasi yang diraih tahun 2021

#### **Kecamatan Marioriwawo**

- 1) Program Kegiatan

Untuk mendukung pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan pada Transparasi dan Partisipasi Publik, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng menyusun Program Kegiatan pada Kecamatan Marioriwawo, jumlah anggaran Rp. 6.265.738.617 dengan program kegiatan diuraikan sebagai berikut:

- a) Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota

Pada Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota,terdiri dari :

- Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
- Administrasi keuangan perangkat daerah
- Administrasi kepegawaian perangkat daerah
- Administrasi umum perangkat daerah
- Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
- Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
- Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

- b) Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

Pada Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik,terdiri dari :

- Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
- Kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat

- c) Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan

Pada Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan,terdiri dari :

- Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa
  - Kegiatan pemberdayaan kelurahan
- d) Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
- Pada Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum, terdiri dari :
- Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- e) Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
- Pada Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, terdiri dari :
- Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa
- 2) Indikator Kinerja Kunci
- Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Marioriwato dapat di lihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.43**  
**IKK Output dan IKK Outcome**  
**Urusan Penunjang Pemerintahan Transparasi dan Partisipasi Publik**  
**Yang Dilaksanakan Oleh Kecamatan Maririwato**

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
4.E.1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	100%	Kecamatan Marioriwato	Pelaksanaan Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan pada Kecamatan Marioriwato terdapat pada Program Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)

- 3) Prestasi/penghargaan yang diraih
- Tidak ada prestasi yang dirai tahun 2021

### **Kecamatan Marioriawa**

- 1) Program Kegiatan
- Untuk mendukung pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan pada Transparasi dan Partisipasi Publik, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng menyusun Program Kegiatan pada Kecamatan Marioriawa, jumlah anggaran Rp 2.639.191.234 dengan program kegiatan diuraikan sebagai berikut:
- a) Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota
- Pada Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota, terdiri dari :
- Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
  - Administrasi keuangan perangkat daerah
  - Administrasi kepegawaian perangkat daerah
  - Administrasi umum perangkat daerah

- Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
  - Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
  - Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
- b) Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

Pada Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, terdiri dari :

- Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
- Kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat

- c) Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan

Pada Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, terdiri dari :

- Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa
- Kegiatan pemberdayaan kelurahan

- d) Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum

Pada Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum, terdiri dari :

- Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

- e) Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

Pada Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, terdiri dari :

- Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa

## 2) Indikator Kinerja Kunci

Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Urusan Penunjang

Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Marioriawa dapat di lihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.44**  
**IKK Output dan IKK Outcome**  
**Urusan Penunjang Pemerintahan Transparasi dan Partisipasi Publik**  
**Yang Dilaksanakan Oleh Kecamatan Marioriawa**

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
4.E.1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	100%	Kecamatan Marioriawa	Pelaksanaan Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan pada Kecamatan Marrioriawa terdapat pada Program Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) dengan 50 perizinan non usaha dan 150 non perizinan yang diterbitkan. Pagu Anggaran Rp 7.200.000 dan realisasi Anggaran Rp 7.200.000 atau 100%

3) Prestasi/penghargaan yang diraih

Tidak ada prestasi yang diraih tahun 2021

**Kecamatan Ganra**

1) Program Kegiatan

Untuk mendukung pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan pada Transparasi dan Partisipasi Publik, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng menyusun Program Kegiatan pada Kecamatan Ganra jumlah anggaran Rp 2.447.164.301 dengan program kegiatan diuraikan sebagai berikut:

a) Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota

Pada Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota,terdiri dari :

- Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
- Administrasi keuangan perangkat daerah
- Administrasi kepegawaian perangkat daerah
- Administrasi umum perangkat daerah
- Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
- Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
- Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

b) Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

Pada Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik,terdiri dari :

- Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
- Kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat

c) Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan

Pada Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan,terdiri dari :

- Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa

d) Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum

Pada Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum,terdiri dari :

- Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

e) Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

Pada Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa,terdiri dari :

- Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa

2) Indikator Kinerja Kunci

Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Urusan Penunjang

Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Ganra dapat di lihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.45**  
**IKK Output dan IKK Outcome**  
**Urusan Penunjang Pemerintahan Transparasi dan Partisipasi Publik**  
**Yang Dilaksanakan Oleh Kecamatan Ganra**

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
4.E.1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	100%	Kecamatan Ganra	Pelaksanaan Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan pada Kecamatan Ganra terdapat pada Program Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) dengan 150 surat keterangan non izin dan perizinan yang diterbitkan. Pagu Anggaran Rp 21.600.000 dan realisasi Anggaran Rp21.600.000 atau 100%

- 3) Prestasi/penghargaan yang diraih  
Tidak ada prestasi yang dirai tahun 2021

#### **Kecamatan Donri-Donri**

- 1) Program Kegiatan

Untuk mendukung pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan pada Transparasi dan Partisipasi Publik, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng menyusun Program Kegiatan pada Kecamatan Donri-Donri dengan anggaran Rp 2.660.242.234 dan program kegiatan sebagai berikut:

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, kegiatan terdiri dari :

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- b) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, kegiatan terdiri dari :

- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
- c) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, kegiatan terdiri dari :
- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- d) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, kegiatan terdiri dari :
- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- e) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- Pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, kegiatan terdiri dari :
- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

2) Indikator Kinerja Kunci

Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Donri-Donri dapat di lihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.45**  
**IKK Output dan IKK Outcome**  
**Urusan Penunjang Pemerintahan Transparasi dan Partisipasi Publik**  
**Yang Dilaksanakan Oleh Kecamatan Donri-Donri**

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
4.E.1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	100%	Kecamatan Donri-Donri	Pelaksanaan Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan pada Kecamatan Donri-Donri terdapat pada Program Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) dengan 100 perizinan dan non perisinan yang diterbitkan. Pagu Anggaran Rp 16.800.000 dan realisasi Anggaran Rp 16.800.000 atau 100%

3) Prestasi/penghargaan yang diraih

Tidak ada penghargaan pada tahun 2021

### Kecamatan Citta

1) Program Kegiatan

Untuk mendukung pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan pada Transparasi dan Partisipasi Publik, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng menyusun Program Kegiatan pada Kecamatan Citta dengan anggaran Rp 2.133.682.921 dan program kegiatan sebagai berikut:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, kegiatan terdiri dari :

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Adminsitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Negara Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Negara Daerah Penunjang Urusan pemerintahan daerah

b) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, kegiatan terdiri dari :

- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat

c) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, kegiatan terdiri dari :

- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

d) Program Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pada Program Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, kegiatan terdiri dari :

- Koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum

e) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, kegiatan terdiri dari :

- Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa

2) Indikator Kinerja Kunci

Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Citta dapat di lihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.47**  
**IKK Output dan IKK Outcome**  
**Urusan Penunjang Pemerintahan Transparasi dan Partisipasi Publik**  
**Yang Dilaksanakan Oleh Kecamatan Citta**

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
4.E.1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk	100%	Kecamatan Citta	Pelaksanaan Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan pada

	pelayanan			Kecamatan Citta terdapat pada Program Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) dengan Pagu Anggaran Rp 21.600.000 dan realisasi Anggaran Rp 21.600.000 atau 100%
--	-----------	--	--	---

3) Prestasi/penghargaan yang diraih

Tidak ada penghargaan pada tahun 2021

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Soppeng yang merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tidak terdapat Indikator Kinerja Kunci OutCome dan Indikator Kinerja Kunci Outcome, namun sangat mendukung pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan yaitu :

1. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut mempunyai anggaran, program dan kegiatan sebagai berikut :

#### **Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

Dalam mendukung pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng menyusun Program Kegiatan pada Sekretariat DPRD dengan anggaran Rp 28.269.760.127 dan program kegiatan sebagai berikut:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdapat kegiatan sebagai berikut :

- a) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b) Administrasi Keuangan Perangkat daerah
- c) Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah
- d) Administrasi Kepegawaianan Perangkat Daerah
- e) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- f) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
- g) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- h) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- i) Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
- j) Layanan Administrasi DPRD

## 2) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, terdapat kegiatan sebagai berikut :

- a) Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
- b) Pembahasan Kebijakan Anggaran
- c) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
- d) Peningkatan Kapasitas DPRD
- e) Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
- f) Fasilitasi Tugas DPRD

Dari program kegiatan tersebut pada Sekretariat DPRD menghasilkan penetapan Peraturan Daerah sebanyak 10 Perda terdiri dari :

- Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
- Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021–2026
- Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 2021 tentang Kepemudaan
- Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penertiban Ternak Dan Hewan Lair
- Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
- Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Tingkat Ii Soppeng Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum
- Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembangunan Infrastruktur Daerah Sumber Dana Pinjaman Pemerintah Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional Dengan Kontrak Tahun Jamak
- Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
- Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

## **Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**

Dalam mendukung pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng menyusun Program Kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan anggaran Rp 5.068.770.514 dan program kegiatan sebagai berikut:

- 1) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah  
Pada Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, pelaksanaan kegiatan terdiri dari:
  - a) Kegiatan Penyusunan perencanaan dan pendanaan
  - b) Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
  - c) Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah
- 2) Program Koordinasi dan Singkronisasi Pembangunan Daerah  
Pada Program Koordinasi dan Singkronisasi Pembangunan Daerah, pelaksanaan kegiatan terdiri dari:
  - a) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
  - b) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA
  - c) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya
- 3) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah  
Pada Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, pelaksanaan kegiatan terdiri dari:
  - a) Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
  - b) Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi
- 4) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, pelaksanaan kegiatan terdiri dari:
  - a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - c) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - d) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - e) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - f) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dari program kegiatan tersebut pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menghasilkan dokumen :

- Dokumen perencanaan berupa penyusunan RPJMD tahun 2021-2026 dan RKPD tahun 2022
- Dokumen Renstra tahun 2021
- Dokumen Rencana Induk Kelitbang Kabupaten Soppeng 2021-2026

### **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

Dalam mendukung pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng menyusun Program Kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan anggaran Rp 5.906.547.054 dan program kegiatan sebagai berikut:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota  
Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, kegiatan terdiri dari:
  - a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - c) Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - d) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 2) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan  
Pada Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, kegiatan terdiri dari:
  - a) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- 3) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik  
Pada Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, kegiatan terdiri dari:
  - a) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi , Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik
- 4) Program Pemberdayaan dan Pengawas Organisasi Kemasyarakatan  
Pada Program Pemberdayaan dan Pengawas Organisasi Kemasyarakatan, kegiatan terdiri dari:
  - a) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- 5) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya  
Pada Program Pemberdayaan dan Pengawas Organisasi Kemasyarakatan, kegiatan terdiri dari:
  - a) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
- 6) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial  
Pada Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, kegiatan terdiri dari:

- a) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

Dari program kegiatan tersebut pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menghasilkan :

- Tingkat Kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Kewaspadaan Dini dan dalam Penanganan Konflik mencapai 95,57%

### Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah

Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah merupakan pengukuran kinerja pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah sesuai dengan visi misi kepala daerah yang dituangkan pada RPJMD yang dijabarkan tiap tahun pada rencana kerja pemerintahan daerah (RKPD). Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng menyusun rencana strategis pada perangkat daerah sesuai dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Soppeng ditetapkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 yang dijabarkan pada Paraturan Bupati Soppeng Nomor 34 Tahun 2021 Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026 dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 2.48**

#### Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91>	Sangat Tinggi
2	76 < 90	Tinggi
3	66 < 75	Sedang
4	51<65	Rendah
5	< 50	Sangat Rendah

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017.



Secara umum Pemerintah Kabupaten Soppeng telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026. Untuk tahun 2021 telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021 mencakup 11 (sebelas) sasaran dengan 18 (delapan belas) indikator kinerja.

Pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Soppeng mendapatkan berbagai penghargaan dari berbagai kementerian/instansi/lembaga atas pencapaian kinerja yang diterima pada tahun 2021 sampai dengan tanggal pelaporan kinerja diantaranya :

1. Penghargaan opini WTP dari BPK RI Perwakilan Makassar Tahun 2021 atas LKPD Tahun 2020
2. Penghargaan Swasti Saba Wistara untuk Kabupaten Soppeng dari Menteri Kesehatan atas keberhasilan dalam menyelenggarakan Kabupaten /Kota Sehat Tahun 2021 untuk Klasifikasi Taraf Pengembangan berdasarkan Kep.Menkes RI Nomor : HK.01.07/Menkes/6562/2021 tanggal 3 November 2021.



3. Piagam penghargaan Terbaik 2 sebagai Pemerintah Daerah dengan porsi nominal transaksi pendapatan melalui QRIS terbanyak dari Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.



4. Penghargaan kepada Bupati Soppeng Kategori Kepala Daerah Peduli Media dan Pers dari Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) di Makassar, tanggal 25 Maret 2021.



5. Penghargaan Kabupaten Layak Anak Tingkat KLA Pratama Tahun 2021 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI pada tanggal 29 Juli 2021 (virtual zoom).



6. Piagam Penghargaan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) kepada Pemerintah Kabupaten Soppeng untuk Kategori Pendataan Keluarga Dengan Pencapaian 100% Target KK Terdata Tepat Waktu 1 April -31 Mei 2021, tertanggal 2 Juni 2021.



7. Piagam Penghargaan Top 30 Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan untuk Inovasi "PANDU ALAN" dari Dinas TPHTP dan Inovasi "HORE ENGKANI KTPku" dari Dinas Dukcapil di Makassar pada tanggal 6 September 2021.



8. Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2020 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI kepada Pemerintah Kabupaten Soppeng, di Jakarta pada tanggal 23 September 2021.



9. Plakat dan Piagam Penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Soppeng atas keberhasilan dalam menyusun Laporan Keuangan Tahun 2020 dengan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Watampone, pada tanggal 15 Oktober 2021 di Lounge Kantor Bupati Soppeng.



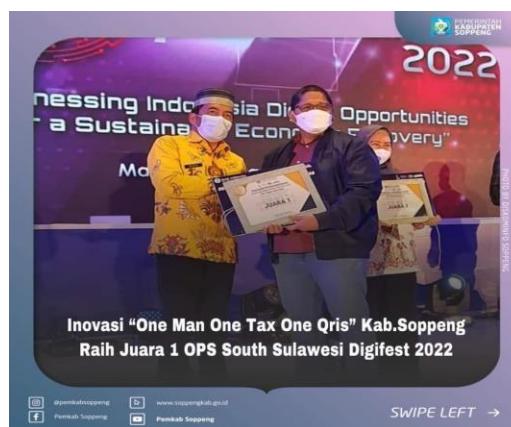
10. Penghargaan Program Kampung Iklim (Proklim) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI pada tanggal 19 Oktober 2021 (virtual zoom) kepada :
  - Desa Ganra, Kecamatan Ganra sebagai Penerima Trofi Proklim Utama;
  - Desa Mattabulu, Kecamatan Lalabata sebagai Penerima Sertifikat Proklim Utama.



11. Piagam Penghargaan sebagai peserta Desa Binaan Kemenparekraf RI dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021 pada tanggal 13 Desember 2021.



12. Juara 1 Lomba One Page Summary (OPS) pada acara South Sulawesi Digital Festival 2022 yang digelar oleh Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulawesi Selatan melalui Inovasi "One Man One Tax One QRIS" yang digagas oleh BPKPD Kab. Soppeng, diterima pada tanggal 24 Maret 2022.



Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam matriks sebagai berikut :

**Tabel 2.49**  
**Capaian Kinerja dan Predikat Kinerja Sasaran Tahun 2021**

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	PREDIKAT
						KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya mutu penerapan standar	1 Nilai rata-rata tingkat	100%	89,28%	89,28	Tinggi

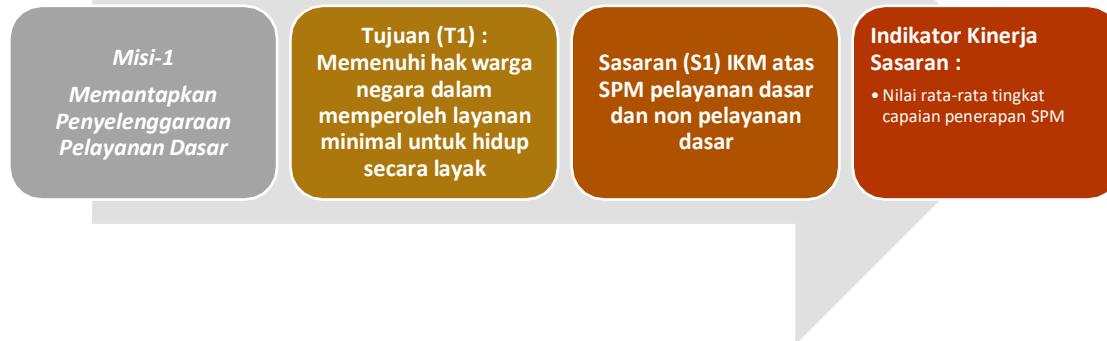
	pelayanan minimal (SPM) untuk pelayanan dasar (S1)	capaian penerapan SPM				
	<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 1</b>			<b>89,28</b>	<b>Tinggi</b>	
2	Meningkatnya mutu pelayanan publik non pelayanan dasar (S2)	2 IKM pelayanan publik non pelayanan dasar	84%	83,83%	99,80	Sangat Tinggi
	<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 2</b>			<b>99,80</b>	<b>Sangat Tinggi</b>	
3	Meningkatnya derajat pendidikan, literasi dan kualitas fisik masyarakat (S3)	3 Indeks Pendidikan	62,34	62,32	99,96	Sangat Tinggi
	<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 3</b>			<b>99,96</b>	<b>Sangat Tinggi</b>	
4	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (S4)	4 Indeks Kesehatan	76,8	76,63	99,78	Sangat Tinggi
	<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 4</b>			<b>99,78</b>	<b>Sangat Tinggi</b>	
5	Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah (S5)	5 Pertumbuhan Ekonomi (%) 6 Tingkat pengangguran terbuka (%)	5,80 4,4	6,15 3,92	106 112,24	Sangat Tinggi
	<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 5</b>			<b>109,12</b>	<b>Sangat Tinggi</b>	
6	Meningkatnya taraf hidup masyarakat lapisan bawah (S6)	7 Angka Kemiskinan (%)	7,15%	7,53%	94,95	Sangat Tinggi
	<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 6</b>			<b>94,95</b>	<b>Sangat Tinggi</b>	
7	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah (S7)	8 Indeks Infrastruktur Daerah	61,63	69,45	112,68	Sangat Tinggi
	<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 7</b>			<b>112,68</b>	<b>Sangat Tinggi</b>	
8	Meningkatnya fasilitas ekonomi wilayah (S8)	9 Nilai PDRB sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta Jasa Lainnya (milyar)	280,213	275,5	98,32	Sangat Tinggi
	<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 8</b>			<b>98,32</b>	<b>Sangat Tinggi</b>	
9	Terpeliharanya situasi aman dan damai dalam masyarakat (S9)	10 Angka Kriminalitas (Kasus)	86	92	93,94	Sangat Tinggi
	<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 9</b>			<b>93,94</b>	<b>Sangat Tinggi</b>	
10	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah serta kapasitas inovasi daerah (S10)	11 Nilai LPPD (Skor/Status Kinerja) 12 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah 13 Opini Laporan Keuangan 14 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	3,9/Tinggi B WTP 60 (B)	3,7/Tinggi A WTP 59,18	94,87 100 100 98,63	Sangat Tinggi

		15 Indek Inovasi Daerah	30,00-35,00 (inovatif)	35,48 (inovatif)	100	Sangat Tinggi
		<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 10</b>				
11	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan bencana (S11)	16 Indeks Risiko Bencana	131,20 (sedang)	131,20 (sedang)	100	Sangat Tinggi
		17 Potensi Penurunan Emisi GRK (Ton Co2)	36238 Ton Co2	36.240,33	99,99	Sangat Tinggi
		18 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLH)	65,83 poin	69,52	105,6	Sangat Tinggi
		<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 11</b>				
					<b>101,86</b>	<b>Sangat Tinggi</b>

Analisis terhadap capaian kinerja masing-masing sasaran yang diukur dari tingkat capaian indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

### Sasaran 1

- Meningkatnya mutu penerapan standar pelayanan minimal (SPM) untuk pelayanan dasar (S1)**



Berikut Hasil Pengukuran Capaian Kinerja sasaran pada tabel berikut :

**Tabel 2.50**  
**Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1**

Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2020	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2021			Target Akhir Kinerja RPJMD 2026
				Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	
Nilai rata-rata tingkat capaian penerapan SPM	79,72	-	-	100	89,28	89,28	100
Rata-Rata Capaian Sasaran 1					89,28		

❖ **Nilai rata-rata tingkat capaian penerapan SPM**

Pada tahun 2021 nilai rata-rata tingkat capaian penerapan SPM adalah sebesar 89,28%, masih dibawah target yang ditetapkan tahun 2021 dan akhir tahun RPJMD yaitu 100% atau capaian 89,28%, namun lebih tinggi dari kondisi awal pada tahun 2020 yaitu 79,72%.

Indikator ini dihitung sebagai berikut :

$$\sum \text{Capaian SPM 6 Bidang SPM} \times 100\%$$

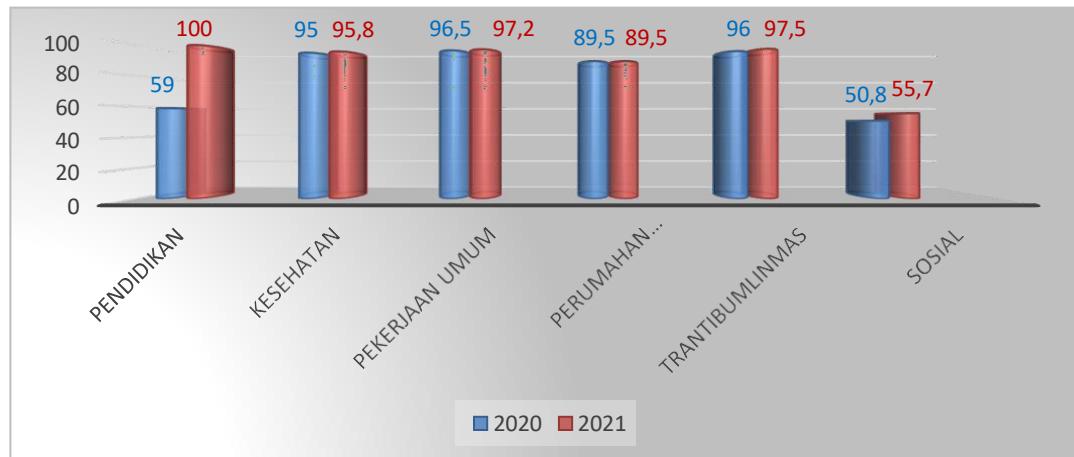
6

Adapun SPM 6 bidang urusan yaitu : Sosial, Kesehatan, Pendidikan, Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman serta Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Walaupun belum mencapai target pada tahun 2021 namun nilai rata-rata tingkat capaian penerapan SPM tetap patut disyukuri.

**Grafik 2.1**

**Trend tingkat capaian penerapan SPM per urusan kurun waktu 2020-2021**



Faktor keberhasilan/kegagalan yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja adalah:

- ❖ Masyarakat saat ini bukan hanya mempersoalkan terpenuhi atau tidaknya kebutuhan akan pelayanan publik, akan tetapi sudah mempertanyakan mutu atau kualitas layanan publik yang mereka terima dari pemerintah.

Solusi/Alternatif Pemecahan Masalah :

- ❖ Salah satu upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik tersebut adalah dengan melakukan evaluasi secara berkala untuk menilai kinerja pelayanan yang disediakan oleh berbagai Unit Organisasi/Perangkat Daerah.

Dari sisi efektifitas penggunaan sumber daya (anggaran) terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.51**  
**Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran**

Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Rata-rata capaian kinerja sasaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
Meningkatnya mutu penerapan standar pelayanan minimal (SPM) untuk pelayanan dasar (S1)	270.434.279.666	226.402.408.240,37	83,72	89,28	5,56

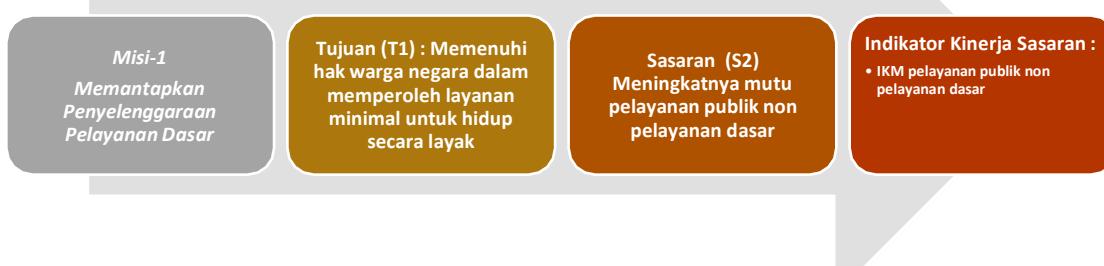
Untuk mendukung pencapaian sasaran dilaksanakan melalui :

- 1) Program Pengelolaan Pendidikan
- 2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- 3) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- 4) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- 5) Program Pengembangan Perumahan
- 6) Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 7) Program Penanggulangan Bencana
- 8) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
- 9) Program Rehabilitasi Sosial
- 10) Program Penanganan Bencana

Total anggaran yang dialokasikan dalam APBD Tahun 2021 sebesar Rp. 270.434.279.666,- terealisasi sebesar Rp.226.402.408.240,37,- atau 83,72%, Apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran yang mencapai 84,65% maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) adalah 5,56%.

## Sasaran 2

- Meningkatnya mutu pelayanan publik non pelayanan dasar (S2)



**Tabel 2.52 Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2**

Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2020	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2021			Target Akhir Kinerja RPJMD 2026
				Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	
IKM pelayanan publik non pelayanan dasar	83,84	-	-	84	83,83	99,80	88
Rata-Rata Capaian Sasaran 2					99,80		

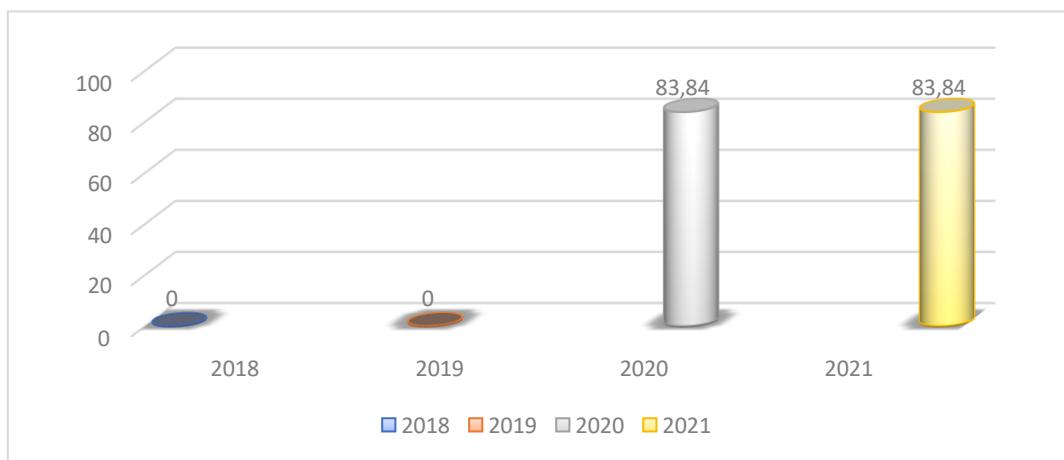
❖ **IKM pelayanan publik non pelayanan dasar**

IKM pelayanan publik non pelayanan dasar adalah sebesar 83,83%, masih dibawah target yang ditetapkan yaitu 84% atau capaian 99,80%, realisasi tersebut sedikit lebih rendah dari kondisi awal pada tahun 2020 yaitu 83,84%.



No.	UNSUR PELAYANAN			
U1	Persyaratan		3,330	B
U2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur		3,314	B
U3	Waktu Penyelesaian		3,115	B
U4	Biaya/Tarif		3,912	A
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan		3,307	B
U6	Kompetensi Pelaksana		3,317	B
U7	Perilaku Pelaksana		3,358	B
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan		3,306	B
U9	Sarana dan prasarana		3,222	B
83,83				
A (Sangat Baik)		: 88,31- 100,00	88,31	100
B (Baik)		: 76,61-88,30	76,61	88,3
C (Kurang Baik)		: 65,00-76,60	65	76,6
D (Tidak Baik)		: 25,00- 64,99	25	64,99

**Grafik 3.1 IKM pelayanan publik non pelayanan dasar tahun 2018-2021**



Faktor keberhasilan/kegagalan yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja adalah:

- ❖ Masyarakat saat ini bukan hanya mempersoalkan terpenuhi atau tidaknya kebutuhan akan pelayanan publik, akan tetapi sudah mempertanyakan mutu atau kualitas layanan publik yang mereka terima dari pemerintah.

Solusi/Alternatif Pemecahan Masalah :

- ❖ Melakukan evaluasi secara berkala untuk menilai kinerja pelayanan yang disediakan oleh berbagai Unit Organisasi/Perangkat Daerah.

Dari sisi efektifitas penggunaan sumber daya (anggaran) terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.53 Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran**

Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Rata-rata capaian kinerja sasaran (%)	Tingkat efisiensi (%)
Meningkatnya mutu pelayanan publik non pelayanan dasar (S2)	630.649.800	582.944.800	92,43	99,80	7,37

Untuk mendukung pencapaian sasaran meningkatnya mutu pelayanan publik non pelayanan dasar dilaksanakan melalui :

- 1) Program Pendaftaran Penduduk
- 2) Program Pencatatan Sipil
- 3) Program Pelayanan Penanaman Modal
- 4) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Total anggaran yang dialokasikan dalam APBD Tahun 2021 sebesar Rp.630.649.800,- terealisasi sebesar Rp.582.944.800,- atau 92,43%, dengan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya 7,37%.

### Sasaran 3

- **Meningkatnya derajat pendidikan, literasi dan kualitas fisik masyarakat (S3)**



Berikut Hasil Pengukuran Capaian Kinerja sasaran pada tabel berikut :

**Tabel 2.54 Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 3**

Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2020	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2021			Target Akhir Kinerja RPJMD 2026
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
Indeks Pendidikan	61,87	60,35	61,16	62,34	62,32	99,96	68,6
Rata-Rata Capaian Sasaran 3				99,96			

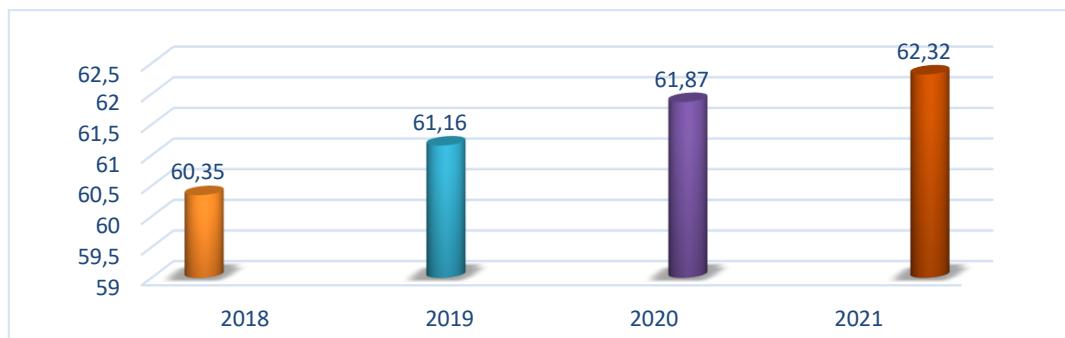
#### ❖ *Indeks Pendidikan*

Indeks Pendidikan adalah komponen yang menyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikator pembentuk yang diukur dalam Indeks Pendidikan adalah rata-rata lama sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS).

Pada tahun 2021 realisasi indikator kinerja Indeks Pendidikan sebesar 62,32 dari target 62,34 atau rata-rata capaian sasaran sebesar 99,96%. Rata-rata lama sekolah (RLS) yaitu 7,82 dan Harapan Lama Sekolah (HLS) yaitu 13,05. Realisasi kinerja indikator ini menunjukkan trend yang selalu meningkat dilihat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021.

Sementara itu bila dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD Tahun 2021 sebesar 68,6, hal ini berarti upaya yang dilakukan sudah berada pada jalur yang tepat.

**Grafik 3.2 Indeks Pendidikan Tahun 2018 - 2021**



Faktor penyebab keberhasilan/kegagalan yang berpengaruh terdapat pencapaian kinerja sasaran adalah :

- ❖ Peningkatan kualitas guru dengan kualifikasi minimal S1
- ❖ Masih terdapat beberapa sekolah dengan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran yang tidak layak/tidak ada.

Solusi/Alternatif Pemecahan Masalah :

- ❖ Pemenuhan Kualifikasi Minimal Guru S.1 dan Memperoleh Sertifikat
- ❖ Peningkatan Sumber Daya Kepala Sekolah dan Para Sekolah Penggerak
- ❖ Pemenuhan Pembiayaan Pendidikan Dasar

Dari sisi efektifitas penggunaan sumber daya (anggaran) terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.55 Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran**

Sasaran	Anggaran	Realisasi	Serapan Anggaran (%)	Rata-rata capaian kinerja sasaran (%)	Tingkat efisiensi (%)
Meningkatnya derajat pendidikan, literasi dan kualitas fisik masyarakat	1.073.826.950	936.114.050	87,17	99,96	12,79

Adapun Program yang mendukung pencapaian sasaran adalah :

- 1) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- 2) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
- 3) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Total anggaran yang dialokasikan dalam APBD Tahun 2021 sebesar Rp. 1.073.826.950,- terelisasi sebesar Rp. 936.114.050,- atau 87,17%, bila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran yang mencapai 99,96%, hal ini menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) sebesar 12,79%.

#### **Sasaran 4**

- Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (S4)



Berikut Hasil Pengukuran Capaian Kinerja sasaran pada tabel berikut :

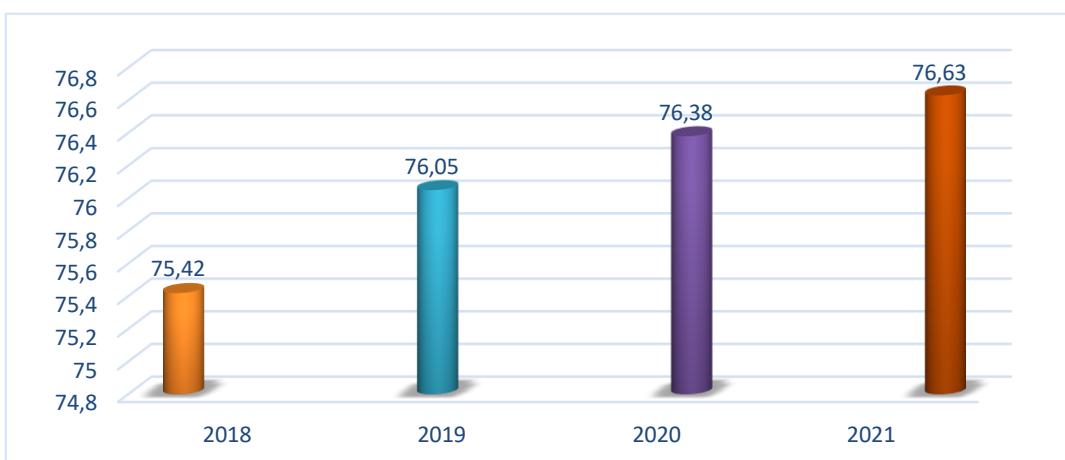
**Tabel 2.56 Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 4**

Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2020	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2021			Target Akhir Kinerja RPJMD 2026
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
Indeks Kesehatan	76,38	75,42	76,05	76,8	76,63	99,78	79
Rata-Rata Capaian Sasaran 4					99,78		

❖ **Indeks Kesehatan**

Pada tahun 2021 Indeks Kesehatan sebesar 76,63 poin atau sedikit lebih rendah dibandingkan target yaitu 76,8 poin sehingga capaiannya sebesar 99,78%. Bila dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD Tahun 2021 sebesar 79% maka Indeks Kesehatan masih perlu upaya keras untuk mencapai target tersebut.

**Grafik 3.3. Indeks Kesehatan Tahun 2018 - 2021**



Faktor keberhasilan/kegagalan yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja sasaran adalah :

- ❖ Indeks kesehatan ditentukan secara langsung oleh angka harapan hidup. Indeks kesehatan kabupaten soppeng pada tahun 2021 meningkat dari tahun 2020, namun masih belum memenuhi target RPJMD yaitu sebesar 76,8 poin. Faktor yang mempengaruhi antara lain adanya pandemi covid-19 pada tahun 2020 dan 2021 yang secara langsung memengaruhi angka kesakitan masyarakat maupun faktor-faktor lain yang mengakibatkan laju peningkatan angka harapan hidup belum maksimal sesuai target.

Solusi/ Alternatif penyelesaian masalah :

- ❖ Meningkatkan kerja sama lintas sektor antara pemangku kepentingan yang mendukung peningkatan angka harapan hidup sehingga indeks kesehatan dapat mencapai target di tahun berikutnya.

Dari sisi efektifitas penggunaan sumber daya (anggaran) terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.57**  
**Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran**

Sasaran	Anggaran	Realisasi	Serapan Anggaran (%)	Rata-rata capaian kinerja sasaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (S4)	152.245.965.812	118.902.591.021,37	78,10	99,78	21,68

Adapun Program yang mendukung pencapaian sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat adalah :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Total anggaran yang dialokasikan dalam APBD Tahun 2021 sebesar Rp152.245.965.812,- dan terealisasi sebesar Rp118.902.591.021,37,- atau 78,10%, bila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran yang mencapai 99,78% maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) sebesar 21,68%.

## Sasaran 5

### • Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah (S5)

*Misi-2  
Memantapkan  
Perwujudan  
Kesejahteraan  
Masyarakat*

*Tujuan (T3) :  
Meningkatkan  
produktivitas  
berekonominan dan  
pendapatan masyarakat  
secara merata*

*Sasaran (S5)  
Meningkatnya  
produktivitas  
perekonomian daerah*

**Indikator Kinerja Sasaran:**  
 • Pertumbuhan ekonomi (%)  
 • Tingkat pengangguran terbuka (%)

Berikut Hasil Pengukuran Capaian Kinerja sasaran pada tabel berikut :

**Tabel 2.58. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 5**

Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2020	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2021			Target Akhir Kinerja RPJMD 2026
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
Pertumbuhan ekonomi (%)	2,19	8,11	7,16	5,80	6,15	106	6,82
Tingkat pengangguran terbuka (%)	4,42	2,36	3,24	4,40	3,92	112,24	3,70
Rata-Rata Capaian Sasaran 5						109,12	

❖ ***Pertumbuhan ekonomi***

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Soppeng. PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Soppeng tahun 2021

sebesar 12.426,78 miliar rupiah. PDRB atas dasar harga konstan tahun dasar 2010 Kabupaten Soppeng tahun 2021 sebesar 7.585,98 miliar rupiah.

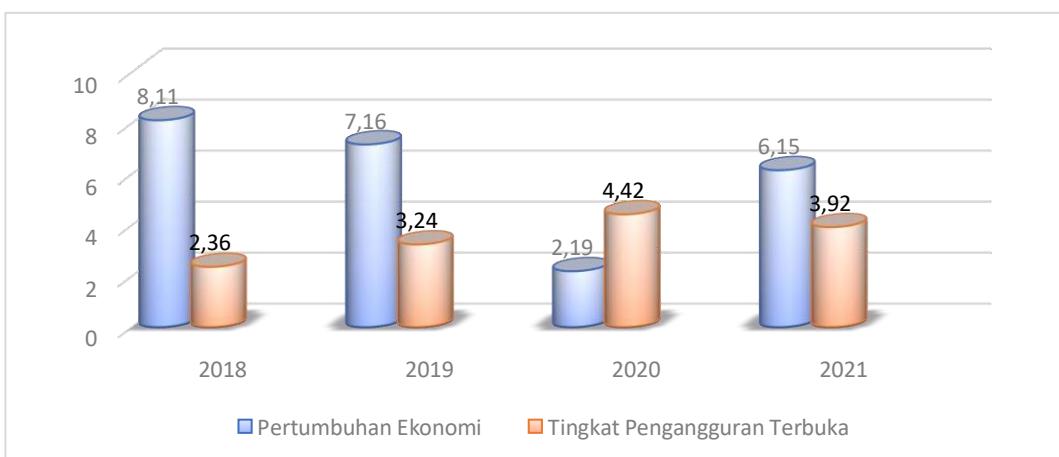
Untuk pertumbuhan ekonomi, pada tahun 2021 Kabupaten Soppeng mencapai 6,15 persen atau termasuk 5 besar kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi tercepat pada tahun 2021. Jika dibandingkan dengan target indikator pertumbuhan ekonomi 5,80% maka capaian indikator ini sebesar 106%. Indikator ini menunjukkan capaian yang cukup memuaskan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yang hanya sebesar 2,19% serta bila dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD yaitu 6,82%. Indikator tersebut sudah tergolong dalam kondisi yang baik karena sudah mengalami peningkatan signifikan.

❖ ***Tingkat pengangguran terbuka***

Jumlah populasi Kab. Soppeng pada tahun 2021 sebanyak 235.574 jiwa, ada sebanyak 108.914 angkatan kerja usia 15 tahun ke atas dan 4.269 penduduk usia 15 tahun ke atas yang merupakan pengangguran terbuka.

Pada tahun 2021, tingkat pengangguran terbuka yaitu 3,92 yang menunjukkan perkembangan yang cukup baik bila dibandingkan dengan target tahun 2021 yaitu 4,40% atau capaian 112,24%. Sementara bila dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD, pencapaian pada tahun 2021 sudah tergolong baik karena sudah mendekati persentase target akhir 3,70%.

**Grafik 3.4**  
**Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2018-2021**



Faktor keberhasilan/kegagalan yang berpengaruh terhadap pencapaian target kinerja sasaran adalah :

- ❖ Adanya kelompok penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, kelompok penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, serta kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja, juga terdapat penduduk yang mendapatkan Kartu Pencari Kerja namun setelah mulai bekerja tidak melaporkan ke Dinas DPMPTSP-Nakertrans bahwa sudah mulai bekerja sehingga semua kelompok tersebut masih dihitung sebagai pengangguran terbuka.
- ❖ Laju pertumbuhan PDRB pada tahun 2021 sebesar 6,15 persen dimana kategori yang memiliki laju pertumbuhan paling tinggi yaitu kategori lapangan usaha penyedia akomodasi dan makan minum tumbuh sebesar 12,72 persen diikuti lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 12,06 persen.

Solusi/Alternatif Pemecahan Masalah :

- ❖ Memperbaiki sistem pencatatan pencari kerja berbasis elektronik yang mudah, murah dan cepat;
- ❖ Mendorong pelaksanaan event-event olahraga, seni, pariwisata dan berbagai sektor lainnya dengan tujuan meningkatkan perputaran ekonomi yang memiliki multiplier effect terhadap perekonomian.

Dari sisi efektifitas penggunaan sumber daya (anggaran) terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.59**  
**Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran**

Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Rata-rata capaian kinerja sasaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah	22.366.767.984	11.792.053.064	52,72	109,12	56,4

Adapun Program yang mendukung pencapaian sasaran adalah :

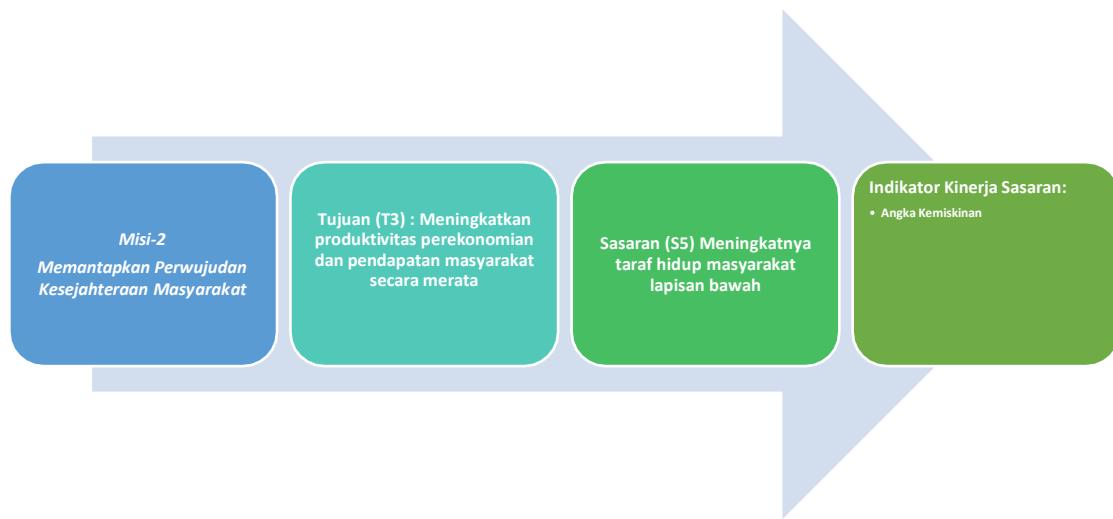
1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
2. Program Pengembangan UMKM

3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
4. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
5. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
6. Program Penyuluhan Pertanian
7. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
8. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
9. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Total anggaran yang dialokasikan dalam APBD Tahun 2021 sebesar Rp22.366.767.984,- terealisasi sebesar Rp11.792.053.064,- atau 52,72%, bila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran yang mencapai 109,12% maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) sebesar 56,4%.

## Sasaran 6

- Meningkatnya taraf hidup masyarakat lapisan bawah (S6)



Berikut Hasil Pengukuran Capaian Kinerja sasaran pada tabel berikut :

**Tabel 2.60 Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 6**

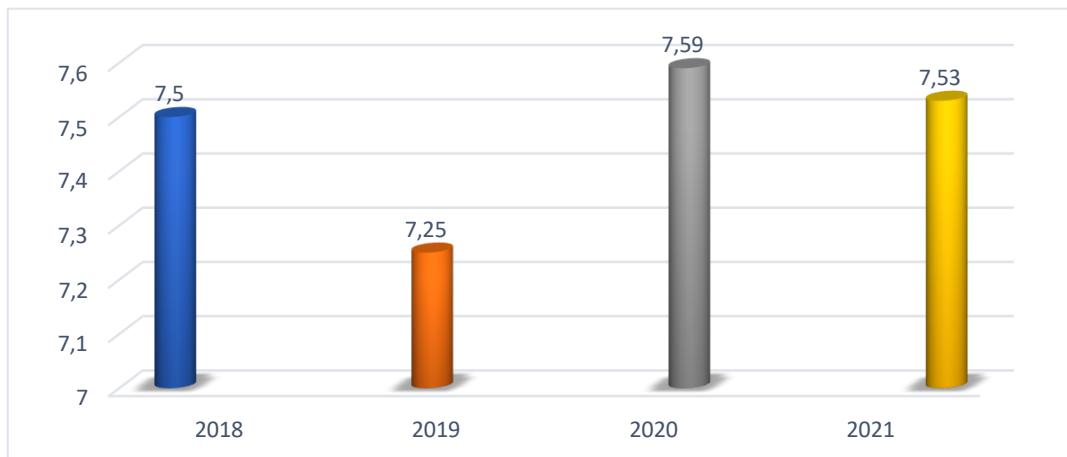
Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2020	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2021			Target Akhir Kinerja RPJMD 2026
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
Angka Kemiskinan (%)	7,59	7.5	7.25	7,15	7,53	94,95	6,13
Rata-Rata Capaian Sasaran 6						94.95	

➤ **Angka Kemiskinan**

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2021 sebanyak 17,27 (ribu) dari jumlah penduduk/populasi Kab. Soppeng sebanyak 235,574 (ribu).

Persentase angka kemiskinan di Kabupaten Soppeng pada tahun 2021 mencapai 7,53% atau tidak mencapai target sebesar 7,15%. Angka kemiskinan tahun 2021 lebih tinggi dibanding tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar 7,25% dan 7,5%. Sementara bila dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD Tahun 2021 sebesar 6,13%, maka diperlukan kerja keras dan upaya bersama untuk mencapai target akhir RPJMD.

**Grafik 2.5 Angka Kemiskinan Tahun 2018-2021**



Faktor penyebab keberhasilan/kegagalan yang berpengaruh terhadap pencapaian target kinerja sasaran adalah :

- ❖ Meningkatnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang belum tertangani dan meningkatnya data fakir miskin serta terbatasnya anggaran bantuan sosial APBN dan APBD atau sumber lainnya.

Solusi/alternatif Pemecahan Masalah

- ❖ Perlunya pemutakhiran data penduduk miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial, maka perlu adanya peningkatan kapasitas potensi sumber kesejahteraan sosial dan anggaran untuk kegiatan masyarakat.

Dari sisi efektifitas penggunaan sumber daya (anggaran) terlihat pada tabel berikut :

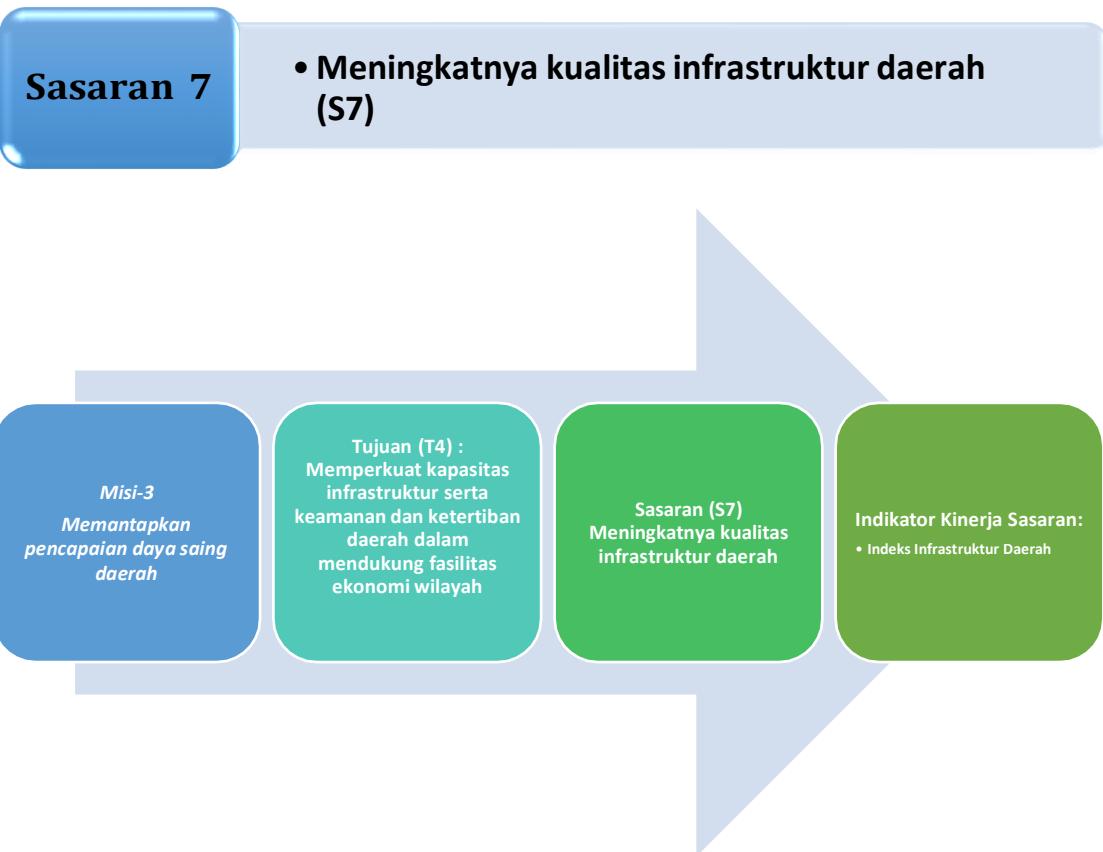
**Tabel 2.61 Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran**

No.	Sasaran	Anggaran	Realisasi	Serapan Anggaran (%)	Rata-rata capaian kinerja sasaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1	Meningkatnya taraf hidup masyarakat lapisan bawah	144.954.600.597	113.744.438.343,37	78,47	94,95	16,48

Program yang mendukung pencapaian sasaran yaitu :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
2. Program Pemberdayaan Sosial
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
4. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Total anggaran yang dialokasikan dalam APBD Tahun 2021 sebesar Rp. 144.954.600.597,- terealisasi sebesar Rp113.744.438.343,37,- atau 78,47%, bila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran yang mencapai 94,95% maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) sebesar 16.48%.



Hasil Pengukuran Capaian Kinerja sasaran tersebut disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 2.62**  
**Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 7**

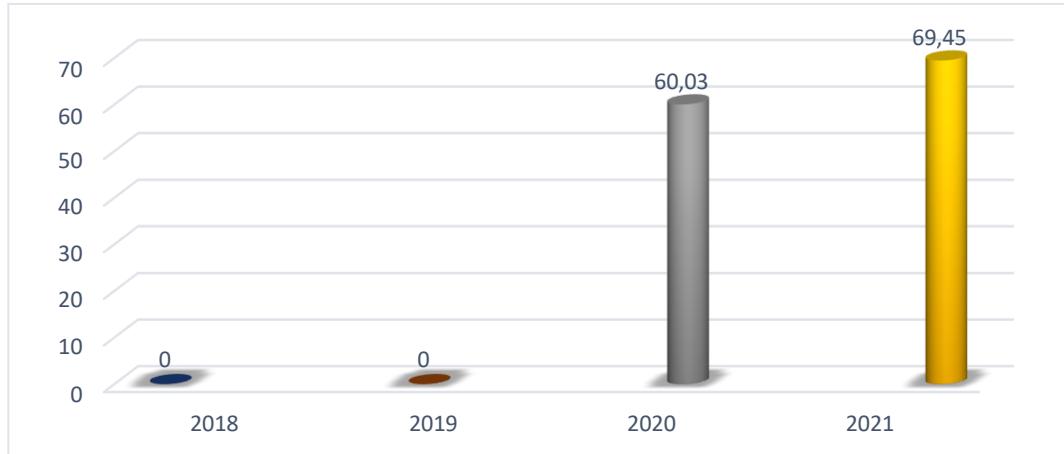
Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2020	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2021			Target Akhir Kinerja RPJMD 2026
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
Indeks Infrastruktur Daerah	60,03	-	-	61,63	69,45	112,68	71,35
Rata-Rata Capaian Sasaran 7						112,68	

➤ **Indeks Infrastruktur Daerah**

Indeks infrastruktur daerah tahun 2021 ditargetkan 61,63, namun dapat terealisasi sebesar 69,45 atau capaian kinerja sasaran sebesar 112,68. Sementara bila dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD Tahun 2026 yang ditargetkan sebesar 71,35, maka capaian kinerja pada tahun 2021 menunjukkan kinerja yang sangat baik.

**Grafik 2.6**

**Indeks Infrastruktur Daerah Tahun 2018-2021**



Faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan/kegagalan pencapaian target kinerja sasaran adalah :

- ❖ Beberapa sektor pembangunan yang menunjang pencapaian target infrastruktur daerah terlaksana dengan baik

Solusi/alternatif pemecahan masalah :

- ❖ Semua sektor pembangunan perlu selalu menjadi perhatian.

Dari sisi efektifitas penggunaan sumber daya (anggaran) terlihat pada tabel berikut :

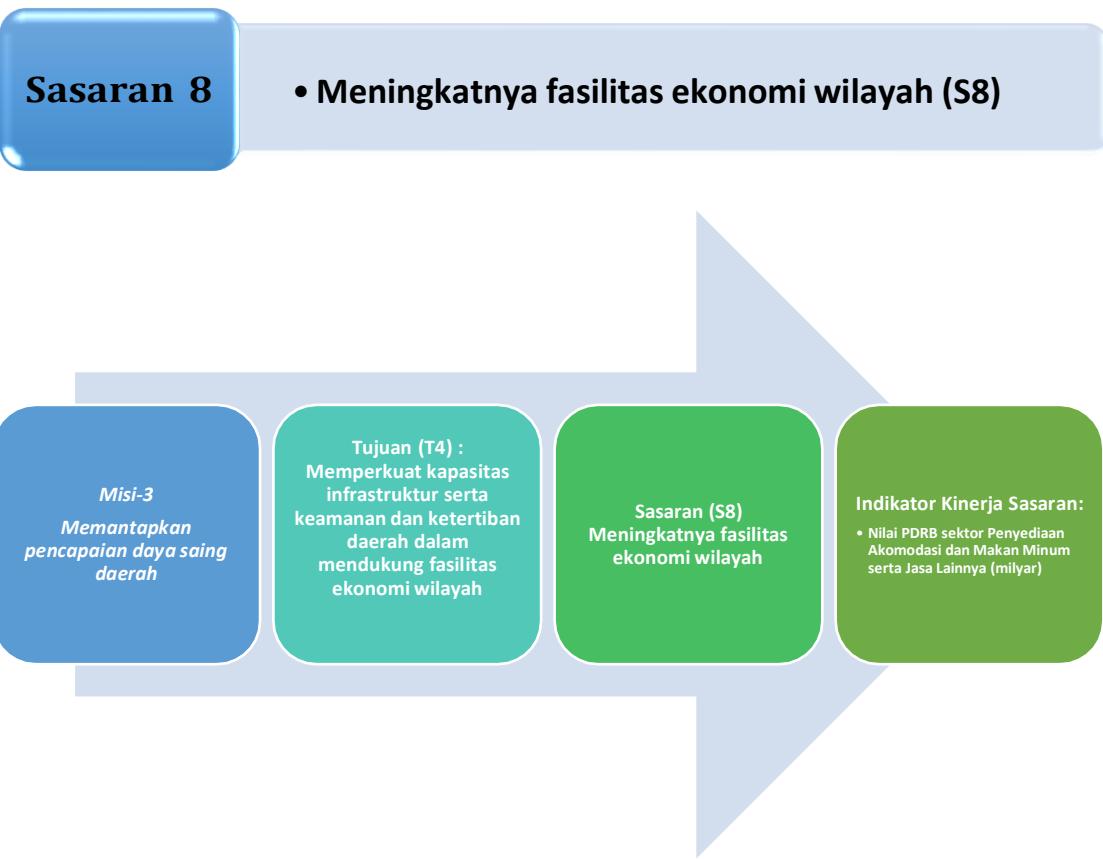
**Tabel 2.63**  
**Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran**

Sasaran	Anggaran	Realisasi	Serapan Anggaran (%)	Rata-rata capaian kinerja sasaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
meningkatnya kualitas infrastruktur daerah (S7)	101.700.027.429	48.658.708.362	47,85	112,68	64,83

Adapun Program yang mendukung pencapaian sasaran 7 yaitu :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
2. Program Penyelenggaraan Jalan
3. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Total anggaran yang dialokasikan dalam APBD Tahun 2021 sebesar Rp.101.700.027.429,- terealisasi sebesar Rp48.658.708.362,- atau 47,85%, bila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran yaitu 112,68% maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) sebesar 2,35.



**Tabel 2.64 Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 8**

Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2020	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2021			Target Akhir Kinerja RPJMD 2026
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
Nilai PDRB sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta Jasa Lainnya (miliar)	246,24	-	-	280,2	275,5	98,32	385,5
Rata-Rata Capaian Sasaran 8					98,32		

➤ **Nilai PDRB sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta Jasa Lainnya (milyar)**

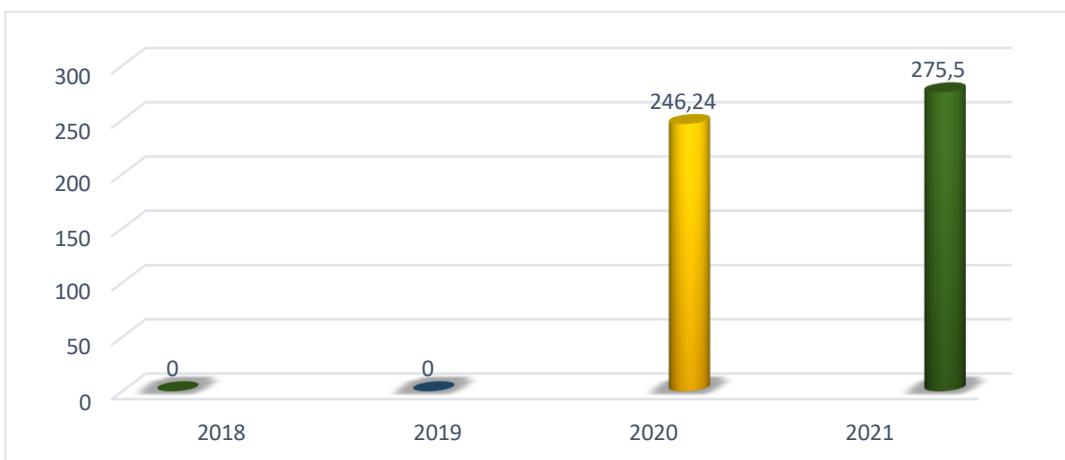
Laju pertumbuhan PDRB pada tahun 2021 sebesar 6,15% dimana kategori yang memiliki laju pertumbuhan paling tinggi yaitu kategori lapangan usaha penyedia akomodasi dan makan minum tumbuh sebesar 12,72% diikuti lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 12,06%.

Nilai PDRB sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tahun 2021 sebesar Rp.186,67 (milyar) sedangkan Jasa Lainnya sebesar Rp.88,83 (milyar) atau jumlah sebesar Rp.275,5 (milyar), realisasi tersebut mendekati target yang ditetapkan tahun 2021 yaitu sebesar Rp.280,2 (milyar) atau capaian sebesar 98,32%.

Sementara itu bila dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD Tahun 2026 sebesar Rp.385,5 (milyar) hal ini berarti pencapaian indikator kinerja ini pada tahun 2021 masih berjalan sesuai perencanaan.

**Grafik 3.7 Nilai PDRB sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta Jasa Lainnya (milyar)**

**2018-2021**



Faktor penyebab keberhasilan/kegagalan terhadap pencapaian target kinerja sasaran adalah :

- ❖ Adanya pusat kuliner UMKM baru di lokasi strategis yang terintegrasi dengan obyek hiburan/pariwisata
- ❖ Revitalisasi/rehabilitasi sarana dan prasarana perdagangan tidak seluruhnya dapat terealisasi.

Saran/alternatif pemecahan masalah :

- ❖ Optimalisasi revitalisasi/rehabilitasi sarana dan prasarana perdagangan melalui skema APBN dan APBD.
- ❖ Menciptakan kegiatan/event pariwisata, olahraga, seni dan budaya yang menarik banyak orang.

Dari sisi efektifitas penggunaan sumber daya (anggaran) terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.65**  
**Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran**

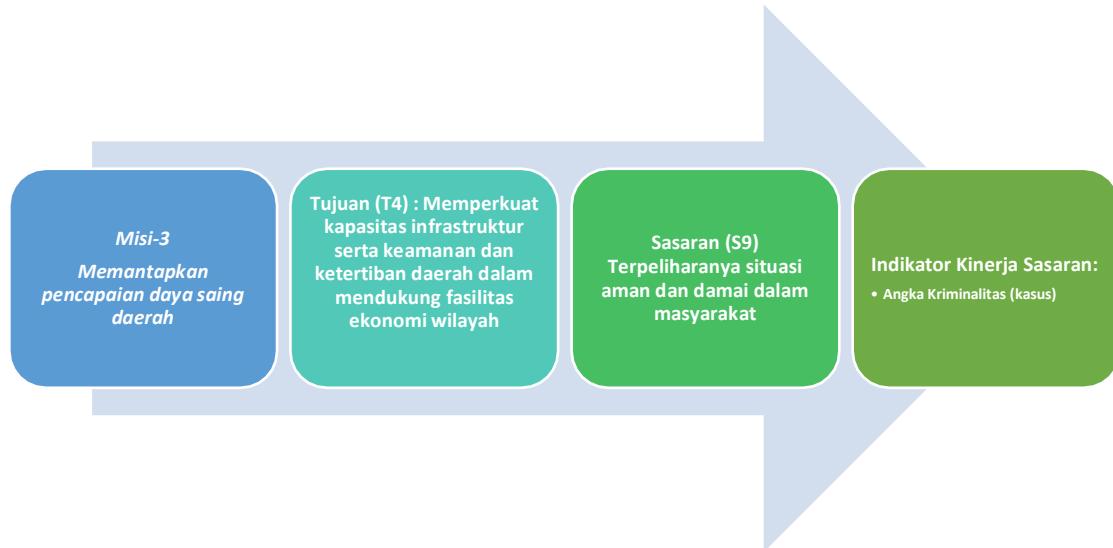
Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Rata-rata capaian kinerja sasaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
Meningkatnya fasilitas ekonomi wilayah	451.617.299	443.982.392	98,31	98,32	0,1

Adapun Program yang mendukung pencapaian sasaran adalah Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata.

Total anggaran yang dialokasikan dalam APBD Tahun 2021 sebesar Rp451.617.299,- terealisasi sebesar Rp443.982.392,- atau 98,31%, bila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran yang mencapai 98,32% maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) adalah 0,1%.

## Sasaran 9

- Terpeliharanya situasi aman dan damai dalam masyarakat (S9)



Berikut hasil Pengukuran Capaian Kinerja sasaran tersaji pada tabel berikut :

**Tabel 2.66 Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 9**

Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2020	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2021			Target Akhir Kinerja RPJMD 2026
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
Angka Kriminalitas (kasus)	86	-	-	86	92	93,47	60
Rata-Rata Capaian Sasaran 9					93,47		

➤ **Angka kriminalitas**

Angka kriminalitas adalah jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terjadi selama 1 (satu) tahun. Angka kriminalitas ini merupakan gabungan dari laporan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dari 8 (delapan) kecamatan dan laporan yang diterima di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Jenis gangguan yang terjadi selama tahun 2021 dapat dirinci sebagai berikut :

NO	JENIS KEJADIAN	JUMLAH KASUS
1	PENCURIAN	10
2	PERAMPOKAN	-
3	PEMERKOSAAN	-
4	PENGAMANAN	28
5	PENERTIBAN	3
6	PATROLI WILAYAH	18
7	OPERASI PROTOKOL KESEHATAN	15
8	BONGKAR ATM	-
9	PEMBUNUHAN	-
10	PERJUDIAN	1
11	PERSELINGKUHAN	-
12	PENGGELAPAN	-
13	PENEMUAN MAYAT	1
14	PELANGGARAN IZIN BANGUNAN	-
15	PERSELISIHAN	-
16	KEBAKARAN	4
17	SENGKETA TANAH	5
18	ANGING PUTING BELIUNG	3
19	BANJIR	4
<b>JUMLAH TOTAL KASUS</b>		<b>92</b>

Faktor keberhasilan/kegagalan yang berpengaruh terhadap pencapaian target kinerja sasaran adalah :

- ❖ Gencarnya dilaksanakan Operasi Penegakan Protokol Kesehatan bekerjasama dengan TNI/Polri, Dinas Kesehatan dan Dinas Perhubungan

Solusi/Alternatif pemecahan Masalah :

- ❖ Meningkatkan koordinasi dengan pihak Pemerintah Kecamatan, Kelurahan dan Desa untuk mencegah gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Dari sisi efektifitas penggunaan sumber daya (anggaran) terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.67 Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran**

Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Rata-rata capaian kinerja sasaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
Terpeliharanya situasi aman dan damai dalam masyarakat	1.416.392.000	1.401.911.570	98,98	93,47	-5,51

Adapun Program yang mendukung pencapaian sasaran adalah :

1. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

2. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Total anggaran yang dialokasikan dalam APBD Tahun 2021 sebesar Rp1.416.392.000,- terealisasi sebesar Rp1.401.911.570,- atau 98,98%, bila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran yang mencapai 93,47% maka terjadi inefisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) sebesar -5,51%.



Hasil Pengukuran Capaian Kinerja sasaran tersaji pada tabel berikut :

**Tabel 2.68**  
**Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 10**

Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2020	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2021			Target Akhir Kinerja RPJMD 2026
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
Nilai LPPD (Skor/Status Kinerja)	3,7/Tinggi	-	-	3,9/Tinggi	3,7/Tinggi	94,87	4,4/ Sangat tinggi
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	C	-	-	B	A	100	A
Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100	WTP

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	59,18 (CC)	58,23 (CC)	58,97 (CC)	60 (B)	59,18 (CC)	98,63	65 (B)
Indeks Inovasi Daerah	461 (kurang inovatif)	-	-	30,00-35,00 (inovatif)	35,48 (inovatif)	100	60,00 – 65,00 (sangat inovatif)
Rata-Rata Capaian Sasaran 10					98,70		

➤ ***Nilai LPPD***

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, laporan ini menggambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh Pemerintah Daerah yaitu Indikator Kinerja Kunci (IKK). Pengukuran yang dilakukan untuk nilai LPPD menggunakan tahun n-1, hal ini disebabkan Tahun 2021 nilai LPPD masih menunggu publikasi hasil penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dari Tim EPPD Provinsi Sulawesi Selatan dan Tim Nasional EPPD Kemendagri. Sedangkan untuk tahun 2020 nilai LPPD yaitu 3,7 dengan status kinerja “TINGGI”.

➤ ***Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah***

Terdapat setidaknya 6 (enam) dimensi dalam pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah diantaranya kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, transparansi pengelolaan keuangan daerah, penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah serta opini BPK atas LKPD.

Indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Kabupaten Soppeng yang berada pada Kemampuan Keuangan Klaster Rendah pada tahun 2021 memperoleh skor 80,74 kategori “**baik**” atau **nilai A**, untuk hasil pengukuran tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2806/XII/TAHUN 2021 tentang Penetapan Hasil Uji Coba Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2020 tanggal 24 Desember 2021. Skor ini merupakan yang tertinggi di Sulawesi Selatan di semua kategori klaster.

➤ ***Opini Laporan Keuangan***

Pengukuran yang dilakukan untuk opini laporan keuangan menggunakan tahun n-1, hal ini disebabkan Tahun 2021 masih menunggu publikasi opini laporan keuangan dari BPK RI Perwakilan Makassar. Opini Laporan Keuangan Tahun 2020 atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Soppeng mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang artinya laporan keuangan (LK) telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan (neraca), hasil usaha atau laporan realisasi anggaran (LRA), laporan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Penjelasan laporan keuangan juga telah disajikan secara memadai, informatif dan tidak menimbulkan penafsiran yang menyesatkan. Wajar karena laporan keuangan bebas dari keraguan dan ketidakjujuran serta lengkap informasinya, wajar tidak hanya terbatas pada jumlah-jumlah dan ketetapan pengklasifikasian aktiva dan kewajiban, namun yang terpenting meliputi pengungkapan yang tercantum dalam laporan keuangan.

➤ ***Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah***

Pengukuran yang dilakukan untuk nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menggunakan tahun n-1, hal ini disebabkan Tahun 2021 masih menunggu publikasi nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dari Kementerian PAN dan RB. Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja berdasarkan laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah tahun 2021 terhadap implementasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintah Kab. Soppeng tahun 2020 mendapatkan nilai 59,18 atau dengan predikat penilaian "CC", sedangkan untuk implementasi SAKIP tahun 2021 penilaiannya belum dipublikasikan oleh Kementerian PAN dan RB. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran masih perlu ditingkatkan jika dihubungkan dengan capaian kinerja.

➤ ***Indeks Inovasi Daerah***

Indikator Indeks Inovasi Daerah adalah sistem pengukuran dan penilaian terhadap penerapan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah.

Indeks Hasil Pengukuran Mandiri sebesar 35,48 (inovatif) dengan jumlah inovasi tahun 2019 dan tahun 2020 sebanyak 16 inovasi dan berada pada ranking 312 secara nasional.

Berikut grafik Nilai Akuntabilitas Daerah di Kab. Soppeng kurun waktu 2017-2019 :

Faktor keberhasilan/kegagalan terhadap pencapaian target kinerja sasaran adalah :

- ❖ Adanya Kebijakan Pemerintah terkait One Agency One innovation sehingga SKPD diharuskan membuat Inovasi sesuai tupoksinya masing-masing
- ❖ Meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dibarengi dengan penerapan SIPD yang terintegrasi;
- ❖ Tingginya komitmen pimpinan daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel;
- ❖ Kualitas pembangunan budaya kinerja dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil belum berjalan dengan baik.

Solusi/Alternatif Pemecahan Masalah :

- ❖ Menyusun target kinerja secara cermat dan realistik dengan memperhitungkan dampak pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi di tahun yang akan datang.
- ❖ Mengintensifkan koordinasi seluruh stakeholders perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, aset serta pengawasan (audit).
- ❖ Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP dan meningkatkan kualitas SDM penyelenggaran pemerintahan melalui Coaching Clinic dan Pendampingan penerapan SAKIP.

Dari sisi efektifitas penggunaan sumber daya (anggaran) terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.69**  
**Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran**

Sasaran	Anggaran	Realisasi	Serapan Anggaran (%)	Rata-rata capaian kinerja sasaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah serta kapasitas inovasi daerah	843.935.542.848	772.081.753.236	91,48	98,70	7,22

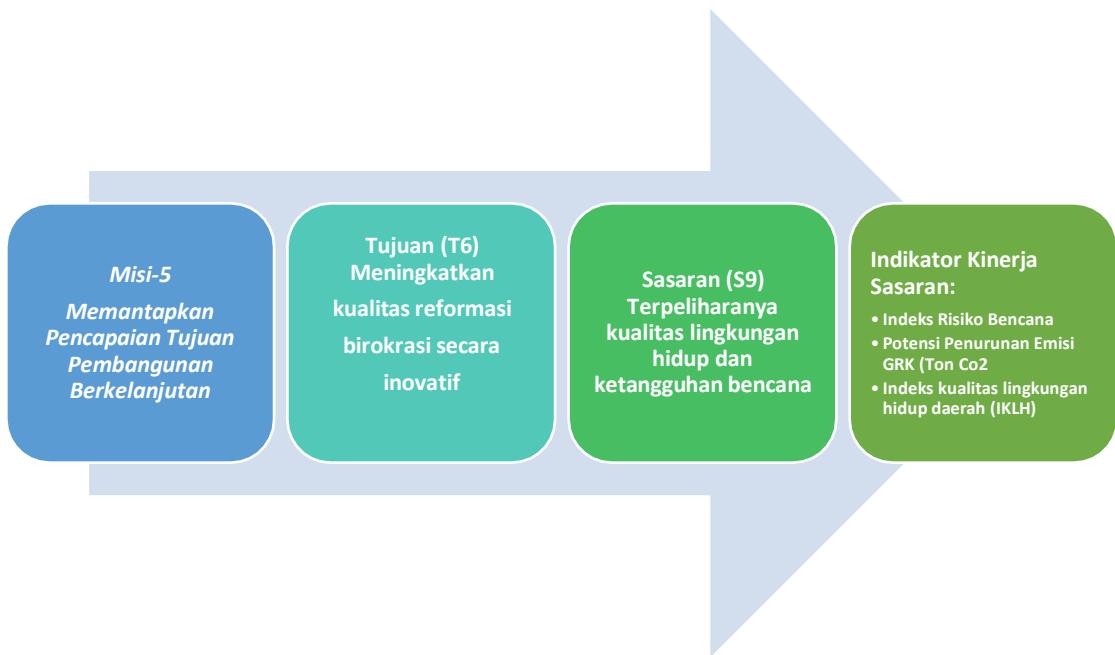
Adapun Program yang mendukung pencapaian sasaran adalah :

- 1) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- 2) Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- 3) Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- 4) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
- 5) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
- 6) Program Penyelenggaraan Pengawasan
- 7) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
- 8) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Total anggaran yang dialokasikan dalam APBD Tahun 2021 sebesar Rp. 843.935.542.848,- terealisasi sebesar Rp. 772.081.753.236,- atau 91,48%, dengan tingkat efisiensi sebesar 7,22%.

**Sasaran  
11**

- Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan bencana (S10)



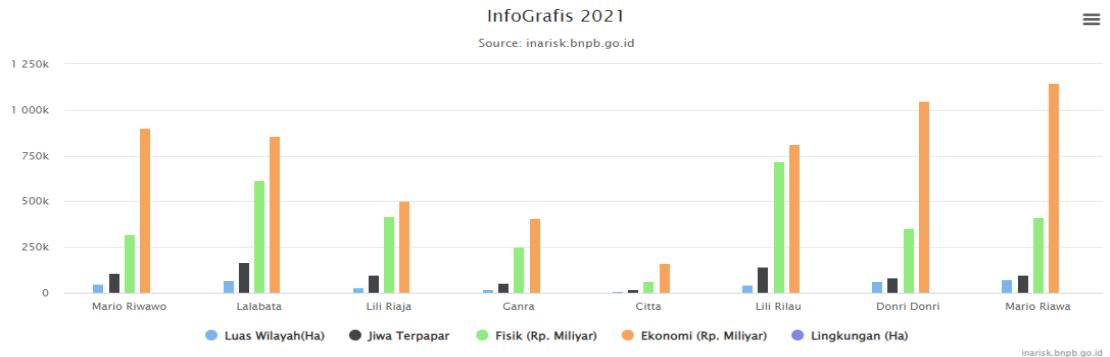
Berikut hasil Pengukuran Capaian Kinerja sasaran tersaji pada tabel berikut :

**Tabel 2.70**  
**Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 11**

Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2020	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2021			Target Akhir Kinerja RPJMD 2026
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
Indeks Risiko Bencana	131,20 (sedang)	-	-	131,20 (sedang)	131,20 (sedang)	100	131,20 (sedang)
Potensi Penurunan Emisi GRK (Ton Co2)	36.238	-	-	36.238	36.240,33	99,99	36.238
Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (IKLH)	N.A.	-	-	65,83	69,52	105,6	67,68
Rata-Rata Capaian Sasaran 11						101,86	

#### ➤ Indeks Risiko Bencana

Indeks Risiko Bencana daerah dihitung secara berkala sebagai wujud pengamatan dan pemantauan di daerah oleh BNPB melalui Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana (PERB). Indeks ini terbagi tiga ukuran yaitu mulai tingkatan rendah, sedang dan tinggi. Indeks ini dihitung salah satunya berdasarkan Indeks Kapasitas Daerah (IKD) yang dilaporkan oleh Pemerintah Daerah. Pada tahun 2021, Indeks Risiko Bencana Kabupaten Soppeng adalah 131,20 atau berada pada tingkatan “**sedang**”.



Jenis Bencana	Luas Bahaya (Ha)	Jiwa Terpapar	Fisik (Rp. Miliar)	Ekonomi (Rp. Miliar)	Lingkungan (Ha)
Gempabumi	0	0	0	0	0
Banjir	23.409	58,923	269,462	512,726	89
Banjir Bandang	8,789	33,496	260,784	152,882	73
Tanah Longsor	60,619	12,087	161,494	1,059,387	131
Kebakaran Hutan & Lahan	29,170	0	0	455,621	924
Kekeringan	135,943	237,720	0	1,668,000	9,681
Cuaca Ekstrim	58,376	202,055	2,095,523	1,461,736	0
COVID 19	3,764	104,548	0	0	0
Likuefaksi	36,022	118,855	373,161	524,226	76

#### ➤ Potensi Penurunan Emisi GRK (Ton Co2)

Perubahan iklim mengakibatkan terjadinya cuaca ekstrim yang dapat berakibat bencana dan atau gagal panen. Gas rumah kaca dikatakan menjadi penyebab dari perubahan iklim ini. Hasil pengukuran indikator Penurunan Emisi GRK (Ton Co2) pada tahun 2021 yaitu 36,240,33 Ton Co2, sedikit lebih tinggi dari target yang ditetapkan yaitu 36.238 Ton Co2 atau capaian sebesar 99,99%.

#### ➤ Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (IKLH)

Faktor penyebab keberhasilan/kegagalan yang berpengaruh terhadap pencapaian target kinerja sasaran adalah :

- ❖ Penguatan struktur dan mekanisme informasi kebencanaan daerah
- ❖ Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Tutupan Lahan telah memenuhi target yang ditetapkan baik oleh kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maupun target yang ditetapkan dalam IKK Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Soppeng
- ❖ Adanya kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan seperti program pengurangan sampah dengan pengomposan, penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah, pemasangan lampu LED, pengembangan pertanian organik, pengembangan pertanian pada lahan kering, peningkatan produktivitas tanaman aneka kacang dan umbi, penggunaan pupuk dan pestisida yang tidak berlebihan

Solusi/Alternatif Pemecahan Masalah :

- ❖ Penguatan sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir melalui perencanaan kontijensi.
- ❖ Mengedukasi masyarakat tentang aktivitas sehari-hari yang meninggalkan jejak karbon.

Dari sisi efektifitas penggunaan sumber daya (anggaran) terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.71 Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran**

Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Rata-rata capaian kinerja sasaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan bencana	3.801.551.893	3.559.271.770	93,63	101,86	8,23

Adapun Program yang mendukung pencapaian sasaran yaitu :

- 1) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- 2) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
- 3) Program Pengelolaan Persampahan

Total anggaran yang dialokasikan dalam APBD Tahun 2021 sebesar Rp3.801.551.893,- terealisasi sebesar Rp3.559.271.770,- atau 93,63% dengan tingkat efisiensi sebesar 8,23%.

#### A. 3.2 Realisasi Anggaran

Dalam rangka pencapaian target kinerja sebanyak 21 sasaran strategis, sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020 maka besaran alokasi dan realisasi belanja untuk setiap sasaran strategis dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel-2.72 Alokasi dan Realisasi Belanja untuk Pencapaian Sasaran**

SASARAN STARTEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ANGGARAN		PERSENT ASE (%)	TINGKAT EFISIENSI (%)
					TARGET (RP)	REALISASI (RP)		
Meningkatnya mutu penerapan standar pelayanan minimal (SPM) untuk pelayanan dasar (S1)	1 Nilai rata-rata tingkat capaian penerapan SPM	100%	84,65%	89,28	270.434.279.666	226.402.408.240,37	83,72	5,56
Meningkatnya mutu pelayanan publik non pelayanan dasar (S2)	2 IKM pelayanan publik non pelayanan dasar	84%	83,83%	99,80	630.649.800	582.944.800	92,43	7,37
Meningkatnya derajat pendidikan, literasi dan kualitas fisik masyarakat (S3)	3 Indeks Pendidikan	62,34	62,32	99,96	1.073.826.950	936.114.050	87,17	12,79

SASARAN STARTEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ANGGARAN		PERSENTASE (%)	TINGKAT EFISIENSI (%)
					TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)		
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (S4)	4 Indeks Kesehatan	76,8	76,63	99,78	152.245.965.812	118.902.591.021,37	78,10	21,68
Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah (S5)	5 Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,80	6,15	109,12	22.366.767.984	11.792.053.064	52,72	56,4
	6 Tingkat pengangguran terbuka (%)	4,4	3,92					
Meningkatnya taraf hidup masyarakat lapisan bawah (S6)	7 Angka Kemiskinan (%)	7,15%	7,53%	94,95	144.954.600.597	113.744.438.343,37	78,47	16,48
Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah (S7)	8 Indeks Infrastruktur Daerah	61,63	69,45	112,68	101.700.027.429	48.658.708.362	47,85	64,83
Meningkatnya fasilitas ekonomi wilayah (S8)	9 Nilai PDRB sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta Jasa Lainnya (milyar)	280,213	275,5	98,32	451.617.299	443.982.392	98,31	0,1
Terpeliharanya situasi aman dan damai dalam masyarakat (S9)	10 Angka Kriminalitas (Kasus)	86	92	93,94	1.416.392.000	1.401.911.570	98,98	-5,51
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan	11 Nilai LPPD (Skor/Status Kinerja)	3,9/Tinggi	3,7/Tinggi	98,70	3.801.551.893	3.559.271.770	93,63	7,22

SASARAN STARTEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ANGGARAN		PERSENTASE (%)	TINGKAT EFISIENSI (%)
					TARGET (RP)	REALISASI (RP)		
keuangan daerah serta kapasitas inovasi daerah (S10)	12 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	B	A					
	13 Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP					
	14 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	60 (B)	59,18 (CC)					
	15 Indek Inovasi Daerah	30.00-35.00 (inovatif)	35,48 (inovatif)					
Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan bencana (S11)	16 Indeks Risiko Bencana	131,20 (sedang)	131,20 (sedang)	101,86	3.801.551.893	3.559.271.770	93,63	8,23
	17 Potensi Penurunan Emisi GRK (Ton Co2)	36238 Ton Co2	36.240,33					
	18 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLH)	65,83 poin	69,52					

Dalam penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat yang dikeluarkan Lembaga Pemerintah Penilai Pelayanan Ombudsman-RI pada Unit Layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Unit Layanan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan dari 67 produk layanan administrasi sesuai surat Ombudsman-RI Nomor: B/406/PC.02/I/2022 masih dalam kategori pelayanan “SEDANG” dengan nilai rata-rata 74,18, dibandingkan dengan Unit Layanan Kesehatan pada UPTD Puskesmas dengan kategori “TINGGI” dengan nilai rata-rata 81,12.

Untuk mendapatkan peningkatan nilai rata-rata tinggi pada tahun berikutnya, perlu peningkatan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan terhadap pimpinan unit pelayanan publik yang memperoleh Predikat Kepatuhan Sedang sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian terhadap upaya pemenuhan komponen standar pelayanan.
2. Perbaikan produk hukum unit pelayanan, mulai dari tingkat pelayanan dasar, pelayanan perizinan yang masih perlu ditingkatkan percepatan penerbitan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Pemenuhan sarana prasarana unit layanan, mulai peningkatan informasi ketepatan waktu pelayanan sampai penyelesaian pelayanan.

